LPPD 2020

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM T.A 2020

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2021

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

KOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

TAHUN 2021

H.AFFAN ALFIAN,SE

Drs. SALMAZA, MAP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Walikota Subulussalam tahun 2020 ini telah dapat diselesaikan sesuai waktunya.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan kemajuan (*progress report)* penyelenggaraan pemerintahan untuk merefleksikan proses demokratisasi, akuntabilitas serta transparansi kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRK sebagai konsekuensi atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2020.

Secara substansi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Walikota Subulussalam Tahun 2020 telah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 yang mencakup pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan sehingga program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terealisasi dengan optimal, dan akan terus ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan ini disampaikan, sebagai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Walikota Subulussalam Tahun 2020 dan sebagai bahan evaluasi untuk pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Aparatur Sipil Negara, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk kemajuan Kota Subulussalam kedepan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih.

Subulussalam, Maret 2021
WALIKOTA SUBULUSSALAM

H. AFFAN ALFIAN

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum ..... I- 1
B. Gambaran Umum Daerah ..... I- 4
C. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah ..... I- 34
D. Visi dan Misi ..... I- 37
E. Strategi dan Arah Kebijakan ..... I- 40
F. Program Pembangunan Daerah ..... I- 43
G. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... I- 44
H. Program Unggulan Pemerintah Kota Subulussalam ..... I- 44
I. Penjabaran APBK Subulussalam Tahun 2020..... I- 45

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Capaian Kinerja Makro ..... II- 1
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... II- 2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)..... II- 2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) ..... II- 107
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... II- 143
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ..... II- 149

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang diterima ..... III- 1

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A. Penerapan dan Pencapaian SPM..... IV- 1
B. Program dan Kegiatan Pendukung SPM..... IV- 32

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
1.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan	I-5
1.2	Luas Lahan Menurut Penggunaan	I-5
1.3	Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020	I-6
1.4	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin (2019-2020)	I-6
1.5	Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2020	I-6
1.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2020	I-7
1.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020	I-7
1.8	Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2020	I-10
1.9	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020	I-10
1.10	Sentra Produksi Komoditi Hortikultura	I-11
1.11	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-12
1.12	Populasi Ternak Besar menurut Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-13
1.13	Populasi Ternak Kecil menurut Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-13
1.14	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-14
1.15	Jumlah Ternak yang di Potong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-14
1.16	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-15
1.17	Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-16
1.18	Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-16
1.19	Produksi Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-17
1.20	Nama-Nama Tempat Wisata, Alamat dan Jaraknya dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kota di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-18
1.21	Jumlah Hotel, Wisma atau Homestay dan Rumah Makan/Restoran/Café Tahun 2020	I-18
1.22	Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2020	I-19
1.23	Jumlah Perusahaan menurut Kode Industri di Kota Subulussalam	I-20

	Tahun 2020		
1.24	Sarana Perdagangan Tahun 2020	.....	I-21
1.25	Perkembangan PDRB Tahun 2018 s/d 2020	.....	I-23
1.26	PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kota Subulussalam Tahun 2020	.....	I-24
1.27	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Tahun 2019	.....	I-25
1.28	Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Subulussalam Tahun 2018 s/d 2020	.....	I-25
1.29	Kecamatan dan Desa di Kota Subulussalam	.....	I-26
1.30	SKPK di Kota Subulussalam	.....	I-32
1.31	Jumlah PNS di Kota Subulussalam	.....	I-34
1.32	Target dan Realisasi PAD Tahun 2020	.....	I-46
1.33	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Subulussalam Tahun 2020	.....	I-47
1.34	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020	.....	I-48
1.35	Alokasi Belanja Tahun 2020	.....	I-52
2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	.....	II-150
2.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-151
2.3	Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2015-2020	.....	II-152
2.4	Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM	.....	II-152
2.5	Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2015-2020	.....	II-156
2.6	Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM	.....	II-157
2.7	Pengukuran Kinerja Sasaran Startegis Kedua	.....	II-160
2.8	Perbandingan Angka Harapan Hidup Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM	.....	II-162
2.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-165
2.10	Indeks Pembangunan Gender Kota Subulussalam	.....	II-166
2.11	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Subulussalam antara realisasi tahun 2020 dengan target akhir RPJM Tahun 2024	.....	II-167
2.12	Pengukuran Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020	.....	II-167
2.13	Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia	.....	II-168
2.14	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-171
2.15	Perbandingan KLH Tahun 2019-2020 antara target dan realisasi	.....	II-172
2.16	Perbandingan KLH antara realisasi tahun 2020 dengan target akhir RPJM tahun 2024	.....	II-172
2.17	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-174
2.18	Panjang Jalan di Kota Subulussalam berdasarkan panjang tiap kondisi 2015-2020	.....	II-175

2.19	Perbandingan Persentase Jalan Kondisi Baik Realisasi Tahun 2020-Target Akhir RPJM Tahun 2024	.....	II-176
2.20	Pengukuran Kinerja Sasara Strategis	.....	II-177
2.21	Perbandingan Realisasi Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2019-2020	.....	II-178
2.22	Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Terget di RPJM	.....	II-178
2.23	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-179
2.24	Lokasi Destinasi Objek Wisata	.....	II-180
2.25	Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Indikator "Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan"	.....	II-181
2.26	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-182
2.27	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Subulussalam Tahun 2020	.....	II-185
2.28	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 indikator pertumbuhan PDRB	.....	II-186
2.29	Perbandingan Laju Pertumbahan PDRB antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, Tahun 2016-2020	.....	II-188
2.30	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-191
2.31	Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2015-2020	.....	II-192
2.32	Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Terget di RPJM	.....	II-192
2.33	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-196
2.34	Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	.....	II-198
2.35	Jumlah Angkatan Kerja dengan Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	.....	II-198
2.36	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam berdasarkan jenjang Pendidikan	.....	II-199
2.37	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka RPJM 2019-2024	.....	II-200
2.38	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-202
2.39	Perbandingan antara target dan realisasi indicator nilai AKIP Tahun 2020 Pemerintah Kota Subulussalam	.....	II-203
2.40	Komponen Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP antara Tahun 2015-2020	.....	II-204
2.41	Realisasi Kinerja dari tahun 2020 dan Target Tahun Akhir RPJMD 2024	.....	II-204
2.42	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2020	.....	II-206
2.43	Realisasi Kinerja dari Tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024	.....	II-207
2.44	Capaian Opini Laporan Keuangan BPK dari tahun 2015-2019	.....	II-208
2.45	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-214

2.46	Realisasi Kinerja dari Tahun 2020 dan Target Tahun Akhir RPJMD 2024	.....	II-215
2.47	Realisasi Kinerja Dari Tahun 2020 dan Terget Tahun Akhir RPJMD 2024	.....	II-216
2.48	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-218
2.49	Target Indeks Melek Alquran Kota Subulussalam dalam RPJMD 2016-2024	.....	II-220
2.50	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	.....	II-221
2.51	Persentase Penyaluran ZIS terhadap Golongan Penerima ZIS	.....	II-222
2.52	Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJMD	.....	II-222
3.1	Laporan Progres Fisik Tugas Pembantuan	.....	III-3
3.2	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tugas Pembantuan	.....	III-4
4.1	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Subulussalam	.....	IV-2
4.2	Realisasi SPM Bidang Kesehatan	.....	IV-3
4.3	Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan	.....	IV-17
4.4	Jenis Layanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum	.....	IV-19
4.5	Jenis Layanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat	.....	IV-21
4.6	Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	.....	IV-24
4.7	Realisasi SPM Urusan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	.....	IV-25
4.8	Target Capaian SPM Urusan Sosial	.....	IV-28
4.9	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial	.....	IV-31

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah Pusat merupakan *progress report* yang pada prinsipnya merupakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Adapun dasar hukum penyusunan LPPD Walikota ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan, Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah untuk kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2014-2019;
21. Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019;
22. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019;
23. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020;
24. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Kota Subulussalam Tahun 2019.
26. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota (P-RKPK) Subulussalam Tahun 2019;
27. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020.
28. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan

a. Kondisi Geografis Daerah

Secara administratif Kota Subulussalam terbentuk sejak Tahun 2007 yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Simpang Kiri, Penanggalan, Rundeng, Longkib dan Sultan Daulat, 8 Kemukiman serta 82 desa, Kecamatan Sultan Daulat merupakan Kecamatan Terluas dengan luas wilayah sekitar 602 km^2 sedangkan Kecamatan Penanggalan mempunyai luas wilayah terkecil yaitu sekitar 93 km^2 dan secara Astronomis Kota Subulussalam terletak pada koordinat 02^0 27' 39'' - 03^0 00' 00'' Lintang Utara/*North Latitude* dan 97^0 45' 00'' - 98^0 10' 00'' Bujur Timur/*East Latitude*.

Sebagian besar wilayah Kota Subulussalam memiliki topografi dataran rendah yang jumlahnya mencapai 65,94% dan sisanya merupakan perbukitan sebesar 34,06%. Wilayah Kota Subulussalam berada pada ketinggian 84 M diatas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Daerah

Batas administrasi Kota Subulussalam sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Subulussalam adalah ± 1.391 Km² atau 139.100 Ha, dengan perincian luas setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Simpang Kiri	213,00	21.300	15,00
2.	Penanggalan	93,00	9.300	7,00
3.	Rundeng	320,00	32.000	23,00
4.	Sultan Daulat	602,00	60.200	43,00
5.	Longkib	163,00	16.300	12,00
	Jumlah	**1.391**	**139.100**	**100,00**

Sumber : Bps Kota Subulussalam

d. Topografis dan Penggunaan Lahan

Sesuai dengan kondisi topografis, Kota Subulussalam terdiri dari kawasan pegunungan, perbukitan dan memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan lebih banyak digunakan untuk usaha pertanian dan perkebunan, sedangkan luas lahan untuk pemukiman dan usaha lainnya relatif sedikit. Selanjutnya luas lahan menurut penggunaannya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan

No.	Penggunaan Tanah	Luas Area (Ha)
1.	Bangunan dan Halamannya	38.854,00
2.	Tegal/Kebun/Ladang	19.172,00
3.	Sawah	3.244,00
4.	Hutan	36.369,15
	- Hutan Saka Alam dan Pelestarian Alam	4.735,50
	- Hutan lindung	19.025,06
	- Hutan produksi	10.583,83
	- Hutan produksi konservasi	2.024,76
5.	Perairan	83.519,92

Sumber : Subulussalam dalam Angka,

2. Gambaran Umum Demografis, Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan dan Pendidikan

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Subulussalam tahun 2020 tercatat sebanyak 97.407 jiwa. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah dan kepadatan penduduk per Km² pada masing-masing kecamatan.

Tabel 1.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km²
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Simpang Kiri	213,00	19.588	19.289	38.877	182,52
2	Penanggalan	93,00	9.139	8.881	18.020	193,76
3	Rundeng	320,00	7.832	7.352	15.184	47,45
4	Sultan Daulat	602,00	9.496	9.035	18.531	30,78
5	Longkib	163,00	3.497	3.298	6.795	41,68
	Subulussalam	**1.391,00**	**49.552**	**47.855**	**97.407**	**70,02**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

b. Komposisi Penduduk

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (2019-2020)

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%
2019	93.457	47.496	50,82	45.961	49,18
2020	97.407	49.552	50,87	47.855	49,13

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2) Berdasarkan Struktur Usia

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2020

Jumlah Penduduk	Usia 0-9 Tahun	Usia 10-19 Tahun	Usia 20-29 Tahun	Usia 30-39 Tahun	Usia 40-49 Tahun	Usia 50-59 Tahun	Usia 60-69 Tahun	Usia 70 Tahun keatas
97.407	22.216	20.870	18.686	14.611	10.213	6.222	2.964	1625

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

3) Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2020

NO	Jenis Pendidikan	Kecamatan Simpang Kiri	Kecamatan Penanggalan	Kecamatan Rundeng	Kecamatan Sultan Daulat	Kecamatan Longkib
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tidak/Belum Sekolah	12.821	6.081	5.195	6.131	2.218
2	Belum Tamat SD	5.447	3.104	3.726	3.750	1.291
3	SD	6.807	2.758	3.051	4.027	1.629
4	SLTP	4.278	1.916	1.358	1.932	747
5	SLTA	6.805	3.127	1.571	2.282	759
6	Diploma II	301	130	60	88	29
7	Diploma III	534	221	48	87	38
8	D IV/S1	1.820	658	173	230	83
9	S2	63	23	2	4	1
10	S3	1	2	-	-	-
	Jumlah	**38.877**	**18.020**	**15.184**	**18.531**	**6.795**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

4) Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020

NO	Jenis Pekerjaan	Usia 0-24 Tahun	Usia 25-49 Tahun	Usia 50-74 Tahun	Usia >> 75 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum/Tidak Bekerja	31.884	218	44	63
2	Mengurus Rumah Tangga	2.079	11.452	3.074	186
3	Pelajar/Mahasiswa	18.536	2.452	-	-
4	Pensiunan	-	3	71	13
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1.633	468	-
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	4	182	22	-
7	Kepolisian RI (POLRI)	9	158	24	1
8	Perdagangan	1	74	107	14
9	Petani/Pekebun	582	7.475	4.503	632
10	Peternak	-	12	9	1
11	Nelayan/Perikanan	-	27	11	2

12	Industri	-	8	5	-
13	Kontruksi	-	18	17	1
14	Transportasi	-	25	19	-
15	Karyawan Swasta	8	560	128	3
16	Karyawan BUMN	-	44	14	-
17	Karyawan BUMD	-	6	-	-
18	Karyawan Honorer	1	281	3	-
19	Buruh Harian Lepas	4	223	77	3
20	Buruh Tani/Perkebunan	1	172	70	7
21	Buruh Nelayan/Perikanan	-	3	-	-
22	Pembantu Rumah Tangga	-	3	-	-
23	Tukang Cukur	-	-	1	-
24	Tukang Listrik	-	-	2	-
25	Tukang Batu	-	6	3	-
26	Tukang Kayu	-	14	5	2
27	Tukang Las/Pandai Besi	-	6	6	1
28	Tukang Jahit	-	9	5	-
29	Penata Rias	-	1	-	-
30	Mekanik	-	21	5	-
31	Seniman	-	3	-	-
32	Imam Masjid	-	2	5	1
33	Wartawan	-	5	7	-
34	Ustad/Mubaligh	1	21	6	1
35	Walikota	-	-	1	-
36	Wakil Walikota	-	-	1	-
37	Anggota DPRD Prov	-	-	1	-
38	Anggota DPRD Kab/Kota	-	10	1	-
39	Dosen	-	8	1	-
40	Guru	1	245	25	-
41	Pengacara	-	2	-	-
42	Notaris	-	-	1	-
43	Akuntan	-	1	-	-
44	Konsultan	-	1	-	-
45	Dokter	1	37	1	-
46	Bidan	3	98	-	-
47	Perawat	1	53	-	-
48	Apoteker	-	1	-	-

49	Peneliti	-	1	-	-
50	Sopir	1	115	32	-
51	Pedagang	2	103	72	7
52	Perangkat Desa	-	12	20	-
53	Kepala Desa	-	7	6	-
54	Wiraswasta	491	7.174	997	36
55	Pekerjaan Lainnya	-	-	-	1
	Jumlah	**53.611**	**32.985**	**9.836**	**975**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Tanaman Pangan

Lahan sawah atau lahan panen padi di Kota Subulussalam pada tahun 2020 seluas 978 hektar, 561 hektar diantaranya berada di kecamatan Sultan Daulat dan 188 hektar di kecamatan Penanggalan. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Sultan Daulat dan Penanggalan masih sebagai wilayah dengan potensi sawah terbesar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Menurut jenis pengairannya lahan sawah di Kota Subulussalam terdiri dari lahan sawah irigasi sederhana 150 hektar (4,62%), tadah hujan 2864 hektar (88,29%) dan rawa lebak 230 hektar (7,09%). Lahan sawah irigasi sederhana terluas terdapat di kecamatan Sultan Daulat 150 hektar. Komoditi yang disajikan pada sub sektor tanaman pangan mencakup tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi tanaman pangan terbesar di Kota Subulussalam pada tahun 2020 adalah produksi jagung sebesar 16.588 ton, padi 3.344,8 ton, dan Kacang Tanah 30,4 ton. Sentra Produksi Komoditi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.8
Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2020

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1.	Padi	Seluruh Kecamatan
2.	Jagung	Seluruh Kecamatan
3.	Ubi Jalar	Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng
4.	Ubi Kayu	Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Longkib dan Kecamatan Rundeng
5.	Kedelai	Kecamatan Simpang Kiri, Penanggalan dan Sultan Daulat
6.	Kacang Tanah	Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Rundeng

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

Adapun jumlah produksi tanaman pangan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Produksi
1.	Padi	3.344,8 Ton
2.	Jagung	16.588 Ton
3.	Kedelai	6 Ton
4.	Kacang Tanah	30,4 Ton
5.	Kacang Hijau	15,7 Ton
6.	Ubi Kayu	17,25 Ton
7.	Ubi Jalar	1,92 Ton

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

Produksi padi dan jagung pada tahun 2020 sangat dominan di kota subulussalam yaitu sebanyak 3.344,8 Ton dan 16.588 Ton dibandingkan dengan produksi tanaman pangan lainnya.

2) Tanaman Hortikultura

Sub sektor hortikultura mencakup tanaman sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarmaka. Luas panen dan produksi tanaman sayuran yang di panen sekaligus meliputi beberapa jenis tanaman yaitu bawang putih, bawang merah, buncis, bawang daun, kentang, kubis, Lombok, ketimun, petsai, terong, bayam, kangkung, kacang panjang, tomat dan labu siam. Luas panen tanaman sayuran pada tahun 2020 yang terbesar ada tiga jenis tanaman yakni kacang panjang 61 ha, ketimun 72 ha

dan cabai 87 ha. Pada tahun 2020, produksi buah-buahan yang memberikan kontribusi produksi terbesar adalah pisang sebanyak 15.106 kuintal. Sentra Produksi Komoditi hortikultura dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10
Sentra Produksi Komoditi Hortikultura

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1.	Cabe	Seluruh Kecamatan
2.	Kacang Panjang	Seluruh Kecamatan
3.	Durian	Seluruh Kecamatan
4.	Pepaya	Seluruh Kecamatan
5.	Jahe	Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib
6.	Lengkuas	Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib
7.	Kunyit	Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib
8.	Kencur	Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib
9.	Pisang	Seluruh Kecamatan
10.	Mangga	Seluruh Kecamatan
11.	Salak	Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib

Sumber : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS, 2020

Selanjutnya jumlah produksi tanaman holtikultura dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Di Kota Subulussalam Tahun 2020

No	Komoditi	Jumlah Produksi
1.	Cabe	834 Kuintal
2.	Kacang Panjang	618 Kuintal
3.	Semangka	1.654 Kuintal
4.	Jahe	513.875 Kg
5.	Lengkuas	342.575Kg
6.	Kunyit	207.232 Kg
7.	Kencur	233.547 Kg
8.	Terung	554 Kuintal
9.	Ketimun	2.929 Kuintal
10.	Bayam	314 Kuintal
11.	Kangkung	230 Kuintal
12.	Mangga	3.235 Kuintal
13.	Durian	677 Kuintal
14.	Pisang	15.106 Kuintal
15.	Pepaya	5.827 Kuintal
16.	Salak	364 Kuintal
17.	Jengkol	3.564 Kuintal
18.	Melinjo	669 Kuintal
19.	Petai	787 Kuintal
20.	Sawo	593 Kuintal

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa produksi tanaman hortikultura di Kota Subulussalam sangat besar seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

3) Peternakan

Populasi ternak besar terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda. Pada tahun 2020, populasi ternak besar yang terdapat di Kota Subulussalam hanya sapi potong, kerbau dan kuda dengan populasi sebesar 2484 ekor, 63 ekor, dan 5 ekor. Populasi ternak sapi sebagian besar berada di kecamatan Simpang Kiri sebanyak 675 ekor, dan

kecamatan Longkib sebanyak 648 ekor. Populasi ternak kecil terdiri dari kambing, domba dan babi. Pada tahun 2020, total populasi berturut-turut adalah 6440 ekor kambing, 1657 ekor domba dan 114 ekor babi. Populasi ternak kambing sebagian besar berada di kecamatan Simpang Kiri sebesar 2183 ekor dan kecamatan Sultan Daulat 1595 ekor. Populasi ternak domba terbesar berada di kecamatan Longkib sebanyak 472 ekor dan kecamatan Sultan Daulat sebanyak 332 ekor. Populasi unggas terdiri dari ayam kampong, ayam petelur, ayam pedaging dan itik/itik manila. Pada tahun 2020, populasi unggas di Kota Subulussalam terdiri dari ayam kampung 35.765 ekor, ayam petelur 0 ekor, ayam pedaging 75.134 ekor, dan itik/itik manila 4.134 ekor. Populasi ayam kampong terbesar berada di kecamatan Simpang Kiri sebanyak 9.710 ekor. Populasi ayam pedaging tertinggi berada di kecamatan Simpang Kiri dengan jumlah ayam pedaging sebesar 22.908 ekor, dan populasi ayam petelor pada tahun 2020 tidak terdata, untuk lebih jelasnya jumlah populasi ternak berdasarkan ternak besar, kecil dan unggas kita lihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 1.12
Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan Di Kota Subulussalam Tahun 2020

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda
Simpang Kiri	-	675	58	-
Penanggalan	-	203	-	-
Rundeng	-	540	-	-
Sultan Daulat	-	418	5	5
Longkib	-	648	-	-
Subulussalam	0	2484	63	5

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

Tabel 1.13
Populasi Ternak Kecil Menurut Kecamatan Di Kota Subulussalam Tahun 2020

Kecamatan	Kambing	Domba	Babi
Simpang Kiri	2183	283	-
Penanggalan	722	292	114
Rundeng	1010	332	-
Sultan Daulat	1595	278	-
Longkib	930	472	-
Subulussalam	6440	1657	114

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

Tabel 1.14
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak
Di Kota Subulussalam Tahun 2020

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelor	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
Simpang Kiri	9.710	-	22.908	2.866
Penanggalan	4.510	-	16.155	211
Rundeng	5.610	-	7.644	325
Sultan Daulat	9.448	-	18.659	593
Longkib	6.487	-	9.768	139
Subulussalam	35.765	-	75.134	4.134

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

Dari 3 (tiga) table diatas dapat dilihat bahwa populasi ternak berdasarkan klasifikasi ternak besar, ternak kecil dan unggas, Kecamatan Simpang Kiri menjadi yang dominan dalam hal tersebut hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Sementara untuk populasi jenis ternak kecil seperti Babi hanya terdapat di Kecamatan Penanggalan dengan jumlah 114 ekor, untuk populasi ternak sapi perah tidak ada di Kota Subulussalam dan Populasi yang paling sedikit yaitu ternak kuda sebanyak 5 ekor.

Selanjutnya perkembangan jumlah ternak yang di potong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Jumlah Ternak Yang di Potong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak
Di Kota Subulussalam (ekor) Tahun 2020

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba
Simpang Kiri	185	52	260	170
Penanggalan	28	0	76	59
Rundeng	12	0	134	130
Sultan Daulat	12	4	172	106
Longkib	14	0	23	473
Subulussalam	251	56	665	938

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah ternak yang di potong pada tahun 2020, ternak yang paling banyak di potong yaitu domba dan yang paling sedikit di potong yaitu kerbau serta Kecamatan yang

paling banyak/dominan yaitu Kecamatan Simpang Kiri seiring dengan jumlah penduduknya yang banyak sehingga tingkat konsumsi lebih tinggi.

4) Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 128,6 ton yang terdiri dari perairan umum saja. Daerah yang memberikan kontribusi terbesar pada produksi perikanan adalah kecamatan Rundeng dengan produksi 97,` ton, kemudian diikuti oleh kecamatan Sultan Daulat 21,5 ton dan kecamatan Longkib dengan produksi 2,5 ton. Umumnya para nelayan di Kota Subulussalam menggunakan perahu motor saat mencari ikan di sungai dan alat penangkap ikan yang popular digunakan oleh nelayan adalah pancing dan jaring.

Tabel 1.16
Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum menurut Kecamatan Di Kota Subulussalam (Ton) Tahun 2020

Kecamatan	Baung	Belut	Jurung	Lele Lokal	Temabu	Pahitan	Gabus	Towes	Bujuk	Ketting
Simpang Kiri	0,9	-	0,7	-	1	2	0,4	-	-	-
Penanggalan	-	-	0,8	-	1,2	0,5	-	-	-	-
Rundeng	8	18,5	6,5	10	12	9,7	7	11	8,4	6
Sultan Daulat	2	12	2,2	-	1,5	3	-	0,8	-	-
Longkib	0,5	-	0,5	-	1	-	0,5	-	-	-
Subulussalam	**11,4**	**30,5**	**10,7**	**10**	**16,7**	**15,2**	**7,9**	**11,8**	**8,4**	**6**

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah produksi perikanan tangkap berdasarkan jenisnya paling banyak yaitu belut dengan 30.5 ton dan temabu 16,7 ton, kedua jenis ini banyak produksinya di Kecamatan Rundeng.

Produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.17
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor Di Kota Subulussalam (Ton) Tahun 2020

Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Umum	Nilai (000 Rp.)
Simpang Kiri	-	5	155.500
Penanggalan	-	2,5	77.750
Rundeng	-	97,1	3.019.810
Sultan Daulat	-	21,5	668.650
Longkib	-	2,5	77.750
Subulussalam	0	128,6	3.999.460

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2020

5) Perkebunan

Masyarakat Kota Subulussalam pada umumnya bekerja pada sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, karet dan coklat. Pada tahun 2020 jumlah luas perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan mencapai 11.529 Ha dengan produksi panen sebesar 35.729 ton. Semua kecamatan di Kota Subulussalam memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu perkebunan karet mengalami perluasan panen, pada tahun 2020 mencapai 2.828 Ha. Selain itu Kota Subulussalam juga memiliki potensi perkebunan Kelapa Dalam. Luas Perkebunan Kelapa Dalam yang sudah menghasilkan pada tahun 2020 yaitu 438 Ha. Selanjutnya luas areal tanaman perkebunan menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.18
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Subulussalam (ha) Tahun 2020

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Simpang Kiri	2.984	113	805	1	20
Penanggalan	1.634	24	420	-	34
Rundeng	2.440	89	157	2	76
Sultan Daulat	1.809	58	645	2	230
Longkib	2.662	154	801	-	28
Subulussalam	11.529	438	2.828	5	388

Sumber: Kota Subulussalam Tahun 2020

Selanjutnya produksi tanaman perkebunan pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Subulussalam (ton) Tahun 2020

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Simpang Kiri	9.450	69	630	1	15
Penanggalan	5.400	14	213	-	18
Rundeng	7.320	51	125	1	45
Sultan Daulat	5.706	32	520	1,3	155
Longkib	7.853	99	140	-	20
Subulussalam	35.729	265	1.628	3,3	253

Sumber: Kota Subulussalam Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat produksi tanaman perkebunan yang paling banyak yaitu kelapa sawit dan yang paling sedikit tanaman kopi produksinya.

6) Pariwisata

Kota Subulussalam merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Aceh yang memiliki objek wisata sejarah budaya, alam dan minat khusus. Terdapat 9 tempat wisata di Kota Subulussalam, yang tersebar di berbagai kecamatan pada tahun 2019, kecuali di kecamatan Longkib. Selain objek wisata yang indah, ketersediaan akomodasi juga sangat diperlukan dalam menopang pariwisata. Akomodasi yang diperlukan adalah tempat penginapan, rumah makan dan akomodasi lainnya, berikut nama-nama tempat wisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.20
Nama-Nama Tempat Wisata, Alamat dan Jaraknya dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kota Dalam Kota Subulussalam Tahun 2020

No	Nama Tempat Wisata	Alamat	Jarak Dari Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak Dari Ibukota Kotamadya (Km)
1.	Pemandian Alam dan Arung Jeram	Sikelang	5	7
2.	Pemandian Lae Pandulangan	Lae Batu-Batu	20	7
3.	SKPC	Penuntungan	4	5
4.	Air Terjun Kedabuhan	Jontor	14	15
5.	Makam Syech Hamzah Fansuri	Oboh	3	27
6.	Makam Raja Sultan Daulat	Singgersing	5	25
7.	Makam Syekh Riman	Namo Buaya	15	15
8.	Taman Kota	Belegen Mulia	3	3
9.	Air Terjun Lelangit	Singgersing	5	25

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jarak tempuh tempat wisata di Kota Subulussalam baik dari ibukota Kecamatan maupun ibukota Kotamadya, tempat wisata yang paling dekat adalah taman kota dan tempat wisata yang paling jauh dari pusat kota yaitu Makam Syech Hamzah Fansuri di oboh Kecamatan Rundeng, Wisata di Kota Subulussalam di dominasi oleh wisata alam dan Religi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya air terjun, sungai (pemandian) dan makam-makam ulama besar.

Jumlah hotel, wisma/homestay, dan rumah makan/restoran/cafe yang mendukung sektor kepariwisataan di Kota Subulussalam yang terdaftar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.21
Jumlah Hotel, Wisma/Homestay dan Rumah Makan/Restoran/Cafe Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Hotel Berbintang	1
2.	Hotel Non Berbintang	10
3.	Rumah makan/restoran/cafe	74

Sumber : Kota Subulussalam Dalam Angka, 2020

7) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Koperasi adalah salah satu soko guru perekonomian yang diharapkan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemeritah daerah ikut mendorong untuk berkembangnya koperasi dan UMKM dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, total koperasi yang ada di Kota Subulussalam berjumlah 86 unit. Jika dilihat berdasarkan jenis koperasi, maka koperasi Non Pegawai Negeri merupakan jenis koperasi terbanyak yang ada disini, yaitu sebanyak 81 unit atau 94% dari seluruh koperasi di Kota Subulussalam. Koperasi Non Pegawai Negeri paling banyak terdapat di Kecamatan Simpang Kiri yaitu sejumlah 34 unit dari seluruh total koperasi Non Pegawai Negeri. Jika dilihat berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Simpang Kiri dan Penanggalan memiliki koperasi yang terbanyak yaitu 37 unit dan 27 unit. Kecamatan Longkib memiliki jumlah koperasi paling sedikit, yakni hanya sebanyak 3 unit.

Selanjutnya jumlah koperasi menurut jenis koperasi dan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.22
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Dan Kecamatan
Di Kota Subulussalam Tahun 2020

Kecamatan	Koperasi Unit Desa	Koperasi Pegawai Negeri	Koperasi Non Pegawai Negeri
Simpang Kiri	2	1	34
Penanggalan	-	-	27
Rundeng	-	-	6
Sultan Saulat	1	-	11
Longkib	1	-	3
Jumlah	4	1	81

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2020

8) Perindustrian

Perindustrian adalah salah satu sektor yang dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor perindustrian sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan peluang kerja untuk menurunkan angka pengangguran, di Indonesia industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok yaitu industri besar, industri sedang/menengah, industri kecil dan industri mikro. Pengelompokan ini di dasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat di dalamnya, tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi ataupun modal yang ditanamkan.

Selanjutnya jumlah perusahaan menurut kode industri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.23
Jumlah Perusahaan Menurut Kode Industri
Di Kota Subulussalam Tahun 2020

Kode Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Makanan	256	703
Industri Pakaian Jadi	45	132
Industri Kayu, barang dari kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Ayaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	284	1.406
Industri Minuman	1	1
Industri Pengolahan Tembakau	-	-
Industri Tekstil	-	-
Industri Pakaian Jadi	45	132
Industri Kulit, Barang dari kulit dan alas kaki	-	-
Industri Kertas	-	-
Jumlah	631	2.374

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi & UKM, 2020

9) Perdagangan

Sektor perdagangan dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor perdagangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan peluang kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Sarana Perdagangan merupakan suatu elemen penting untuk meningkatkan kualitas perdagangan di Kota Subulussalam, seiring dengan semakin baiknya sarana perdagangan baik dari segi kwantitas maupun kualitas sarana perdagangan maka secara tidak langsung akan mendongkrak sektor perdagangan di Kota Subulussalam ini. Sejauh ini sarana perdagangan yang paling dominan yaitu kios dan warung yaitu sejumlah 836 dan 716, sarana perdagangan yang paling sedikit yaitu pasar umum, untuk lebih jelas Selanjutnya jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.24
Sarana Perdagangan Tahun 2020

Uraian	Jumlah
a. Pasar Umum	2
b. Pasar Desa	9
c. Toko	322
d. Kios	836
e. Warung	716
f. Rumah Makan/Restoran	143

Sumber : Kota Subulussalam Dalam Angka, 2020

4. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Subulussalam

PDRB merupakan salah satu parameter untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Melalui PDRB, dapat diketahui beberapa indikator ekonomi makro yaitu:

a. Nilai nominal PDRB yaitu nilai tambah masing-masing lapangan usaha melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.
b. Peranan atau kontribusi sektor ekonomi, yaitu struktur ekonomi dalam suatu daerah yang mampu menciptakan nilai tambah.
c. Laju pertumbuhan ekonomi, yaitu gambaran aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu periode.
d. PDRB perkapita, yaitu gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing pendukung akibat adanya aktivitas produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Kota Subulussalam atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 84 miliar rupiah menjadi 1726 miliar rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. PDRB Kota Subulussalam atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari sebesar 1308 tahun 2019 menjadi senilai 1358 miliar rupiah pada tahun 2020. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini menunjukkan peningkatan volume produksi barang dan jasa secara riil, karena sudah terbebas dari pengaruh kenaikan harga. Struktur lapangan usaha masyarakat Kota Subulussalam dapat dilihat dari besaran kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Subulussalam. Pada tahun 2020 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB dengan kontribusi sebesar 21,54%, kemudian lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,26%, disusul oleh lapangan usaha kontruksi sebesar 16%. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 14,56%..

Perkembangan PDRB Kota Subulussalam Tahun 2018 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 1.25
Perkembangan PDRB Tahun 2018 s/d 2020

No.	Tahun	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)
1	2018	1.536	1.247
2	2019	1.642	1.308
3	2020	1.726	1.358

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2020

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terus terjadi peningkatan PDRB dari tahun ke tahun.

5. Struktur Perekonomian Regional

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas 17 lapangan usaha. Struktur ekonomi sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB pada daerah tertentu.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kota Subulussalam. Selanjutnya berikut ini digambarkan struktur perekonomian dan kontribusi masing-masing lapangan usaha PDRB Kota Subulussalam tahun 2020.

Tabel : 1.26

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Menurut Lapangan Usaha Di Kota Subulussalam Tahun 2020 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	372,00
2	Pertambangan dan Penggalian	28,52
3	Industri Pengolahan	241,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29
6	Konstruksi	276,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparassi Mobil dan Sepeda Motor	322,66
8	Transportasi dan Perdagangan	93,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,30
10	Informasi dan Komunikasi	46,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	38,43
12	Real Estate	64,49
13	Jasa Perusahaan	5,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	121,95
15	Jasa Pendidikan	43,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,12
17	Jasa Lainnya	11,05
	Jumlah	**1.726,92**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2020

6. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Berikut ini dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2020:

Tabel : 1.27
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	2020**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,21
2	Pertambangan dan Penggalian	-22,58
3	Industri Pengolahan	3,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,14
6	Konstruksi	9,88
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparassi Mobil dan Sepeda Motor	5,11
8	Transportasi dan Pergudangan	14,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,41
10	Informasi dan Komunikasi	2,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55
12	Real Estate	7,00
13	Jasa Perusahaan	6,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73
15	Jasa Pendidikan	6,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,76
17	Jasa Lainnya	8,69
	Jumlah	**4,42**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

PDRB Perkapita juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Perkembangan PDRB perkapita Harga Berlaku tahun 2018 s/d 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel : 1.28
Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Di Kota Subulussalam Tahun 2018-2020

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)
2018	20,23
2019	21,21
2020**	21,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

8. Jumlah Kecamatan dan Desa di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 82 Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel : 1.29
Kecamatan dan Desa di Kota Subulussalam

NO	KECAMATAN	DESA	KODE DESA
1	*2*	*3*	*4*
1	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM	11.75.01.2001
2	SIMPANG KIRI	PEGAYO	11.75.01.2002
3	SIMPANG KIRI	SIKELONDANG	11.75.01.2003
4	SIMPANG KIRI	BULUH DORI	11.75.01.2004
5	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM UTARA	11.75.01.2005
6	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM SELATAN	11.75.01.2006
7	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM BARAT	11.75.01.2007
8	SIMPANG KIRI	SUKA MAKMUR	11.75.01.2008
9	SIMPANG KIRI	TANGGA BESI	11.75.01.2009
10	SIMPANG KIRI	KUTA CEPU	11.75.01.2010

11	SIMPANG KIRI	PASAR PANJANG	11.75.01.2011
12	SIMPANG KIRI	MUKTI MAKMUR	11.75.01.2012
13	SIMPANG KIRI	LAE ORAM	11.75.01.2013
14	SIMPANG KIRI	MAKMUR JAYA	11.75.01.2014
15	SIMPANG KIRI	BELEGEN MULIA	11.75.01.2015
16	SIMPANG KIRI	DANAU TRAS	11.75.01.2016
17	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM TIMUR	11.75.01.2017
18	PENANGGALAN	PENANGGALAN	11.75.02.2001
19	PENANGGALAN	CEPU	11.75.02.2002
20	PENANGGALAN	KUTA TENGAH	11.75.02.2003
21	PENANGGALAN	KAMPUNG BARU	11.75.02.2004
22	PENANGGALAN	SIKELANG	11.75.02.2005
23	PENANGGALAN	PENUNTUNGAN	11.75.02.2006
24	PENANGGALAN	JONTOR	11.75.02.2007

25	PENANGGALAN	LAE MOTONG	11.75.02.2008
26	PENANGGALAN	LAE IKAN	11.75.02.2009
27	PENANGGALAN	LAE BERSIH	11.75.02.2010
28	PENANGGALAN	DASAN RAJA	11.75.02.2011
29	PENANGGALAN	PENANGGALAN TIMUR	11.75.02.2012
30	PENANGGALAN	PENANGGALAN BARAT	11.75.02.2013
31	RUNDENG	PASAR RUNDENG	11.75.03.2001
32	RUNDENG	DAH	11.75.03.2002
33	RUNDENG	OBOH	11.75.03.2003
34	RUNDENG	SEPADAN	11.75.03.2004
35	RUNDENG	SIBUASAN	11.75.03.2005
36	RUNDENG	BINANGA	11.75.03.2006
37	RUNDENG	KUTA BERINGIN	11.75.03.2007
38	RUNDENG	MUARA BATU BATU	11.75.03.2008
39	RUNDENG	SIPERKAS	11.75.03.2009

40	RUNDENG	LAE MATE	11.75.03.2010
41	RUNDENG	SIBUNGKE	11.75.03.2011
42	RUNDENG	HARAPAN BARU	11.75.03.2012
43	RUNDENG	TELADAN BARU	11.75.03.2013
44	RUNDENG	BELUKUR MAKMUR	11.75.03.2014
45	RUNDENG	KAMPUNG BADAR	11.75.03.2015
46	RUNDENG	LAE PEMUALAN	11.75.03.2016
47	RUNDENG	PANGLIMA SAMAN	11.75.03.2017
48	RUNDENG	SUAK JAMPAK	11.75.03.2018
49	RUNDENG	GERUGUH	11.75.03.2019
50	RUNDENG	MANDILAM	11.75.03.2020
51	RUNDENG	TUALANG	11.75.03.2021

52	RUNDENG	KUALA KEPENG	11.75.03.2022
53	RUNDENG	TANAH TUMBUH	11.75.03.2023
54	SULTAN DAULAT	PASIR BELO	11.75.04.2001
55	SULTAN DAULAT	BAWAN	11.75.04.2002
56	SULTAN DAULAT	SIGRUN	11.75.04.2003
57	SULTAN DAULAT	JABI-JABI	11.75.04.2004
58	SULTAN DAULAT	LAE SIMOLAP	11.75.04.2005
59	SULTAN DAULAT	LAE LANGGE	11.75.04.2006
60	SULTAN DAULAT	SUKA MAJU	11.75.04.2007
61	SULTAN DAULAT	GUNUNG BAKTI	11.75.04.2008
62	SULTAN DAULAT	JAMBI BARU	11.75.04.2009
63	SULTAN DAULAT	PULO KEDEP	11.75.04.2010

64	SULTAN DAULAT	PULO BELEN	11.75.04.2011
65	SULTAN DAULAT	SINGGERSING	11.75.04.2012
66	SULTAN DAULAT	NAMO BUAYA	11.75.04.2013
67	SULTAN DAULAT	CIPAR PARE	11.75.04.2014
68	SULTAN DAULAT	BUNGA TANJUNG	11.75.04.2015
69	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI TIMUR	11.75.04.2016
70	SULTAN DAULAT	DARUL MAKMUR	11.75.04.2018
71	SULTAN DAULAT	JABI-JABI BARAT	11.75.04.2019
72	SULTAN DAULAT	BATU NAPAL	11.75.04.2020
73	LONGKIB	LONGKIB	11.75.05.2001
74	LONGKIB	SEPANG	11.75.05.2002
75	LONGKIB	PANJI	11.75.05.2003
76	LONGKIB	LAE SAGA	11.75.05.2004

77	LONGKIB	SIKERABANG	11.75.05.2005
78	LONGKIB	RANTAU PANJANG	11.75.05.2006
79	LONGKIB	BUKIT ALIM	11.75.05.2007
80	LONGKIB	DARUL AMAN	11.75.05.2008
81	LONGKIB	BANGUN SARI	11.75.05.2009
82	LONGKIB	DARUSSALAM	11.75.05.2010

Sumber Bagian Pemerintahan Setdako Subulussalam

9. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Tabel : 1.30
SKPK di Kota Subulussalam

NO.	SKPK
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Pangan
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika

15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
20.	Dinas Pertanahan
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
24	Kecamatan Simpang Kiri
25	Kecamatan Penanggalan
26	Kecamatan Rundeng
27	Kecamatan Longkib
28	Kecamatan Sultan Daulat
29.	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
31	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
32	Sekretariat Majelis Adat Aceh
33	Sekretariat Baitul Mal
34	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
35	Inspektorat
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
38	BKPSDM
39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Berikut kita lihat jumlah PNS di Kota Subulussalam pada tahun 2020 :

Tabel 1.31
Jumlah PNS di Kota Subulussalam Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	351	714	1.065
Fungsional Umum	356	269	625
Struktural	261	144	105
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	157	106	263
Eselon III	91	38	129
Eselon II	13	-	13
Eselon I	-	-	-
Jumlah	968	1.127	2.095

Sumber : BKPSDM Kota Subulussalam 2020

C. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Analisis isu-isu strategis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menetukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

1. **Bidang Pemerintahan Umum**
   a. **Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Dasar.**
   b. **Integrasi Perencanaan dan Pelaporan.**
   c. **Kinerja Pengelolaan Keuangan.**
   d. **Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi**
   e. **Penyusunan, Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah.**
   f. **Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan.**
   g. **Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan**
2. **Bidang Sosial dan Budaya**
   a. **Permasalahan Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.**
   b. **Permasalahan Kesehatan.**

c. **Permasalahan Sosial, Kependudukan, Kearsipan, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

3. **Bidang Infrastruktur**
   a. **Masih terdapatnya perumahan tidak layak huni.**
   b. **Minimnya ketersediaan air bersih.**
   c. **Masih rendahnya panjang jalan dalam kondisi baik.**
   d. **Konektifitas jaringan jalan belum optimal.**
   e. **Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas transportasi untuk mendukung daya saing wilayah.**
   f. **Ketersedian sarana prasarana dasar permukiman yang belum memadai.**
   g. **Ketergantungan ketersediaan listrik dari daerah Sumatera Utara.**
   h. **Masih rendahnya kondisi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.**
   i. **Masih minimnya sarana dan prasarana dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana.**
   j. **Masih adanya pelaku usaha dan masyarakat yang kurang taat terhadap pemanfaatan ruang.**
   k. **Belum adanya dokumen turunan RTRW yang ditetapkan.**
   l. **Belum semua bangunan memiliki IMB.**
   m. **Belum optimalnya layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi dan telekomunikasi yang cepat dana man.**
   n. **Belum meratanya akses internet untuk masyrakat.**
   o. **Belum adanya pelembagaan pengelolaan persampahan kota menuju konsep zero waste.**

4. **Bidang Ekonomi**
   a. **Pertumbuhan ekonomi yang cendrung stagnan.**
   b. **Lambatnya penurunan angka kemiskinan.**
   c. **Masih tingginya angka pengangguran.**
   d. **Masih rendahnya pengelolaan usaha ekonomi kecil dan menengah.**
   e. **Belum optimalnya produksi pertanian dan kehutanan.**
   f. **Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan.**
   g. **Belum maksimalnya pengelolaan destinasi wisata.**
   h. **Belum maksimalnya pemanfaatan taman hutan rakyat.**
   i. **Masih rendahnya pendapatan asli daerah.**

j. **Belum selesainya penyusunan rencana Rencana Induk Pengembangan Periwisata (RIPP) Kota Subulussalam.**
k. **Sebagai panduan pembangunan pariwisata secara terpadu yang menyangkut aspek social dan ekonomi serta bersifat.**
l. **Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga belum dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar.**
m. **Sarana dan prasarana BLK belum memadai.**
n. **Kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja.**
o. **Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.**
p. **Pengembangan kawasan untuk investor dan status lahan masih menjadi kendala.**

5. **Bidang Keistimewaan Aceh**
   a. **Permasalahan terkait pendidikan dayah/pesantren di Kota Subulussalam adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan dayah/pesantren, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas maupun pemberdayaan santri serta kelembagaan.**
   b. **Materi syariat islam yang diselenggarakan di semua jenjang sekolah umum belum berdampak pada pendidikan karakter.**
   c. **Permasalahan dalam kehidupan adat adalah belum optimalnya upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat islam.**
   d. **Masih kurangnya kebersamaan ulama dan umara mengakibatkan permasalahan dalam mengoptimalkan peran ulama dalam perumusan dan penetapan serta pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam.**
   e. **Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah.**
   f. **Belum optimalnya pelaksanaan syariat islam.**

D. VISI DAN MISI

1. V i s i

Visi Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Subulussalam 2019-2024 adalah :

" KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI"

Penjelasan Visi Kota Subulussalam :

Kota Subulussalam Menjadi Daerah Yang **Sejahtera**, dalam hal ini terkandung cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pemenuhan pelayanan infrastruktur masyarakat yang terutama di pedesaan sehingga masyarakat yang berada dalam lingkungan Kota Subulussalam dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu juga memuat program-program peningkatan kualitas dan mutu pendidikan baik dalam penguatan suprastruktur maupun infrastruktur dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Subulussalam serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan gratis.

Kota Subulussalam Menjadi Daerah Yang **Islami**, dalam visi ini terkandung cita-cita dan keinginan mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang Islami dengan menjalankan syari'at Islam secara khaffah, untuk mencapai keinginan tersebut akan dikembangkan pendidikan keislaman baik formal dan non formal serta menumbuhkembangkankan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang bernuansa islami dalam kehidupan masyarakat.

2. M i s i

Misi merupakan upaya umum untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Subulussalam. Misi Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 adalah:

a. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas.

Maksud dari misi ini adalah upaya yang akan dilakukan di bidang pendidikan yaitu berusaha untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Subulussalam. Untuk mencapai keinginan tersebut maka akan ditempuh dengan cara meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, baik peningkatan pembangunan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru serta memenuhi peralatan yang menunjang kegiatan belajar agar terwujudnya kenyamanan dalam proses

belajar dan mengajar. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar yang professional melalui kerjasama dengan universitas terkemuka untuk pemenuhan tenaga guru disetiap jenjang sekolah atau sederajat. Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar serta memberikan beasiswa disemua jenjang pendidikan.

b. **Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas.**

Maksud dari misi ini adalah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat. Mewujudkan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di semua pusat pelayanan kesehatan mulai dari RSUD sampai dengan Posyandu yang indah dan nyaman. Penambahan tenaga dokter spesialis dengan cara melakukan kerjasama atau kontrak kerja serta merekrut CPNS khusus farmasi bagi dokter spesialis. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan agar memeilki kompetensi yang baik. Dalam memenuhi kekurangan tenaga medis akan dilakukan kerjasama dengan universitas terkemuka untuk menempatkan tenaga-tenaga dokter muda yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendharma baktikan tenaganya di Kota Subulussalam. Memberikan insentif atau tambahan khusus untuk para tenaga kesehatan yang berada di desa-desa terpencil yang besarannya setara dengan tunjangan jabatan pejabat structural eselon III.a

c. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat.**

Maksud dari misi ini adalah upaya dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar bagi kepentingan masyarakat yang akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian daerah. Sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas dalam hal ini adalah sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, serta perdagangan. Pembangunaan sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), diprioritaskan untuk membuka akses-akses jaringan jalan yang menuju ke setiap desa dan antar kecamatan. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, di prioritaskan pembangunan perumahan rakyat khususnya rumah-rumah kaum dhuafa dan masyarakat miskin dipadukan dengan pembuatan jalan-jalan lingkungan, drainase, kebutuhan air bersih, pengelolaan persampahan agar terwujudnya kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat didukung oleh pembangunan prasarana jalan-jalan produksi

perkebunan masyarakat. Tujuan dari pembangunan infrastruktur selain dari untuk kebermanfaatan bagi masyarakat juga ingin menjadikan Kota Subulussalam sebagai pusat perdagangan (centered irode) terutama di wilayah pantai barat selatan aceh, melalui pembangunan pasar induk dan distributor pergudangan, membangun pertokoan semi permanen disepanjang jalan barat selatan Aceh menuju Sumatera Utara yang berfungsi sebagai tempat persinggahan mobil-mobil angkutan yang nantinya memiliki fungsi ganda sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat dalam bidang usaha perdagangan. Khusus dalam rangka pembangunan sarana kelistrikan akan mengupayakan masuknya investor pembangkit listrik yang berbasis PLTMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro) maupun PLTA.

d. **Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik.**

   Maksud Misi ke empat ini adalah mengupayakan mensejahterakan masyarakat di wilayah Kota Subulussalam dengan memprioritaskan Komoditi Unggulan yang memilki nilai ekonomis dan nilai pasar yang baik. Dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan atau kesejahteraan masyarakat maka akan diprioritaskan pembangunan perkebunan rakyat bagi masyarakat yang tergolong kategori miskin (golongan ekonomi lemah) ± 1 Ha/ kepala keluarga dengan komoditi berupa kelapa sawit dan karet. Secara berkelanjutan pembangunan perkebunan rakyat terus dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada petani mulai dari penanaman sampai dengan berproduksi.

e. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Desa secara Terpadu.**

   Maksud misi ke lima ini adalah upaya dalam memningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dan desa di lingkungan Kota Subulussalam. Menjadikan pemerintahan desa dapat menjadi desa swasembada. Dalam lima tahun kedepan pemerintah Kota Subulussalam akan mengupayakan dan memfungsikan kantor desa yang ada di wilayah Kota Subulussalam. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kota Subulussalam baik peningkatan kualitas aparatur, kemampuan pengelolaan keuangan daerah maupun penataan organisasi dan manajemen pemerintahan.

f. **Mewujudkan penerapan Syariat Islam malalui penguatan kembali sistem sosial yang berbasis Islam dalam kehidupan bermasyarakat.**

Maksud dari misi ini adalah upaya dalam meningkatkan penerapan syariat islam secara kaffah di lingkungan Kota Subulussalam. Untuk dapat berjalan dengan baik dan tegaknya syariat islam ini diperlukan keterlibatan ulama, da'i-da'I, organisasi-organisasi islam dan masyarakat secara umum. Pembinaan keislaman bagi masyarakat akan dilakukan dengan cara pendekatan syar-syar islam seperti wajib membaca al-qur'an selesai maghrib serta shalat subuh bagi aparatur sipil negara, membangun akhlakul karimah bagi generasi muda. Dalam rangka menumbuhkembangkan kepedulian social di masyarakat maka akan dikembangkan baitul mal dengan membentuk cabang-cabang baitul mal di setiap kecamatan dan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran zakat, infaq dan sadaqah.

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi Pembangunan Kota Subulussalam adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan disetiap tingkatan.
2. Pembangunan sekolah dan ruang kelas baru di setiap tingkatan.
3. Pembuatan taman kreasi sekolah.
4. Pembangunan rumah komisi dan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
5. Memfasilitasi terwujudnya perguruan tinggi di Kota Subulussalam.
6. Penghargaan terhadap guru berprestasi ditambah beasiswa pendidikan S-I dan S-II.
7. Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pengajar.
8. Merekrut tenaga pengajar yang berkualitas melalui kerjasama dengan Universitas terkemuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang professional dan berkualitas.
9. Peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan.
10. Pemeriksaan dan pengobatan gratis di tiap Kampong
11. Posyandu keliling.
12. Rekrutmen dan penempatan dokter umum dan dokter spesialis.
13. Menyediakan rumah singgah dan bantuan bagi pendamping pasien rujukan.

14. Menyiapkan lembaga rehabilitasi bagi korban narkoba.
15. Kartu Subulussalam Sehat.
16. Pembangunan infrastruktur unit pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
17. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil.
18. Pembangunan jalan yang terintegrasi antar Kecamatan, jalan menuju pemukiman.
19. Pembangunan jaringan air bersih keseluruh wilayah permukiman.
20. Penyelesaian konflik sengketa tanah.
21. Reaksi cepat tanggap darurat penanggulangan bencana alam.
22. Membangun Kampong ternak dan petani.
23. Memberikan pelatihan dan meningkatkan bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM.
24. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Blai Latihan Kerja (BLK).
25. Mendatangkan tenaga ahli yang kompeten sebagai instruktur pelatih di BLK.
26. Mendatangkan investor dalam pengelolaan produk turunan kelapa sawit.
27. Memberikan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi seperti pelatihan kerajinan tangan, pelatihan bisnis kuliner dll.
28. Menyediakan ruang public dengan nama “Walikota Menyapa”.
29. Membangun Sistem Informasi Subulussalam Terpadu (SISDU).
30. Mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan dari sumber-sumber yang baru.
31. Menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki inovasi dan sejahterah.
32. Penguatan pengamalan Al-Qur’an dan Al-Hadist dalam kehidupan bermasyarakat.
33. Penyelenggaraan pendidikan hafiz Al-Qur’an.
34. Standarisasi kualitas pendidikan dayah.
35. Peningkatan intensitas Syiar islam di daerah perbatasan.
36. Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang islami.
37. Pembangunan infrastruktur pendukung budaya dan pariwisata yang islami.
38. Pelaksanaan kegiatan seni budaya dan adat istiadat.
39. Peningkatan kesejahteraan PMKS dan disibilitas.
40. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Subulussalam adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki system dan tatakelola pendidikan di Kota Subulussalam.
2. Menyediakan ruangan kelas baru untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar.
3. Menyediakan taman pendidikan.
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan.
5. Meningkatkan dan memfasilitasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
6. Mengoptimalkan penyelesaian konflik tenurial.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan.
8. Meningkatkan penerapan cara budidaya yang baik dan benar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
9. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi.
10. Meningkatkan pelayanan pendidikan islami dan pengarusutamakan syariat islam dalam pembangunan.
11. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pelaksanaan syariat islam.
12. Mengimplementasikan standar kualitas pendidikan dayah.
13. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Da'I perbatasan.
14. Mendorong tersedianya infrastruktur keagamaan yang islami.
15. Meningkatkan fasilitas infrastruktur pendukung budaya dan pariwisata yang islami.
16. Memajukan dan melestarikan seni dan budaya local yang islami.
17. Meningkatkan keterampilan PMKS.
18. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pekerja social.
19. Pemenuhan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan social.
20. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS.
21. Pemenuhan kebutuhan kaum difabel.
22. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam pembangunan.
23. Pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan.

F. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Subulussalam, 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan misi pembangunan Aceh dan RPJP Kota Subulussalam pada Tahun 2015-2035. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Subulussalam disusun berdasarkan tema untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

1. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020
   Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema "mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur yang terintegrasi".
2. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021
   Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema "Pembangunan Infrastrutur yang terintegrasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas".
3. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022
   Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu "pemantapan sumberdaya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing".
4. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023
   Pembangunan pada tahun 2023 diselenggarakan dengan tema yaitu "mengembangkan industry pengolahan dan membuka kesempatan kerja kepada sumberdaya local yang berkualitas".
5. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024
   Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan tema yaitu "mewujudkan Kota Subulussalam yang berdaya saing dalam kemandirian ekonomi yang inklusif".

G. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah dan lingkungan hidup.
4. Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan penguasaan IPTEK.
5. Memperkuat Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Islami dan Berbudaya.

H. PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

Selain dari Tema dan Prioritas Pembangunan, Pemerintah Kota Subulussalam memiliki 10 Program unggulan yang tertuang dalam visi misi Walikota:

1. Masyarakat Islami (Satu Hafiz Satu Kampong).
2. Kreatif dan Sejahtera (Penanaman Dua Pohon Untuk Satu Rumah).
3. Ketahanan Pangan Produk Unggulan (Jagung, Talas, Sawit).
4. Lingkungan Sehat (Stunting, Kampung Iklim dan Sanitasi).
5. Kota Layak Anak.
6. Pembangunan Perguruan Tinggi.
7. Pembangunan Ekowisata.
8. Smart City Subulussalam.
9. Walikota Menyapa (Berkantor di Kecamatan).
10. SDM Generasi Muda (Satu Kampong Satu Sarjana).

I. PENJABARAN APBK SUBULUSSALAM TAHUN 2020

Kebijakan Pengelolaan keuangan selalu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel. Disamping itu pengelolaan keuangan juga disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
b. Pengelolaan Belanja Daerah
c. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat, dan provinsi serta lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2020 diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Kota Subulussalam mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup banyak, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sebagian berada pada kawasan konsevasi yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini tentu saja berimbas kontribusinya pada pendapatan asli daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membatasi objek pajak untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk penggalian sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, kecuali daerah diberi peluang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, baik yang berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2020 realisasi PAD Kota Subulussalam adalah sebesar Rp.55.780.164.989,02 dari target Rp.67.082.889.328,- atau 83,12%. Adapun rincian target dan realisasi PAD Kota Subulussalam dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.32
Target dan Realisasi PAD Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pajak Daerah	4.270.000.000,00	4.945.208.312,45	115,81
2.	Retribusi Daerah	4.377.268.904,00	1.697.800.744,00	38,78
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	745.620.424,00	785.087.399,00	105,29
4.	Pendapatan Zakat	5.000.000.000,00	4.707.868.233,75	94,15
5.	Lain-lain PAD yang sah	52.690.000.000,00	43.644.200.299,82	82,83
	Jumlah	**67.082.889.328,00**	**55.780.164.989,02**	**83,12**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 83,12%. Sumber pendapatan yang paling tinggi realisasinya adalah dari Hasil pendapatan pajak daerah dengan realisasi 115,81% yang terdiri dari pemungutan pajak daerah dan sumber pendapatan yang paling besar konstribusinya terhadap PAD yaitu Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 43.644.200.299,82 yang terdiri dari Penerimaan jasa giro, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Lain-lain PAD yang sah lainnya, Hasil dari pengelolaan dana bergulir dan Pendapatan dana JKN.

b. Dana Perimbangan

Pada tahun 2020 Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.397.426.935.926,- dengan realisasi sebesar Rp.392.235.153.648,- atau 98,69% seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.33
Target Dan Realisasi Dana Perimbangan
Kota Subulussalam Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	16.731.332.926,00	13.756.089.991,00	82,21
2.	Dana Alokasi Umum	319.242.559.000,00	318.039.401.000,00	99,62
3.	Dana Alokasi Khusus	61.453.004.000,00	60.439.662.657,00	98,35
	JUMLAH	397.426.935.926,00	392.235.153.648,00	98,69

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan dari Dana Perimbangan terealisasi sebesar 98,69%. Realisasi penerimaan yang paling tinggi berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 318.039.401.000,- .

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2020 penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp.156.470.065.220,- dengan anggaran sebesar Rp.264.019.495.748 atau 59,26% dengan perincian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.34
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Hibah	14.772.445.000,00	1.739.826.000,00	11,77
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.114.818.540,00	24.291.409.666,00	86,40
3.	Dana Penyesuaian	21.949.159.683,00	25.556.729.000,00	116,43
4.	Dana Otonomi Khusus	78.740.538.525,00	54.882.100.554,00	69,69
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
6.	Pendapatan Lainnya	70.442.534.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**264.019.495.748,00**	**156.470.065.220,00**	**59,26**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan lain-lain yang sah tahun 2020 sebesar 59,26%, melebihi target yang ditetapkan.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun yang termasuk jenis belanja tidak langsung adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, bunga subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang telah ditetapkan. Adapun yang termasuk belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja daerah tahun 2020 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan Belanja diarahkan dalam bentuk :

a. Pemenuhan belanja pegawai dan mengantisipasi kenaikan gaji PNS tahun 2020.
b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
c. Penganggaran untuk mendukung program nasional *pro job, pro poor, pro growth dan pro environment.*
d. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.
e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
f. Mempercepat capaian target-target program dan kegiatan yang merupakan agenda nasional.
g. Operasional SKPK untuk menampung tupoksi masing-masing.

Penetapan kebijakan Belanja Daerah tetap mengacu kepada :

a. Urusan Pemerintahan Daerah

1) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
2) Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

b. Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK)

Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) adalah setiap SKPK dilingkup Pemerintah Kota Subulussalam, membuat program dan kegiatan harus mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan daerah dan diprioritaskan berdasarkan sasaran dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Kebijakan umum pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2020, sebagian besar masih berasal dari dana kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2019.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pada tahun 2020 Belanja dianggarkan pada APBK adalah sebesar Rp. 787.825.651.293,06 dengan realisasi sebesar Rp. 604.583.519.841,85,- atau 76,74% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 330.322.303.156,06 dengan realisasi sebesar Rp. 241.534.784.580,- atau 73,12% terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 168.229.125.115,06 dengan realisasi sebesar Rp. 163.629.794.616,- atau 97,26% yang terdiri dari :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan dianngarkan sebesar Rp.149.830.155.115,06 dengan realisasi sebesar Rp.148.852.657.616,-

b) Belanja Tambahan penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp.16.210.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.734.117.000,-

c) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp.1.942.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.797.000.000,-

d) Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 246.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp.200.860.000,-

2) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 10.882.853.500,- dengan realisasi sebesar Rp.9.578.766.000,- atau 88,01% dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan realisasi sebesar Rp.9.108.766.000,-
b) Belanja Hibah Dana Bos dengan realisasi sebesar Rp.295.000.000,-
c) Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Rp.175.000.000,-

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.8.215.655.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.260.515.800,- atau 76,20% terdiri dari bantuan sosial kepada masyarakat.

4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa.

Dengan anggaran sebesar Rp.125.899.742.815,- dengan realisasi sebesar Rp.45.428.098.726,- atau 36,08% dengan rincian sebagai berikut :

a) Tranfer Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan realisasi sebesar Rp.42.879.214.285,-
b) Tranfer Bantuan Kepada Partai Politik dengan realisasi sebesar Rp.326.384.800,-
c) Tranfer Bantuan Keuangan ke Mukim dengan realisasi sebesar Rp.1.072.000.000,-
d) Tranfer Dana Otonomi Khusus dengan realisasi sebesar Rp.95.395.500,-
e) Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dengan realisasi sebesar Rp.1.055.104.141,-

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.17.094.926.726,- dengan realisasi sebesar Rp.16.637.609.438,- atau 97,32%.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.457.503.348.137,00 dengan realisasi sebesar Rp.363.048.735.261,85 atau 79,35% terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.72.029.571.166,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.834.841.280,35 atau 96,95%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.190.412.187.654,- dengan realisasi sebesar Rp.156.570.889.199,01,- atau 82,22%.

3) Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.195.061.589.317,- dengan realisasi sebesar Rp.136.643.004.782,49 atau 70,05%.

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.60.316.330.291,06 dengan realisasi sebesar Rp.10.763.885.967,10 atau 17,84% yang merupakan penggunaan silpa tahun sebelumnya.

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%.

Selanjutnya Alokasi Belanja pada masing-masing SKPK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.35

ALOKASI BELANJA TAHUN 2020

No	SKPK	Anggaran Belanja TA 2020	Realisasi TA 2020	%
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**132.973.498.791,06**	**122.729.574.919,01**	92,29
	a. Belanja Tidak Langsung	76.834.965.140,06	75.026.228.603,00	97,64
	- Belanja Pegawai	76.834.965.140,06	75.026.228.603,00	97,64
	b. Belanja Langsung	56.138.533.651,00	47.703.346.316,01	84,97
	- Belanja Pegawai	7.195.940.000,00	7.161.033.950,00	99,51
	- Belanja Barang Jasa	19.472.571.399,00	21.199.587.735,01	108,86
	- Belanja Modal	29.470.022.252,00	19.342.724.631,00	65,63

2	**Dinas Kesehatan**	**45.920.302.012,00**	**38.053.073.468,00**	**82,86**
	a. Belanja Tidak Langsung	18.074.996.453,00	17.530.231.890,00	96,98
	- Belanja Pegawai	18.074.996.453,00	17.530.231.890,00	96,98
	b. Belanja Langsung	27.845.305.559,00	20.522.841.578,00	73,70
	- Belanja Pegawai	1.894.275.000,00	1.671.949.000,00	88,26
	- Belanja Barang Jasa	19.091.668.500,00	15.247.814.718,00	79,86
	- Belanja Modal	6.859.362.059,00	3.603.077.860,00	52,52
3	**RSUD**	**66.647.801.690,00**	**58.623.737.677,35**	**87,96**
	a. Belanja Tidak Langsung	4.785.863.402,00	4.680.601.337,00	97,80
	- Belanja Pegawai	4.785.863.402,00	4.680.601.337,00	97,80
	b. Belanja Langsung	61.861.938.288,00	53.943.136.340,35	87,19
	- Belanja Pegawai	28.784.745.000,00	27.442.685.001,35	95,33
	- Belanja Barang Jasa	19.344.358.060,00	16.390.828.335,00	84,73
	- Belanja Modal	13.732.835.228,00	10.109.623.004,00	73,61
4	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**107.903.840.179,00**	**69.085.997.235,00**	64,02
	a. Belanja Tidak Langsung	1.849.971.238,00	1.788.475.452,00	96,67
	- Belanja Pegawai	1.849.971.238,00	1.788.475.452,00	96,67
	b. Belanja Langsung	106.053.868.941,00	67.297.521.783,00	63,45
	- Belanja Pegawai	1.413.141.000,00	1.363.741.000,00	96,50
	- Belanja Barang Jasa	26.083.342.797,00	13.204.283.716,00	50,62
	- Belanja Modal	78.557.385.144,00	52.729.497.067,00	67,12
5	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**5.435.001.716,00**	**5.384.876.326,00**	**99,07**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.235.024.220,00	1.191.092.426,00	96,44
	- Belanja Pegawai	1.235.024.220,00	1.191.092.426,00	96,44
	b. Belanja Langsung	4.199.977.496,00	4.193.783.900,00	99,85
	- Belanja Pegawai	2.539.024.000,00	2.538.024.000,00	99,96
	- Belanja Barang Jasa	1.640.532.246,00	1.635.359.900,00	99,68
	- Belanja Modal	20.421.250,00	20.400.000,00	99,89
6.	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**	**3.792.040.946,00**	**3.740.849.941,00**	**98,65**
	a. Belanja Tidak Langsung	767.892.739,00	736.346.041,00	95,98
	- Belanja Pegawai	767.892.739,00	736.346.041,00	95,89
	b. Belanja Langsung	3.024.148.207,00	3.004.503.900,00	99,35
	- Belanja Pegawai	2.356.650.000,00	2.356.650.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	651.498.207,00	631.853.900,00	96,98
	- Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00

7.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**3.394.984.593,00**	**2.765.155.746,00**	**81,44**
	a. Belanja Tidak Langsung	596.794.593,00	577.308.846,00	96,73
	- Belanja Pegawai	596.794.593,00	577.308.846,00	96,73
	b. Belanja Langsung	2.798.190.000,00	2.187.846.900,00	78,18
	- Belanja Pegawai	393.850.000	393.850.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	1.334.479.900,00	1.333.167.900,00	99,90
	- Belanja Modal	1.069.860.100,00	460.829.000,00	43,07
8.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**15.543.518.714,00**	**9.889.256.502,49**	**63,62**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.197.307.465,00	1.157.622.149,00	96,68
	- Belanja Pegawai	1.197.307.465,00	1.157.622.149,00	96,68
	b. Belanja Langsung	14.346.211.249,00	8.731.634.353,49	60,86
	- Belanja Pegawai	1.244.845.000,00	1.162.775.000,00	93,40
	- Belanja Barang Jasa	2.915.491.249,00	2.470.177.992,00	84,72
	- Belanja Modal	10.185.875.000,00	5.098.681.361,49	50,05
9.	**Dinas Sosial**	**6.271.630.637,00**	**4.603.666.605,00**	**73,40**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.252.589.887,00	1.197.597.055,00	95,60
	- Belanja Pegawai	1.252.589.887,00	1.197.597.055,00	95,60
	b. Belanja Langsung	5.019.040.750,00	3.406.069.550,00	67,86
	- Belanja Pegawai	542.887.500,00	484.320.000,00	89,21
	- Belanja Barang Jasa	4.260.033.250,00	2.710.669.550,00	63,63
	- Belanja Modal	216.120.000,00	211.080.000,00	97,66
10.	**Dinas Pangan**	**1.620.188.437,00**	**1.557.104.222,00**	**96,10**
	a. Belanja Tidak Langsung	897.642.937,00	862.932.722,00	96,13
	- Belanja Pegawai	897.642.937,00	862.932.722,00	96,13
	b. Belanja Langsung	722.545.500,00	694.171.500,00	96,07
	- Belanja Pegawai	223.050.000,00	221.850.000,00	99,46
	- Belanja Barang Jasa	487.995.500,00	460.821.500,00	94,43
	- Belanja Modal	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
11.	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2.604.999.561,00**	**2.554.695.239,00**	**98,06**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.234.523.061,00	1.192.004.739,00	96,55
	- Belanja Pegawai	1.234.523.061,00	1.192.004.739,00	96,55
	b. Belanja Langsung	1.370.476.500,00	1.362.690.500,00	99,43
	- Belanja Pegawai	558.900.000,00	557.300.000,00	99,71
	- Belanja Barang Jasa	762.796.500,00	756.610.500,00	99,18
	- Belanja Modal	48.780.000,00	48.780.000,00	100,00

12	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong**	**2.546.326.151,00**	**2.474.106.618,00**	**97,16**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.120.522.151,00	1.079.306.618,00	96,32
	- Belanja Pegawai	1.120.522.151,00	1.079.306.618,00	96,32
	b. Belanja Langsung	1.425.804.000,00	1.394.800.000,00	97,82
	- Belanja Pegawai	363.450.000,00	361.050.000,00	99,33
	- Belanja Barang Jasa	906.354.000,00	878.943.000,00	96,97
	- Belanja Modal	156.000.000,00	154.807.000,00	99,23
13	**Dinas Perhubungan**	**5.282.478.115,00**	**5.071.949.034,00**	**96,01**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.305.352.403,00	1.267.830.179,00	97,12
	- Belanja Pegawai	1.305.352.403,00	1.267.830.179,00	97,12
	b. Belanja Langsung	3.977.125.712,00	3.804.118.855,00	95,64
	- Belanja Pegawai	596.175.000,00	583.400.000,00	97,85
	- Belanja Barang Jasa	3.279.812.712,00	3.119.580.855,00	95,11
	- Belanja Modal	101.138.000,00	101.138.000,00	100,00
14	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**2.858.470.029,00**	**2.767.853.645.00**	**96,82**
	a. Belanja Tidak Langsung	976.305.509,00	940.447.075,00	96,32
	- Belanja Pegawai	976.305.509,00	940.447.075,00	96,32
	b. Belanja Langsung	1.882.164.520,00	1.827.406.570.00	97,09
	- Belanja Pegawai	446.400.000,00	446.400.000.00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	903.814.520,00	862.980.070.00	95,48
	- Belanja Modal	531.950.000,00	518.026.500,00	97,38
15.	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	**5.414.762.293,00**	**4.963.332.695,00**	**91,66**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.399.182.909,00	1.357.778.765,00	97,04
	- Belanja Pegawai	1.399.182.909,00	1.357.778.765,00	97,04
	b. Belanja Langsung	4.015.579.384,00	3.605.553.930,00	89,78
	- Belanja Pegawai	744.015.000.00	739.065.000,00	99,33
	- Belanja Barang Jasa	2.670.430.501,00	2.267.088.380,00	84,89
	- Belanja Modal	601.133.883,00	599.400.550,00	99,71
16	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**	**1.836.872.736,00**	**1.794.174.417,00**	**97,67**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.185.235.069,00	1.142.929.750.00	96,43
	- Belanja Pegawai	1.185.235.069,00	1.142.929.750.00	96,43
	b. Belanja Langsung	651.637.667,00	651.244.667.00	99,93

	- Belanja Pegawai	315.828.333.00	315.824.333.00	99,99
	- Belanja Barang Jasa	335.809.334.00	335.420.334.00	99,88
	- Belanja Modal	0.00	0.00	0,00
17.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**2.175.715.271,00**	**2.027.109.238,00**	**93,16**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.347.251.812,00	1.310.032.338,00	97,23
	- Belanja Pegawai	1.347.251.812,00	1.310.032.338,00	97,23
	b. Belanja Langsung	828.463.459,00	717.076.900,00	86,55
	- Belanja Pegawai	233.000.000,00	233.000.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	555.063.459,00	443.676.900,00	79,93
	- Belanja Modal	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00
18	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	**9.950.498.180,00**	**6.236.474.092,00**	**62,67**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.186.162.484,00	1.143.001.996,00	96,36
	- Belanja Pegawai	1.186.162.484,00	1.143.001.996,00	96,36
	b. Belanja Langsung	8.764.335.696,00	5.093.472.096,00	58,11
	- Belanja Pegawai	705.569.996,00	660.738.496,00	93,64
	- Belanja Barang Jasa	3.509.535.700,00	2.168.820.900,00	61,79
	- Belanja Modal	4.549.230.000,00	2.263.912.700,00	49,76
19	**Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan**	**48.208.296.004,00**	**40.360.255.879,00**	**83,72**
	a. Belanja Tidak Langsung	4.514.957.604,00	4.406.707.859,00	97,60
	- Belanja Pegawai	4.514.957.604,00	4.406.707.859,00	97,60
	b. Belanja Langsung	43.693.338.400,00	35.953.548.020,00	91,44
	- Belanja Pegawai	1.454.580.000,00	1.441.980.000,00	99,13
	- Belanja Barang Jasa	14.136.180.400,00	8.972.387.059,00	63,47
	- Belanja Modal	28.102.578.000,00	25.539.180.961,00	90,87
20.	**DPRK**	**7.336.685.573,00**	**7.323.950.095,00**	99,82
	a. Belanja Tidak Langsung	7.336.685.573,00	7.323.950.095,00	99,82
	- Belanja Pegawai	7.336.685.573,00	7.323.950.095,00	99,82
21	**Walikota dan Wakil Walikota**	**577.903.373,00**	**430.997.892,00**	**74,57**
	a. Belanja Tidak Langsung	577.903.373,00	430.997.892,00	**74,57**
	- Belanja Pegawai	577.903.373,00	430.997.892,00	**74,57**
22	**Sekretariat Daerah**	**39.251.419.510,00**	**35.442.912.425,00**	**90,29**
	a. Belanja Tidak Langsung	6.475.738.234,00	6.295.867.000,00	97,22
	- Belanja Pegawai	6.475.738.234,00	6.295.867.000,00	97,22
	b. Belanja Langsung	32.775.681.276,00	29.147.044.511,00	88,92

	- Belanja Pegawai	5.260.360.000,00	5.128.600.000,00	97,49
	- Belanja Barang Jasa	20.764.271.666,00	18.669.475.911,00	89,91
	- Belanja Modal	6.751.049.610,00	5.348.968.600,00	79,23
23	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota**	**10.919.320.201,00**	**10.076.168.781,00**	**92,27**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.541.750.884,00	1.472.395.981,00	95,50
	- Belanja Pegawai	1.541.750.884,00	1.472.395.981,00	95,50
	b. Belanja Langsung	9.377.569.317,00	8.603.772.800,00	91,74
	- Belanja Pegawai	2.293.085.837,00	2.289.269.000,00	99,83
	- Belanja Barang Jasa	6.555.228.480,00	5.923.217.800,00	90,35
	- Belanja Modal	529.255.000,00	391.286.000,00	73,93
24	**Kecamatan Simpang Kiri**	**2.597.043.510,00**	**2.549.982.738,00**	**98,18**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.752.171.829,00	1.705.843.738,00	97,35
	- Belanja Pegawai	1.752.171.829,00	1.705.843.738,00	97,35
	b. Belanja Langsung	844.871.681,00	844.139.000,00	99,91
	- Belanja Pegawai	282.550.000,00	282.550.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	489.821.681,00	489.089.000,00	99,85
	- Belanja Modal	72.500.000,00	72.500.000,00	100,00
25	**Kecamatan Penanggalan**	**2.042.414.195,00**	**1.990.295.450,00**	**97,44**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.418.739.195,00	1.372.220.450,00	96,72
	- Belanja Pegawai	1.418.739.195,00	1.372.220.450,00	96,72
	b. Belanja Langsung	623.675.000,00	618.075.000,00	99,10
	- Belanja Pegawai	217.600.000,00	214.800.000,00	98,71
	- Belanja Barang Jasa	320.075.000,00	317.275.000,00	99,12
	- Belanja Modal	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00
26	**Kecamatan Rundeng**	**2.308.928.358,00**	**2.263.252.542,00**	**98,02**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.582.765.358,00	1.538.013.542,00	97,17
	- Belanja Pegawai	1.582.765.358,00	1.538.013.542,00	97,17
	b. Belanja Langsung	726.163.000,00	725.239.000,00	99,87
	- Belanja Pegawai	160.132.500,00	160.130.500,00	99,99
	- Belanja Barang Jasa	330.030.500,00	329.930.500,00	99,96
	- Belanja Modal	236.000.000,00	235.178.000,00	99,65
27	**Kecamatan Longkib**	**1.341.054.707,00**	**1.316.877.771,00**	**98,19**
	a. Belanja Tidak Langsung	793.829.707,00	769.727.771,00	96,96
	- Belanja Pegawai	793.829.707,00	769.727.771,00	96,96

	b. Belanja Langsung	547.225,000,00	547.150.000,00	99,98
	- Belanja Pegawai	145.475.000,00	145.475.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	346.850.000,00	346.775.000,00	99,97
	- Belanja Modal	54.900.000,00	54.900.000,00	100,00
28	**Kecamatan Sultan Daulat**	**1.963.113.277,00**	**1.922.386.737,00**	**97,92**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.308.598.277,00	1.268.195.737,00	96,91
	- Belanja Pegawai	1.308.598.277,00	1.268.195.737,00	96,91
	b. Belanja Langsung	654.515.000,00	654.191.000,00	99,95
	- Belanja Pegawai	184.550.000,00	184.550.000,00	100.00
	- Belanja Barang Jasa	469.965.000,00	469.641.000,00	99,93
	- Belanja Modal	0,00	0,00	0,0
29.	**Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah**	**20.474.322.745,00**	**17.350.313.028,00**	**84,74**
	a. Belanja Tidak Langsung	937.223.081,00	898.316.364,00	95,84
	- Belanja Pegawai	937.223.081,00	898.316.364,00	95,84
	b. Belanja Langsung	19.537.099.664,00	16.451.996.664,00	84,20
	- Belanja Pegawai	1.334.610.500,00	1.334.610.500,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	18.160.589.164,00	15.075.486.164,00	83,01
	- Belanja Modal	41.900.000,00	41.900.000,00	100,00
30	**Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama**	**1.595.987.782,00**	**1.575.941.907,00**	**98,74**
	a. Belanja Tidak Langsung	407.519.532,00	393.166.831,00	96,47
	- Belanja Pegawai	407.519.532,00	393.166.831,00	96,47
	b. Belanja Langsung	1.188.468.250,00	1.182.775.076,00	99,52
	- Belanja Pegawai	651.500.000,00	651.500.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	518.218.250,00	512.525.076,00	98,90
	- Belanja Modal	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00
31	**Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah**	**1.741.769.617,00**	**1.698.076.993,00**	**97,49**
	a. Belanja Tidak Langsung	454.617.192,00	438.065.377,00	96,35
	- Belanja Pegawai	454.617.192,00	438.065.377,00	96,35
	b. Belanja Langsung	1.287.152.425,00	1.260.011.616,00	97,89
	- Belanja Pegawai	562.605.000,00	562.605.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	619.547.425,00	593.045.616,00	95,72
	- Belanja Modal	105.000.000,00	104.361.000,00	99,39

32	**Sekretariat Majelis Adat Aceh**	**1.420.867.344,00**	**1.399.833.751,00**	**98,51**
	a. Belanja Tidak Langsung	451.854.719,00	437.705.731,00	96,86
	- Belanja Pegawai	451.854.719,00	437.705.731,00	96,86
	b. Belanja Langsung	969.012.625,00	959.178.020,00	98,98
	- Belanja Pegawai	461.900.000,00	458.924.000,00	99,35
	- Belanja Barang Jasa	487.412.625,00	480.554.020,00	98,59
	- Belanja Modal	19.700.000,00	19.700.000,00	100,00
33	**Sekretariat Baitul Mal**	**6.226.952.696,00**	**6.108.515.270,00**	**98,09**
	a. Belanja Tidak Langsung	546.562.696,00	528.150.370,00	96,63
	- Belanja Pegawai	546.562.696,00	528.150.370,00	96,63
	b. Belanja Langsung	5.680.390.000,00	5.580.364.900,00	98,23
	- Belanja Pegawai	723.200.000,00	723.200.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	4.924.040.000,00	4.824.014.900,00	97,96
	- Belanja Modal	33.150.000,00	33.150.000,00	100,00
34	**Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI**	**605.455.723,00**	**587.131.456,00**	**96,97**
	a. Belanja Tidak Langsung	314.402.390,00	304.966.456,00	96,99
	- Belanja Pegawai	314.402.390,00	304.966.456,00	96,99
	b. Belanja Langsung	291.053.333,00	282.165.000,00	96,94
	- Belanja Pegawai	70.850.000,00	70.700.000,00	99,78
	- Belanja Barang Jasa	220.203.333,00	211.465.000,00	96,03
	- Belanja Modal	0,00	0,00	0.00
35	**Inspektorat**	**5.063.282.930,00**	**5.001.053.993,00**	**98,77**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.658.547.930,00	1.596.893.993,00	96,28
	- Belanja Pegawai	1.658.547.930,00	1.596.893.993,00	96,28
	b. Belanja Langsung	3.404.735.000,00	3.404.160.000,00	99,98
	- Belanja Pegawai	1.844.100.000,00	1.844.100.000,00	100,00
	- Belanja Barang Jasa	1.488.385.000,00	1.487.810.000,00	99,96
	- Belanja Modal	72.250.000,00	72.250.000,00	100,00
36	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**5.675.322.270,00**	**5.541.094.247,00**	**97,63**
	a. Belanja Tidak Langsung	2.409.666.937,00	2.345.224.247,00	97,32
	- Belanja Pegawai	2.409.666.937,00	2.345.224.247,00	97,32
	b. Belanja Langsung	3.265.655.333,00	3.195.870.000,00	97,86

	- Belanja Pegawai	669.565.000,00	649.765.000,00	97,04
	- Belanja Barang Jasa	2.570.090.333,00	2.520.105.000,00	98,05
	- Belanja Modal	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
37	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**18.757.253.731,00**	**18.276.802.227,00**	**97,43**
	a. Belanja Tidak Langsung	11.328.659.931,00	10.880.268.945,00	96,04
	- Belanja Pegawai	11.328.659.931,00	10.880.268.945,00	96,04
	b. Belanja Langsung	7.428.593.800,00	7.396.533.282,00	99,56
	- Belanja Pegawai	3.092.885.000,00	3.072.535.000,00	99,34
	- Belanja Barang dan Jasa	4.040.228.800,00	4.028.718.282,00	99,71
	- Belanja Modal	295.480.000,00	295.280.000,00	99,93
38	**BKPSDM**	**3.448.569.963,00**	**3.108.737.770,00**	**90,14**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.164.522.038,00	1.130.445.655,00	97,07
	- Belanja Pegawai	1.164.522.038,00	1.130.445.655,00	97,07
	b. Belanja Langsung	2.284.047.925,00	1.978.292.115,00	86,61
	- Belanja Pegawai	446.784.000,00	383.934.000,00	85,93
	- Belanja Barang Jasa	1.611.470.325,00	1.369.194.115,00	84,96
	- Belanja Modal	225.793.600,00	225.164.000,00	99,72
39	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**5.285.041.676,00**	**5.116.873.425,00**	**96,81**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.545.591.472,00	1.489.914.932,00	96,39
	- Belanja Pegawai	1.545.591.472,00	1.489.914.932,00	96,39
	b. Belanja Langsung	3.739.450.204,00	3.626.958.493,00	96,99
	- Belanja Pegawai	657.090.000,00	624.490.000,00	95,03
	- Belanja Barang Jasa	2.500.361.504,00	2.421.542.937,00	96,84
	- Belanja Modal	581.998.700,00	580.925.556,00	99,81
40	**Dinas Pertanahan**	**9.161.736.210,00**	**6.834.346.639,00**	**74,59**
	a. Belanja Tidak Langsung	876.623.710,00	845.585.838,00	96,45
	- Belanja Pegawai	876.623.710,00	845.585.838,00	96,45
	b. Belanja Langsung	8.285.112.500,00	5.988.760.801,00	72,28
	- Belanja Pegawai	430.210.000,00	427.960.000,00	99,47
	- Belanja Barang Jasa	615.527.500,00	393.865.700,00	63,98
	- Belanja Modal	7.239.375.000,00	5.166.935.101,00	71,37

41	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**7.556.801.806,00**	**6.079.741.242,00**	**80,45**
	a. Belanja Tidak Langsung	1.582.609.981,00	1.530.240.917,00	92,69
	- Belanja Pegawai	1.582.609.981,00	1.530.240.917,00	92,69
	b. Belanja Langsung	5.974.191.825,00	4.549.500.325,00	76,15
	- Belanja Pegawai	534.192.500,00	531.717.500,00	99,53
	- Belanja Barang Jasa	1.038.102.834,00	1.017.084.934,00	97,97
	- Belanja Modal	4.401.896.491,00	3.000.697.891,00	68,16

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam

2. Permasalahan dan solusi

Pada Umumnya pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO.

Capaian kinerja makro meruupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	64,46	64,93	1,01
2.	Angka Kemiskinan	14,56	14,46	0,99
3.	Angka Pembangunan			
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,420	1,967	0,45
5.	Pendapatan Perkapita	21,21	21,90	1,03
6.	Ketimpangan Pendapatan			

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

Capaian kinerja urusan pemerintahan meruupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT).

No.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus Persamaan	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	**URUSAN PENDIDIKAN**					
1.	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15		DINAS PENDIDIKAN	
2.	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah.	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah.	4.996		DINAS PENDIDIKAN	
3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			DINAS PENDIDIKAN	

4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan swasta)			DINAS PENDIDIKAN	
5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	196		DINAS PENDIDIKAN	
6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	173		DINAS PENDIDIKAN	
7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah.	120		DINAS PENDIDIKAN	
8.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi			DINAS PENDIDIKAN	

9.	Jumlah pserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Jumlah pserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	2.196		DINAS PENDIDIKAN	
10.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	1.984		DINAS PENDIDIKAN	
11.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			DINAS PENDIDIKAN	
12.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			DINAS PENDIDIKAN	
13.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			DINAS PENDIDIKAN	
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.	574		DINAS PENDIDIKAN	
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.065		DINAS PENDIDIKAN	

16.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).			DINAS PENDIDIKAN	
17.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan Swasta).	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan Swasta).			DINAS PENDIDIKAN	
18.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).	1.065		DINAS PENDIDIKAN	
19.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	465		DINAS PENDIDIKAN	
20.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	86		DINAS PENDIDIKAN	
21.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	464		DINAS PENDIDIKAN	

22.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	85		DINAS PENDIDIKAN	
23.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	30		DINAS PENDIDIKAN	
24.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	3		DINAS PENDIDIKAN	
25.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	45		DINAS PENDIDIKAN	
26.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi.			DINAS PENDIDIKAN	

27.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	78		DINAS PENDIDIKAN	
28.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	24		DINAS PENDIDIKAN	
29.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			DINAS PENDIDIKAN	
30.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			DINAS PENDIDIKAN	
31.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar.			DINAS PENDIDIKAN	
32.	Jumlah kebutuhan minimal pendidk pada jenjang sekolah menengah pertama.	Jumlah kebutuhan minimal pendidk pada jenjang sekolah menengah pertama.			DINAS PENDIDIKAN	
33.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.			DINAS PENDIDIKAN	
34.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama.			DINAS PENDIDIKAN	

35.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.			DINAS PENDIDIKAN	
36.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.			DINAS PENDIDIKAN	
37.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.	1.065		DINAS PENDIDIKAN	
38.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.	465		DINAS PENDIDIKAN	
39.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat.	281		DINAS PENDIDIKAN	
40.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	86		DINAS PENDIDIKAN	
41.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	85		DINAS PENDIDIKAN	

42.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	30		DINAS PENDIDIKAN	
43.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	3		DINAS PENDIDIKAN	
44.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat.	45		DINAS PENDIDIKAN	
45.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).			DINAS PENDIDIKAN	
46.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.			DINAS PENDIDIKAN	
47.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			DINAS PENDIDIKAN	

48.	Jumlah kebutuhan meinimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).	Jumlah kebutuhan meinimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).			DINAS PENDIDIKAN	
49.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan Swasta).	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan Swasta).			DINAS PENDIDIKAN	
50.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).			DINAS PENDIDIKAN	
51.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	85		DINAS PENDIDIKAN	
52.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang meiliki ijazah D-IV atau S1.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang meiliki ijazah D-IV atau S1.	30		DINAS PENDIDIKAN	

2.	URUSAN KESEHATAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah RS rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.	Jumlah RS rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.	1		DINAS KESEHATAN	
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.	1			
3.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
4.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal.				
5.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
6.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar.				
7.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
8.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonental esensial sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonental esensial sesuai standar.				

9.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
10.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar.				
11.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
12.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.				
13.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
14.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar.				
15.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
16.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining sesuai standar.				

17.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
18.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas sesuai standar.				
19.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
20.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar.				
21.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
22.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita ODJG sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita ODJG sesuai standar.				
23.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
24.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar.				
25.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia .				
26.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar.				

3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kab/Kota (ha).	Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kab/Kota (ha).			DINAS PUPR	
2.	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kab/Kota (m).	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kab/Kota (m).				
3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kab/Kota (ha).	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kab/Kota (ha).				
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi akresi di WS kewenangan Kab/Kota (m).	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi akresi di WS kewenangan Kab/Kota (m).				

5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumberdaya air WS Kewenangan Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumberdaya air kewenangan Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
7.	Data prasarana dan sarana pengapam pantai dan sungai milik pemerintah Kab/Kota.	Jumlah data prasarana dan sarana pengapam pantai dan sungai milik pemerintah Kab/Kota. **<u>Data yang dimaksud :</u>** i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bedung pengendali banjir (unit) v. Pompa banjir (unit dan kapasitas) vi. Polder?kolam Retensi (unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya (m)				
8.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha).	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha).				

9.	Panjang sungai dikawsan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (m).	Panjang sungai dikawsan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (m).				
10.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/Kota (ha).	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/Kota (ha).				
11.	Panjang pantai dikawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi akresi di WS kewenangan Kab/Kota.	Panjang pantai dikawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi akresi di WS kewenangan Kab/Kota.				
12.	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
13.	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
14.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kab/Kota.	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kab/Kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m)				

		iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m).				
15.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik.	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi primer (m) x 100%				
16.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik.	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi sekunder (m) x 100%				
17.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik.	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi tersier (m) x 100%				
18.	Pemenuhan dokumen RISPAM Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
19.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
20.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM.				

21.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM.				
22.	Jumlah kerjasama penyelenggara SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Jumlah kerjasama penyelenggara SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.				
23.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S.				
24.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.				
25.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T.				
26.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja.				

27.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.				
28.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik.				
29.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar.	∑rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----------x100% rumah diwilayah pengembangan SPALD ∑ dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha.				
30.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman.	∑rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ----------x100% rumah diwilayah pengembangan SPALD ∑ dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha.				
31.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman.	∑rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----------x100% ∑rumah diwilayah pengembangan SPALD				

32.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat.	∑rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ----------x100% ∑jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah penyembangan SPALD-S				
33.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja.	∑jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----------x100% ∑jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota.				
34.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja.	∑jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----------x100% ∑jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota.				
35.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	∑jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung IPALD ----------x100% ∑jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kab/Kota.				
36.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja.	∑jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot ----------x100% ∑jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-SKab/Kota.				
37.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	∑jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi yang berlaku				

	yang layak fungsi.	----------x100% ∑jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana).				
38.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting.				
39.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung.	**Ada/tidak**				
40.	Penetapan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung.	**Ada/tidak**				
41.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan.				
42.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah.				
43.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota.				
44.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kab/Kota yang dipelihara/rawat.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kab/Kota yang dipelihara/rawat.				
45.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan				

	dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota.	Kab/Kota.				
46.	Panjang jalan yang dibangun.	Panjang jalan yang dibangun.				
47.	Panjang jembatan yang dibangun.	Panjang jembatan yang dibangun.				
48.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi).	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi).				
49.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan.				
50.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi.				
51.	Panjang jembatan yang direhabilitasi.	Panjang jembatan yang direhabilitasi.				
52.	Panjang jalan yang dipelihara.	Panjang jalan yang dipelihara.				
53.	Panjang jembatan yang dipelihara.	Panjang jembatan yang dipelihara.				
54.	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analis di wilayah Kab/Kota.	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analis di wilayah Kab/Kota.				
55.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kab/kota.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kab/kota.				

56.	Jumlah tenaga kerja kontruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah Kab/kota.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah Kab/kota.				
57.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi Cakupan Kab/Kota yang aktif dengan data termutakhir.	**Ada/tidak**				
58.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
59.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN.	**Ada/tidak**				
60.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya.	**Ada/tidak**				
61.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan	**Ada/tidak**				

	oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.					
62.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
63.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi diwilayah Kab/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang registrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	**Ada/tidak**				
64.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis.	**Ada/tidak**				

65.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
66.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang menadapatkan pembinaan diwilayah Kab/Kota.	**Ada/tidak**				
67.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.	**Ada/tidak**				
68.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	**Ada/tidak**				
69.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.	**Ada/tidak**				

70.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	**Ada/tidak**				
71.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN diwilayah Kab/Kota.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN diwilayah Kab/Kota.				
72.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP wilayah Kab/Kota.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP wilayah Kab/Kota.				
73.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek diwilayah Kab/Kota.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek diwilayah Kab/Kota.				
74.	Jumlah badan usaha yang mendaparkan pembinaan diwilayah Kab/Kota.	Jumlah badan usaha yang mendaparkan pembinaan diwilayah Kab/Kota.				
75.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.				

76.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.				
77.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.				
78.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.				

4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya.			DINAS PUPR	
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam.				
3.	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.				
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi.				
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi.				
6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi.				

7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.				
8.	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi.	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi.				
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.				
10.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM.				
11.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM.				
12.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM.				

13.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.				
14.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.				
15.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah.				
16.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha.				
17.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH.				
18.	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktu kawasan kumuh.	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktu kawasan kumuh.				
19.	Jumlah rumah di Kab/Kota.	Jumlah rumah di Kab/Kota.				
20.	Jumlah unit peningkatan Kualitas RTLH.	Jumlah unit peningkatan Kualitas RTLH.				
21.	Jumlah rumah tidak layak huni.	Jumlah rumah tidak layak huni.				
22.	Jumlah rumah yang tidak dihuni.	Jumlah rumah yang tidak dihuni.				

23.	Rasio rumah dan KK.	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$				
24.	Jumlah rumah pembangunan baru.	Jumlah rumah pembangunan baru.				
25.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU.				
26.	Jumlah rumah unit yang sudah difasilitasi air minum.	Jumlah rumah unit yang sudah difasilitasi air minum.				
27.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan.				
28.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site).	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site).				
29.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH.				
30.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU.				
31.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi.				
32.	Jumlah pengembang yang teregristasi.	Jumlah pengembang yang teregristasi.				
33.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.				

5.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani.	Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani.	11		SATPOL PP	
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0		SATPOL PP	
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditetapkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditetapkan	12		SATPOL PP	
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2		SATPOL PP	
5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/Tidak	Ada		SATPOL PP	
6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Dibuat dalam bentuk daftar.	61		SATPOL PP	

7.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100 % Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan			BPBD	
8.	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ---------- x 100 % Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			BPBD	
9.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaa dokumen yang disusun ---------- x 100 % Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan			BPBD	
10.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaa dokumen yang disusun ---------- x 100 % Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan			BPBD	
11.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ---------- x 100 % Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana			BPBD	

12.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ---------- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			BPBD	
13.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalop penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ---------- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			BPBD	
14.	Persentase warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ---------- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			BPBD	
15.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ---------- x 100 % Jumlah seluruh penetapan status KLB			BPBD	
16.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana ---------- x 100 % Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana			BPBD	

17.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ---------- x 100 % Jumlah keseluruh petugas dalam penanganan darurat bencana			BPBD	
18.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievaluasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ---------- x 100 % Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana			BPBD	
19.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/Kota.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/Kota.			BPBD	
20.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di Kantor Kecamatan.	Ada/Tidak			BPBD	
21.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di Kantor Kecamatan.	Ada/Tidak			BPBD	

22.	Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa.	Dibuat dalam bentuk daftar			BPBD	
23.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dibuat dalam bentuk daftar			BPBD	
24.	Jumah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.	Jumah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.			BPBD	
25.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atu perangkat daerah yang menyelengarakan sub urusan kebakaran.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atu perangkat daerah yang menyelengarakan sub urusan kebakaran.			BPBD	
26.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.			BPBD	

6.	URUSAN SOSIAL					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki.			DINAS SOSIAL	
2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM.	20 org			
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk.				
4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau,	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau,				
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.				
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket makanan sesuai				

	menerima paket makanan sesuai standar gizi.	standar gizi.				
7.	Jumlah rumah singgah /shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.	Jumlah rumah singgah /shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.				
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.				
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memenfaatkan alat bantu.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memenfaatkan alat bantu.				
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.				
11.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.				
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.				
13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah.				
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan.	6 org			

	dan/atau relawan sosial yang disediakan.					
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial..				
16	Jumlah bimbingan sosial yang dialksanakan kepada keluarga dan masyarakat.	Jumlah bimbingan sosial yang dialksanakan kepada keluarga dan masyarakat.				
17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendaparkan dokumen kependudukan..	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendaparkan dokumen kependudukan..				
18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.				
19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran	4 org			

	mendapatkan layanan penelusuran keluarga..	keluarga..				
20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.				
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.				
22.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan.	200 Jiwa			
23.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang.				
24.	Jumlah tempat penampungan, pengungsi yang dimiliki.	Jumlah tempat penampungan, pengungsi yang dimiliki.				
25.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan.				
26.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial.				
27.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.				

7.	URUSAN KETENAGAKERJAAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/Kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku.	-	-	Disnakertrans	Tidak ada dianggarkan kegiatan yang dimaksud di Tahun 2020.
2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%. Realisasi indikator-target indikator ---------- X 100% Realisasi	3 6	50 %	Disnakertrans	
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kab/Kota.	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan.	-	-	Disnakertrans	Kurangnya SDM diperusahaan dalam penyusunan RTK

4.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster.	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau akupasi pada tahun n ----------X 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	9 9	100 %	Disnakertrans	
5.	Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	2 9	23%	Disnakertrans	
6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	Jumlah instruktur pada tahun n ---------- X 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	9 136	6%	Disnakertrans	
7.	Persentase LPK yang terakreditasi	umlah LPK yang terakreditasi pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah seluruh LPK pada tahun n	1 4	25%	Disnakertrans	
8.	Persentase LPK yang memiliki izin	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	4 4	100%	Disnakertrans	
9.	Jumlah penganggur yang dilatih.	Jumlah penganggur yang dilatih.	-	-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020

10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan.	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	130 136	95%	Disnakertrans	
11.	Perentase penyerapan lulusan.	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah lulusan pada tahun n	29 136	21%	Disnakertrans	
12.	Lulusan bersertifikat kompetensi.	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020
13.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.	∑CPMI dilatih ---------- x 100 % ∑CPMI terdaftar		-	Disnakertrans	Tidak adanya anggaran untuk pelatihan
14.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).		-	Disnakertrans	Tidak adanya anggaran untuk pelatihan
15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah perusahaan pada tahun n		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020

16.	Data tingkat produktifitas total.	Pertumbuhan ekonomi dikurangi pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020
17.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	10 15	66,6%	Disnakertrans	
18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	3 15	20%	Disnakertrans	
19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederensi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB diperusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederensi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB diperusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan.	8		Disnakertrans	

20.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah ---------- X 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	13 15	86,6%	Disnakertrans	
21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peerta BPJS Ketenagakerjaan ---------- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	13 15	86,6%	Disnakertrans	
22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih.	Jumlah perusahaan yang berselisih ---------- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	10 15	66,6%	Disnakertrans	
23.	Jumlah mogok kerja.	Jumlah mogok kerja.	0	-	Disnakertrans	
24.	Jumlah penutupan perusahaan.	Jumlah penutupan perusahaan.	0	-	Disnakertrans	
25.	Jumlah perselisihan kepentingan.	Jumlah perselisihan kepentingan.	10		Disnakertrans	

26.	Jumlah perselisihan anatar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan.	Jumlah perselisihan anatar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan.	0	-	Disnakertrans	
27.	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK	6		Disnakertrans	
28.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	6		Disnakertrans	
29.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite.	10		Disnakertrans	
30.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kab/Kota yang diberdayakan.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kab/Kota yang diberdayakan.	0		Disnakertrans	
31.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	Jumlah Perjanjian Bersama ---------- X 100% Jumlah Kasus Perselisihan	6 6	100%	Disnakertrans	

32.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia diwilayah Kab/Kota.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia diwilayah Kab/Kota.		-	Disnakertrans	Tidak adanya perusahaan yang menginformasikan lowongan pekerjaan
33.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kab/Kota.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kab/Kota.	4		Disnakertrans	
34.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab.Kota.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab.Kota.		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020
35.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.		-	Disnakertrans	Tidak ada personil
36.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kab/Kota.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kab/Kota.		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020
37.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	10		Disnakertrans	
38.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online SISNAKER.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online SISNAKER.		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020

39.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.	∑CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ---------- X 100% ∑CPMI/CTKI		-	Disnakertrans	Tidak adanya pengadaan sosialisasi bagi CPMI
40.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020
41.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan.	∑fasilitasi PMI yang dipulangkan ----------X 100% ∑PMI yang dipulang	3 3	100%	Disnakertrans	
42.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ---------- X 100% ∑PMI/TKI		-	Disnakertrans	Tidak adanya pelatihan bagi PMI
43.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.	∑ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan ---------- X 100% ∑ PMI/TKI purna dan keluarganya		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020
44.	Jumlah layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukkan.	∑ LTSA yang terbentuk ---------- X 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI		-	Disnakertrans	Tidak ada data untuk tahun 2020

8.	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG.	Tidak ada.	-	DP3AKB	Tidak ada.
2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat Kab/Kota.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat Kab/Kota.	Tidak ada.	-	DP3AKB	Tidak ada kegiatan
3.	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerjasama dengan Pemkab/Kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak.	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerjasama dengan Pemkab/Kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak.	4			1. Metro TV 2. SCTV 3. Media online 4. LSM

4.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.	1		Pusat pelayanan P2TP2A	Tempat Pelayanan Pengaduan.
5.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani.	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani / Jumlah korban kekerasan anak di daerah X 100%	11 / 11	100 %		
6.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan.	12			10 Faskes Paud Paud HI
7.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat bantuan keuangan /fasilitas oleh Pemkab/Kota (APBD Kab/Kota).	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat bantuan keuangan /fasilitas oleh Pemkab/Kota (APBD Kab/Kota).	3			Sanggar PAUD LSM
8.	Jumlah organisasi kemayarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan pelatihan.	Jumlah organisasi kemayarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan pelatihan.	4			1. Perwiridan 2. LSM perempuan 3. KelTani perempuan 4. PKK
9.	Jumlah kader perempuan tingkat Kab/Kota yang sudah dilatih.	Jumlah kader perempuan tingkat Kab/Kota yang sudah dilatih.	20			PKK 15 LSM 5

10.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.	3 Lembaga			1. PKK 2. LSM 3. Kelompok Tani Perempuan
11.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kab/Kota.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kab/Kota.	1			PKK
12.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi.				
13.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi.	3			1. Puskesmas 2. RSUD 3. Faskes
14.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ---------- x 100 % Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	10 10	100 %		

9.	URUSAN PANGAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.	Ada/Tidak infrastruktur pergudangan	Ada	20%	Dinas Pangan	
2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya.	Ada/Tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak	NIHIL	Dinas Pangan	
3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal.	Ada/Tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	NIHIL	Dinas Pangan	
4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.	Ada/Tidak kegiatana pemberdayaan masyarakat	Ada	20%	Dinas Pangan	

5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan.	Ada/Tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	70%	Dinas Pangan	
6.	Tertanganinya kerawanan pangan.	Ada/Tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	20%	Dinas Pangan	
7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.	Ada/Tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.	Tidak	NIHIL	Dinas Pangan	
8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.	Ada/Tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.	Ada	20%	Dinas Pangan	

10.	**URUSAN PERTANAHAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Walikota.	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ---------- x 100 % Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	13 / 13	100%	DPM2TSP	

2.	SK Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek.	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee ---------- x 100 % Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	- -	-	Dinas Pertanahan	Belum penetapan tanah obyek landreform (TOL)
3.	SK Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan Maksimum/Absentee.	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee ---------- x 100 % Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	- -	-	Dinas Pertanahan	Belum ada regulasi dari Walikota.
4.	Dokumen izin membuka tanah.	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak ---------- x 100 % Jumlah Dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	- -	-	DPM2TSP	Belum ada
5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota.	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ---------- x 100 % Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	- -	-	Dinas Pertanahan	

11.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai relatif $= \frac{Ci}{Lij}$	BELUM ADA DATA DARI DLHK PROV		DLHK	BELUM ADA DATA DARI DLHK PROV
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah diwilayah Kab/Kota.	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah. 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah. 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPTS dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan.	Ada		DLHK	
3.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota.	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota ---------- X 100% Jumlah usulan permohonan yang teregestrasi	2 2	100%	DLHK	1. PEMB.PASAR RUNDENG; 2. PEMB. GUDANG DISTRIBUTOR GAS ELPIJI.

4.	Rasio pejabat pengawas LH didaerah (PPLHD) di Kab.Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota.	Jumlah PPLHD yang ada ---------- X 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	BELUM ADA PPLHD		DLHK	BELUM ADA PPLHD
5.	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada didaerah Kab/Kota.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) ---------- X 100% Jumlah usulan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	- -		DLHK	BELUM ADA
6.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mendapatkan pelatihan ---------- X 100% Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada	- -		DLHK	BELUM ADA
7.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ---------- X 100% Target lembaga keamsyarakatan yang akan diberikan diklat	1 (SATU) SEKOLAH 3 (TIGA) SEKOLAH	33,33%	DLHK	TARGET : SMA UNGGUL SIMPANG KIRI, SMA PLUS MUHAMMADIYAH DAN PESANTREN HIDAYATULLAH.

8.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU Lh yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani.	Pengaduan masyarakat yang ditangani ---------- X 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristasi	2 / 2	100%	DLHK	

12.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ---------- x 100 % Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	189 / 189	100 %	Disdukcapil	
2.	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ---------- x 100 % Peristiwa perceraian yang dilaporkan		NIHIL	Disdukcapil	NIHIL
3.	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ---------- x 100 % Peristiwa kematian yang dilaporkan	1.935 / 1.935	100 %	Disdukcapil	

4.	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kab/Kota dalam 1 tahun ---------- x 100 % 2 tahun	91.423 178.708	51,15 %	Disdukcapil	

13.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa.	NIHIL	NIHIL	BPMK	Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan.
2.	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya.	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi (-) jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya.	NIHIL	NIHIL	BPMK	Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan.
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.	NIHIL	NIHIL	BPMK	Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan.

4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatn dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatn dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.	NIHIL	NIHIL	BPMK	Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan.
5.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa.	NIHIL	NIHIL	BPMK	Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan.
6.	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya.	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya.	NIHIL	NIHIL	BPMK	Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan.

14.	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan.	**Ada/Tidak**	Dalam Proses		DP3AKB	Dalam Proses

2.	Media usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.	Media usia kawin pertama wanita usia 25-49 tahun disefinisikan sebagai usia dimana 50 % dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di indonesia.	Surat Edaran dalam Proses		DP3AKB	Surat Edaran dalam Proses
3.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFRi = \frac{bi}{pf} x\ k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun.	10.282		Rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dan usia dari Disdukcapil.	
4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) ---------- x 100 % Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)				
5.	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan secara akatif	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan secara akatif dalam pengelolaan program KKBPK.	10 Dinas		DP3AKB	1. Dukcapil 2. BPS 3. Dinkes 4. Pendidikan 5. Bappeda

	dalam pengelolaan program KKBPK.					6. DPMK 7. PKK 8. Dandim 9. Polres 10. BUMD
6.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP ---------- x 100 % Jumlah Faskes	9 Faskes 10 Faskes	90%	DP3AKB	Puskesmas: 1.Simpang Kiri 2.Bakal Buah 3.RSUD 4.Mutia Medika 5.Penanggalan 6.Jontor 7.Rundeng 8.Longkib 9.S.Daulat 10.Batu-Batu Faskes yg belum melayani KB MKJP : Batu-Batu
7.	Persentase Peserta KB Aktfi (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif ---------- x 100 % Jumlah PUS	25.388 30.673	82,77%	DP3AKB	
8.	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	11 Pokja		DP3AKB	Pokja Kampung KB: 1. Desa Subulussalam

	KKBPK yang efektif					Timur 2. Desa Lae Ikan 3. DesaSuka Maju 4. Desa Darul Makmur 5. Desa Pasir Belo 6. Desa Belukur Makmu 7. Desa Binanga 8. Desa Oboh 9. Desa Lae Saga 10. Desa Sepang 11. Desa Longkib
9.	Peserta pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ---------- x 100 % Jumlah sarana peserta KB pasca persalinan	170 14.006	0,01	Dari Profil Dinkes	
10.	Persentase kesertaan KB di Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa yang memeiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah.				

11.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah Peserta KB pada Keluarga Penerima PBI ---------- x 100 % Jumlah Keluarga PBI		Tidak ada Data	DP3AKB	

15.	**URUSAN PERHUBUNGAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia ---------- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan.				
2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala.	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ---------- x 100% Jumlah kendaraan wajib uji				

3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kab/Kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	Jumlah penetapan tarif u ntuk penyeberangan ---------- x 100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kab atau Kota				
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rakayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota.	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota. ---------- x 100 % Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota				
5.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rakayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kab/Kota.	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota ---------- x 100 % Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota				

16.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Persentase perangkat daerah yg terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yg disediakan oleh Dinas Kominfo.	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo. ---------- x 100 % Populasi Perangkat Daerah	38 39	0,97 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo.	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo. ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah.	38 39	0,97 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	Tersedianya sistem elektronik kominikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.	Sistem elektronik kominikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. **(Ya atau Tidak)**	Tidak		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

4.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5Tahun 2015.	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No.5 Tahun 2015 ---------- x 100 % Jumlah kegiatan (event) Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah..			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
5.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar.	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar. ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah.	60 / 39	1,54 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
6.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah.	39		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

7.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ---------- x 100 % Jumlah layanan.			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
8.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang memanfaatkan sertifikat elektronik.	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang memanfaatkan sertifikat elektronik. ---------- x 100 % Jumlah layanan.			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
9.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ---------- x 100 % Jumlah sistem elektronik.			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
10.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah. ---------- x 100 % Jumlah layanan publik dan layanan administrasi.		NIHIL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NIHIL

11.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah.	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah. ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah.	 39		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
12.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data pemerintah.	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat. ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah.	1 39	0,03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISDUK CAPIL
13.	Persentase perangkat daerah yang memeperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo).	Jumlah perangkat daerah yang memeperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya. ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah.	5 39	0,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. DISDUK CAPIL 2. DINSOS 3. DINKES 4. BAPPEDA 5. PERIZINAN
14.	Persentase data yang dapat berbagi pakai.	Jumlah data yang dapat berbagi pakai. ---------- x 100 % Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah.	 		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
15.	Persentase perangkat daerah yang ,mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city.	Jumlah perangkat daerah yang ,mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city. ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah.	 39		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

16.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo. ---------- x 100 % Jumlah ASN pengelola TIK.	1 1	1 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
17.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	**(Ada atau Tidak Ada)** : 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat : • Visi, Misi, Tujuan dan sasaran. • Penganggaran • Strategi • Peta Jalan • Arah kebijakan • Cetak biru teknis/Peta rencana strategi. 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of information Officer) : • Penugasan pejabat • Kewenangan • Tugas dan tanggungjawab.	Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

18.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah.	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah. ---------- x 100 % Jumlah komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi pemerintah Daerah	2 2	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dua (2) Komunitas yaitu : 1. Daya Mitra Subulus salam (DMS) 2. Radio Swara Ssalam.
19.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah pusat sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM).	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah pusat sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM). ---------- x 100 % Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah pusat	19		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
20.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP. ---------- x 100 % Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik.		NIHIL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NIHIL

17.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----------x100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	 25		Urusan Penanaman Modal dan Bidang Koperasi & UKM	Sejak tahun 2017 Disperindagkop dan UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.
2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----------x100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan			Urusan Penanaman Modal	Sejak tahun 2017 Disperindagkop dan UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.
3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	15 86	0,17 %	Bidang Koperasi dan UKM	

4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----------x100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	7 61	0,11 %	Bidang Koperasi dan UKM	
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	0 86		Bidang Koperasi dan UKM	
6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----------x100% Jumlah anggota koperasi yang ada	0 86		Bidang Koperasi dan UKM	
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	0 86		Bidang Koperasi dan UKM	
8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fsilitasi pembiayaan.	**Tidak perlu diisi**			-	**Tidak perlu diisi**

9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	0 / 86		Bidang Koperasi dan UKM	
10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	0 / 86		Bidang Koperasi dan UKM	
11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	0 / 86		Bidang Koperasi dan UKM	
12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	0 / 86		Bidang Koperasi dan UKM	

13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	0 86		Bidang Koperasi dan UKM	
14.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----------x100% Jumlah wirausaha yang ada	38 2.207	0,02 %	Bidang Koperasi dan UKM	
15.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data system (ODS).	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online (ODS) ----------x100% Jumlah usaha mikro yang ada	82 1.366	0,06 %	Bidang Koperasi dan UKM	
16.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra.	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----------x100% Jumlah usaha mikro yang ada	10 1.366	0,01	Bidang Koperasi dan UKM	
17.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----------x100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi paroduk	0 1.366		Bidang Koperasi dan UKM	

18.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----------x100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	10 1.366	0,01 %	Bidang Koperasi dan UKM	
19.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----------x100% Jumlah usaha mikro yang ada	10 1.366	0,01 %	Bidang Koperasi dan UKM	
20.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan.	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----------x100% Jumlah usaha mikro yang ada	10 1.366	0,01 %	Bidang Koperasi dan UKM	

18.	URUSAN PENANAMAN MODAL					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota.	Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang bisa diberikan kepada ivestor.	-	-	DPMP2SP	Belum ada perda yang telah disusun/diterbitkan.
2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 dokumen	100%	DPMP2SP	
3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal pertahun.	-	-	DPMP2SP	Belum terselenggaranya evaluasi pemberian insentif.
4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting.	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	-	-	DPMP2SP	Belum terselenggaranya kegiatan seminar bisnis dan yang sejenisnya.

5.	Kegiatan pameran penanaman modal.	Jumlah kegiatan pameran pananam modal	-	-	DPMP2SP	Belum terselenggaranya kegiatan pameran penanaman modal.
6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal.	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal.	-	-	DPMP2SP	Belum pernah diselenggarakan kegiatan penerimaan misi penanaman modal.
7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal.	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	-	DPMP2SP	Kegiatan konsultasi perizinan dan non perizinan belum terdokumentasi dengan baik.
8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.	544		Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan.	
9.	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau ditingkat Kab/Kota	403.286.211.798		Bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.	

10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kab/Kota.	Jumlah aparatur dan penanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	-	-	DPMP2SP	Tidak tersedianya/ terselenggaranya kegiatan pembinaan aparatur penanaman modal
11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	-	-	DPMP2SP	Kegiatan pembinaan pengawasan tidak terdokumentasi dengan baik.
12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan daerah Kab/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	2	100%	Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan	

19.	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				

2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan.				
3.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda.				
4.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan.				
5.	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan.	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan.				
6.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah.				

20.	URUSAN STATISTIK					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Trsedianya buku profil daerah.	**Ada/tidak**	Ada 6 buku profil	100 %	BPS,OPD,instansi lainnya.	1 Level Kota, 5 Level Kec.
2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan.	1		OPD, instansi lainnya.	BPS sebagai Pelaku.
3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.	1		OPD, instansi lainnya.	BPS sebagai Pelaku.
4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.	0	0	Datang langsung ke PST BPS.	
5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS.	0	0	Datang langsung ke PST BPS.	
6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral.	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral / Jumlah kegiatan statistik sektoral x 100%	6 / 6	100 %	Metadata BPS	
7.	Persentase kelengkapan	Jumlah metadata indikator	31	100 %	Metadata BPS	

	metadata variabel sektoral.	statistik sektoral ----------x 100% Jumlah indikator statistik sektoral	31			

22.	URUSAN PERSANDIAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamanakan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----------x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada				
2.	Peseta sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi				

	sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	penyandian ----------x 100% Jumlah SE yang ada **SMKI** **(Sistem Manajemen Keamanan Informasi)** **Yang termasuk dalam Sistem Elektronik (SE) ;** Sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll				
3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----------x 100% Jumlah SE yang ada				
4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintahan (PHKS) yang ditetapkan.	Jumlah titik teramankan ----------x 100% Jumlah titik pada PHKS				

23.	URUSAN KEBUDAYAAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (ineventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi).	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)				
2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman).	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)				
3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat).	Jumlah objek dimanfaatkan				

4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola).	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + jumlah sdm disertifikasi + jumlah lembaga distandarisasi + jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola				
5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan **CB = Cagar Budaya**				
6.	Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran).	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah.				
7.	Layanan perizinan membawa cagar budaya daerah ke luar daerah dengan dukungan data.	Jumlah CB diberikan izin keluar Kab/Kota				
8.	Pengembangan cagar budaya daerah (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)				

9.	Pemanfaatan cagar budaya daerah (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata).	Jumlah CB dimanfaatkan				
10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum.	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)				
11.	Peningkatan dalam penyelenggaraan dan pelaksaan kegatan museum. Peningkatan akses masyarakat dalam pengeleloaan sara dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum				
12.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk				
13.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahi CB				
14.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi				
15.	Pemetaan sdm cagar budaya dan pemuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm museum				

16.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensi (CB + Museum)				
17.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman.	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)				
18.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat.	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat				

24.	**URUSAN PERPUSTAKAAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**5**
1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia Diberbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ---------- X 100% Jumlah penduduk di wilayah (dalam jiwa)	21.380 eks / 87.407 jiwa	0,24 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	-

2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.	Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ---------- X 100% Jumlah penduduk di wilayah	9.443 org 87.407 jiwa	0,11 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	-
3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk.	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayah ---------- X 100% Jumlah penduduk di wilayah	7 org 87.407 jiwa	0,0001 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	-
4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----------X 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayah	1 6	0,17 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	-
5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat.	1		Pustaka Keliling	Layanan Perpustakaan Keliling
6.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayah.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayah.	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	Tidak ada

7.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa.	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	Tidak ada
8.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayah.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayah.	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	Tidak ada

25.	**URUSAN KEARSIPAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**5**
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ---------- X 100% Jumlah seluruh arsip aktif	2 berkas --- 	33 %	Perpustakaan dan kearsipan	Absen PNS dan Honorer Dinas Perpustakaan.
2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuat daftar arsip.	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan dalam arsip ---------- X 100% Jumlah seluruh arsip aktif	- --- -	Tidak ada	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada

3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik.	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ---------- X 100% Jumlah seluruh arsip statis	- - -	Tidak ada	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----------X 100% Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan daerah	2 File	5 %	Perpustakaan dan kearsipan	SIKN Prov Aceh (Nama Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam masa ke masa).
5.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK.	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Tidak ada	-	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada
6.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK.	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Tidak ada	-	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada
7.	Penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK di daerah.	NSPK penyelamatan arsip penggabungan /pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Tidak ada	-	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada

8.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK.	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Tidak ada	-	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada
9.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK.	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tidak ada	-	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada
10.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK.	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup meruju pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Tidak ada	-	Perpustakaan dan kearsipan	Tidak ada

26.	URUSAN PERIKANAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP).	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	449			
2.	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional.	Jumlah TPI yang operasional ----------x100% Jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah Kab/Kota.	Tidak ada			
3.	Jumlah Izin Usaha (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang diterbitkan.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang diterbitkan	Tidak ada			
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi /dan penguatan kelembagaan).	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	449 org			

5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	840.000 ekor			

27.	**URUSAN PARIWISATA**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi.	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi.** ***Destinasi wisata adalah*** kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. ***Yang dimaksud dengan entitas pengelolaan destinasi adalah*** penglola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta.				

2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.				
3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/Kota				
4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.				
5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana didalam negeri.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana didalam negeri. **Bisa sebagai peserta atau penyelenggara**				
6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kab/Kota.	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kab/Kota.				
7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata didalam negeri.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata didalam negeri.				
8.	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----------x100% Jumlah tenaga kerja pariwisata				

9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan.	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----------x100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan				
10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.				

28.	**URUSAN PERTANIAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan.	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan.	212			Jalan 158 Bangunan 24 Pupuk 3 Bibit 27
2.	Prasarana pertanian yang digunakan.	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan.	158			Jalan pertanian
3.	Penerbitan izin usaha pertanian.	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian.	Tidak ada			

4.	Persentase prasarana yang digunakan.	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----------x100% Jumlah prasarana yang dibangun	158 158	100%		
5.	Persentase prasarana yang digunakan.	Jumlah usulan yang difasilitasi ----------x100% Jumlah usulan usaha pertanian				
6.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana.	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----------x100% Jumlah area terkena bencana				

28.	**URUSAN KEHUTANAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura.	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	1 dokumen	30 %	DLHK	A. Status "Dokumen Penataan Blok Tahura Lae Kombih". 1. Dokumen sudah disusun dan dilakukan penilaian ke tim Ditjen PIKA KSDAE KLHK-RI tanggal 10

						februari 2021 (No. UN. 12/ PIKA/PNK/KSA.0/2/2021). 2. Surat Reviu dokumen Plt. Dir PIKA KSDAE KLHK-RI No. S.28/PIKA/PNK/KSA.0/2/2021 tanggal 26 februari 2021. 3. Pengesahan dokumen menunggu hasil perbaikan Dokumen blok berdasarkan surat reviu Plt. Dir PIKA diatas. 4. Capaian kinerja untuk Dokumen Penataan Blok Tahura Lae Kombih 90% (menunggu jadwal pengesahan). A. Dokumen yang wajib dipenuhi dalam pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu Dokumen Penataan Blok, Dokumen RPHJP, dan Dokumen Desain Tapak Kawasan Konservasi .

2.	Pemberdayaan masyarakat didaerah penyangga.	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	-	0	DLHK	Belum dilaksanakan kegiatan (belum menjadi prioritas pengelolaan kawasan tahura lae kombih).
3.	Pemulihan ekosistem pada Tahura.	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	20 Ha (20 / 1482)	1,35 %	DLHK	Penanaman dan pengkayaan bibit kapur (*dryobalanops aromatic gaertn)* pada blok rehabilitasi dan open area Tahura Lae Kombih.
4.	Menurunnya gangguan pada Tahura.	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Tidak ada kasus	0 kasus.	DLHK	Pelaksanaan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan oleh tim pamhut DLHK secara berkala (sosialisasi langsung) terhadap aktivitas masyarakat didalam kawasan dan pemasangan papan himbauan dan larangan (belum penindakan hukum).

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

No.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus Persamaan	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/Kota.	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/Kota	-	-	Disperindagkop dan UKM	Sejak Tahun 2017 Urusan Energi dan Sumber daya

						Mineral tidak lagi di Disperindagkop & UKM, tetapi sudah menjadi kewenangan Provinsi.

30.	URUSAN PERDAGANGAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan. b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ---------- x 100 % Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar				Sejak Tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.

		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ---------- x 100 % Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar				Sejak Tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.
2.	Persentase penerbitan TDG.	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja ---------- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan TDG				Sejak Tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.
3.	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG.	Jumlah penerbitan TDG ---------- x 100 % Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota				Sejak Tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarka

						n izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.
4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ---------- x 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri				Sejak Tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.
	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ---------- x 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri				Sejak Tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.

	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri : Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ---------- x 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri				Sejak Tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwako No : 55 Tahun 2017.
5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota.	Jumlah pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah Kab/Kota ---------- x 100 % Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	0 0	0	Bidang Perdagangan	
6.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu.	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) ---------- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0 0	0	Bidang Perdagangan	

7.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan wilayah kerjanya.	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya. a = Pengembangan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5). b = Sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5).	0,5 + 0,5	100	Bidang Perdagangan	
8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok.	-	-	Bidang Perdagangan	
9.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan.	$X = \frac{a}{b\ x\ c}\ x100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan. a = Jumlah pupuk yang disalurkan. b = Target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK). c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).	- -	-		Bukan kewenangan Disperindagkop & UKM

10.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan ----------x100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab/Kota	6 6	100 %	Bidang Perdagangan	
11.	Persentase kesesuaiaan BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku.	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----------x100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	0 0	0	Bidang Perdagangan	

31. URUSAN PERINDUSTRIAN

No.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus Persamaan	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya didaerah Kab/Kota.	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk				Sejak tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwalko No : 55 Tahun 2017.

2.	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditettapkannya menajdi PERDA.	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK. Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%). b) Tersusunnya Draf Raperda RPIK (20%). c) Draf Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapatkan Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%). d) Persetujuan Draf Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%). e) Penetapan Perda RPIK (10%).	0	0	Bidang Perindustrian	
3.	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil menengah yang diterbitkan.	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk				Sejak tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwalko No : 55 Tahun 2017.
4.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk				Sejak tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin

	yang diterbitkan.					sesuai dengan Perwalko No : 55 Tahun 2017.
5.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota.	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas ---------- x 100 % Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	0 960	0	Bidang Perindustrian	

32.	URUSAN TRANSMIGRASI					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya. Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.	17	0%	Disnakertrans	UPT
2.	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya.	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya. Satuan Permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga.	17	0%	Disnakertrans	UPT
3.	Jumlah satuan permukiman yang dibina.	Jumlah satuan permukiman yang dibina.	17	0%	Disnakertrans	UPT

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME).

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Persamaan	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	**URUSAN PENDIDIKAN**					
1.	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Jumlah anak 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada daerah yang bersangkutan				
2.	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada daerah yang bersangkutan	1.252			
3.	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama.	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ---------- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada daerah yang bersangkutan	746			

4.	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada daerah yang bersangkutan	 2.684			

2.	**URUSAN KESEHATAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan.	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ---------- x 100 % Jumlah penduduk di Kab/Kota	7.132 97.407	7,32	DINAS KESEHATAN	
2.	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kab/Kota yang telah memiliki akreditasi.	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS di Kab/Kota	1 1	100		
3.	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ---------- x 100 % Jumlah Ibu hamil di Kab/Kota	2.196 2.411	91,08		

4.	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ---------- x 100 % Jumlah Ibu bersalin di Kab/Kota	1.796 2.301	78,05		
5.	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kab/Kota	1.757 1.766	99,49		
6.	Mengukur persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah balita di Kab/Kota	73.031 83.855	87,09		
7.	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kab/Kota	1.997 2.041	0,98		
8.	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kab/Kota	8.311 42.340	19,63		

9.	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas di Kab/Kota	3.062 4.112	74,46		
10.	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kab/Kota	1.667 12.552	13,28		
11.	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita DM di Kab/Kota	381 465	81,94		
12.	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kab/Kota	224 224	100		
13.	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kab/Kota	172 208	0,83		

13.	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar.	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kab/Kota	- -	-		

3.	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota.	Luasa kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)				
2.	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (m) ---------- x 100 % luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kab/Kota (m)				

3.	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	Luas irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha). ---------- x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota				
4.	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota.	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah Kab/Kota. ---------- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kab/Kota tersebut				
5.	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yng memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD. ---------- x 100 % Jumlah rumah di Kab/Kota				
6.	Mengukur rasio kepatuhan IMB Kab/Kota.	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ---------- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku				

7.	Mengukur tingkat kemantapan jalan.	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap ---------- x 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kab.Kota				
8.	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kab/Kota				
9.	Mengukur rasio proyek yang menajdi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ---------- x 100 % Jumlah total proyek yang menajdi kewenangan pengawasannya				

4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n				
2.	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota.	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan				
3.	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani.	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) ---------- x 100 % luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha				

4.	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ---------- x 100 % Jumlah total unit rumah Kab/Kota				
5.	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU.	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah unit rumah Kab/Kota				

5.	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota.	Jumlah pengaduan yang ditangani ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			BPBD	
2.	Menguikur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	JumlahPerda/Perkada yang memuat sanksi yang ditetapkan ---------- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	3 3	100%	SATPOL PP	

3.	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.			BPBD	
4.	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.			BPBD	
5.	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.			BPBD	
6.	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kab/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di Kab/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah. ---------- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota.			BPBD	
7.	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran.			BPBD	

6.	URUSAN SOSIAL					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	24 300	0,08 %	DINAS SOSIAL	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota.	200 200	100 %	DINAS SOSIAL	

7.	URUSAN KETENAGAKERJAAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tanaga kerja.	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kab./Kota	6 / 32	18,75	Disnakertrans	
2.	Menguikur persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja Keseluruhan	29 / 49.353	0,06	Disnakertrans	
3.	Mengukur tingkat produktifitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja	1,97 / 49.353	0,003	Disnakertrans	
4.	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100 % Jumlah perusahaan	- / 52		Disnakertrans	

5.	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/Kota.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	- 144		Disnakertrans	

8.	**URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ---------- x 100 % Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	4.816.400.200 457.503.348.137	1,05 %		
2.	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kab/Kota.	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kab/Kota yang didampingi ---------- x 100 % Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	11 30.166	0,037 %		

3.	Mengikur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	Jumlah permpuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100 % Jumlah penduduk perempuan	10 47.855	0,00		

9.	**URUSAN PANGAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota.	Jumlah cadangan pangan ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan	NIHIL NIHIL	NIHIL	Dinas Pangan	

10.	URUSAN PERTANAHAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ---------- X 100% Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	127.941 127.941	100%	DPM2TSP	
2.	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	Luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- X 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	41.680 1.760	2,37%	Dinas Pertanahan	
3.	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi ---------- X 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	127.941 127.941	100%	DPM2TSP	

4.	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.	Jumlah penerima tanah obyek londreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha ---------- X 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform		N I H I L	Dinas Pertanahan	
5.	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ---------- x 100 % Luas izin membuka tanah yang diterbitkan		-	Dinas Pertanahan	
6.	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ---------- x 100 % Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	110 110	100 %	Dinas Pertanahan	

11.	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/Kota.	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%)	-	NA	DLHK	SAMPAI DENGAN 2020

		IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	-			BELUM DILAKSANAKAN PENGUKURAN IKLH.
2.	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kab.Kota.	Total volume sampah yang dapat ditangani ---------- x 100 % Total volume timbunan sampah Kab/Kota	7.482,50 ton 8.779,56 ton	85,23%	DLHK	
3.	Mengukur tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.	Jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota ---------- x 100 % Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	4 PKS 4 PKS + 1 RSUD	100%	DLHK	PKS (PABRIK KELAPA SAWIT); RSUD (RUMAH SAKIT DAERAH)

12.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kab/Kota.	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP ---------- x 100 % Jumlah penduduk 17 tahun keatas	55.956 88.971	62,89 %	Disdukcapil	
2.	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA.	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang sudah memiliki KIA ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0-17 tahun	2.953 36.877	8 %	Disdukcapil	
3.	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran.	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0-18 tahun	30.739 34.752	88,45 %	Disdukcapil	
4.	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja ---------- x 100 % Jumlah OPD	10 39	25,64 %	Disdukcapil	

13.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal.	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun ---------- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	9 / 18	50 %	IDM 2020	
2.	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi mandiri.	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun pertahun ---------- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	11 / 53	20,75	IDM 2020	

14.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	TFR $= 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$				
2.	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	Jumlah peserta KB aktif modern ---------- x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur	25.388 30.673	82,77%	Laporan bulanan pengendalian lapangan tingkat Kota SIGA.	

15.	URUSAN PERHUBUNGAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur rasio konektivitas Kab/Kota.	Rasio konektivitas Kab/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yng dilayani pada Kab.Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kab.Kota tersebut). • IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = Jumlah lintas penyeberangan yang berpoperasi pada Kab/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kab/Kota tersebut).				
2.	Mengukur kinerja lalulintas Kabupaten / Kota.	V/C ratio dijalan Kabupaten / Kota				

16.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase (%) organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo..	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. ---------- x 100 % Jumlah OPD	38 39	0,97 %	DINAS KOMINFO	
2.	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100 % Jumlah Layanan Publik.	47 48	0,98 %	DINAS KOMINFO	
3.	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah. ---------- x 100 % Jumlah Penduduk.	50.000 97.407	0,51 %	DINAS KOMINFO	

17.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas.	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volumen usaha dan aset ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	8 86	0,09	Bidang Koperasi dan UKM	
2.	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100 % Jumlah usaha mikro keseluruhan	38 1.366	0,03	Bidang Koperasi dan UKM	

18.	URUSAN PENANAMAN MODAL					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase peningkatan invesatasi di Kab/Kota.	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di Kab/Kota ---------- X 100% Jumlah investasi tahun n-1 di Kab/Kota	403.286.211.798 - 279.143.419.523 279.143.419.523	44,47	Bidang perencanaan pengmbangan iklim dan promosi penanaman modal.	

19.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	Jumlah pemuda (16-30tahun) yang berwirausaha di Kab/Kota ---------- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kab/Kota				
2.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial.	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kab/Kota ---------- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kab/Kota				
3.	Mengukur peningkatan prestasi olahraga.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional				

20.	URUSAN STATISTIK					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100 % Jumlah OPD	15 39	38,46 %	SKD BPS	
2.	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100 % Jumlah OPD	5 39	12,82 %	SKD BPS	

21.	URUSAN PERSANDIAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kab/Kota.	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100 % Jumlah area penilaian				

22.	URUSAN KEBUDAYAAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat tpelestarian cagar budaya.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata	1 3	33,33 %		

23.	URUSAN PERPUSTAKAAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Tidak ada	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak ada

2.	Menguikur indeks pembangunan literasi masyarakat.	Nilai indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didaptkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM ∑ ------- x 100 ALM		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak ada

24.	**URUSAN KEARSIPAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	**T = (a + i + s + j)/4** T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. i = Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan saana bantu temu balik. j = Persentase jumah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.	2 File	1,25 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIKN Prov Aceh (Nama Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Masa Ke masa)

2.	Menguikur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	**T = (m + b + g + a + c + i)/6** T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. m = Tingkat kesesuaiaan kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK. b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK. g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/Kota dengan NSPK. a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK. c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK. i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK.	Tidak ada	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak ada

25.	URUSAN PERIKANAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data (Ton)**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kab/Kota.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota	162,1			

26.	URUSAN PARIWISATA					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kab/Kota.	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100 %	26.631-24.210 = 2.421 / 24.210	10 %		
2.	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota.	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100 %				

3.	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kab/Kota.	Jumlah kamar yang terjual ---------- x 100 % Jumlah kamar yang tersedia				
4.	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kab/Kota (harga berlaku)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	11,65			
5.	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kab/Kota (harga berlaku)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.277.718.866			

27.	**URUSAN PERTANIAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat peroduktivitas pertanian.	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----------x100% Luas panen	14.704 3.089	476,01		

2.	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular.	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya ----------x100% Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	2.553 139	18,37		

28.	**URUSAN KEHUTANAN**					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	N I H I L	N I H I L				

29.	URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab/Kota .	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin ---------- X 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	- - -	-	Disperindagkop dan UKM	Sejak Tahun 2017 Urusan Energi dan Sumber daya Mineral tidak lagi di Disperindagkop & UKM, tetapi sudah menjadi kewenangan Provinsi.

30.	URUSAN PERDAGANGAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ---------- X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	2.156 13.000	0,17	Bidang Perdagangan	
2.	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk.	Realisasi ---------- X 100% RDKK	- -	-	Bidang Perdagangan	
3.	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan ---------- X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib diterima dan tera ulang diwilayah Kab/Kota.	6 6	100 %	Bidang Perdagangan	

31.	URUSAN PERINDUSTRIAN					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota.	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ---------- X 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	49 911	0,05	Bidang Perindustrian	
2.	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turuna indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%. Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	0 0	0	Bidang Perindustrian	
3.	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan				Sejak tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwalko No : 55 Tahun 2017.

4.	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x100% Jumlah izin yang dikeluarkan				Sejak tahun 2017 Disperindagkop & UKM tidak lagi mengeluarkan izin sesuai dengan Perwalko No : 55 Tahun 2017.
5.	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini.	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%). - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%). - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%). - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%). - Informasi bahan bakar/energy (10%). - Informasi Investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2).	25 + 10	35	Bidang Perindustrian	

32.	URUSAN TRANSMIGRASI					
No.	**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**	**Rumus Persamaan**	**Elemen Data**	**Capaian Kinerja (%)**	**Sumber Data**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	N I H I L	N I H I L				

2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Mengukur rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan.	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ---------- x 100 % Jumlah APBD	728.509.321.002.00			
		Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.	Jumlah PAD ---------- x 100 % Jumlah PDRB Non Migas	67.082.889.328,00 29,42	2280179		
		Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) /level 1/ level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2			
		Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0) /level 1/ level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2			

		Mengukur efisiensi belanja operasi diluar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBN diluar transfer expenditures.	Jumlah belanja urusan pemerintahan-tansfer expenditures ---------- x 100 % Jumlah belanja APBD	125.899.742.815,00 661.925.908.478,06	0,19		
		Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir.	Opini Laporan Keuangan	WDP			
2.	URUSAN PENGADAAN	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ---------- x 100 % Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	16 69	0,23 %		
		Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ---------- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	3	0,05 %		

		Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ---------- x 100 % Total belanja langsung	77.441.125.300 457.503.348.137	16,93 %		
3.	URUSAN KEPEGAWAIAN	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1.907 188	10,14 %		
		Melihat jumlah pegawai fungsional PNS diluar guru dan tenaga kesehatan.	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26 1.030	0,03 %		
		Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, diluar tenaga guru dan kesehatan.	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26 1.030	0,03 %		

4.	URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal.	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} - 1\right) \times 100\%\right]$	604.583.519.841,85 / 787.825.651.293,06	76,74		
		Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal.	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} - 1\right) \times 100\%\right]$	55.780.164.989,02 / 67.082.889.328,00	0,83		
		Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada.	1. Apakah ada daftar asset tetap? **(Ya/Tidak)** 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? **(Ya/Tidak)** 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? **(Ya/Tidak)** 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? **(Ya/Tidak)**	Ada Ada Ada Ada			
		Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	10.763.885.967,10 / 792.244.829.610,10	0,01 %		

5.	URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda ----------x100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda dirinci	63.885.000 63.800.000	1,00 %		
		Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah.	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ----------x100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	39 39	100 %		

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu wujud instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Organisasi Pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik.

Pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kota Subulussalam dalam mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu kepada sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019 -2024

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Subulussalam dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020 .

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target). Dari hasil pengukuran tersebut akan diketahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) dimasa yang akan datang.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Subulussalam terdiri dari :

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik **(Progres Positif)** dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian **(Progres Negatif)**, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{(Target)-(Realisasi-Target)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100%	Sangat Baik
2.	76% - 100%	Baik
3.	55% - 75%	Cukup
4.	≤ 55 %	Kurang

B. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Subulussalam untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya serta

analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatkan Pemerataan dan Aksesibilitas dalam rangka Pelayanan Pendidikan

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 1 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel. 2.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Rata Lama Sekolah	7,88	7,84	99,5	Baik
2	Harapan Lama Sekolah	14,48	14,61	101	Sanga Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				**100,2**	**Sangat Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya Pemerataan dan Aksesibilitas dalam rangka Pelayanan Pendidikan,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **SANGAT BAIK** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **100,2 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 2 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Rata Lama Sekolah

Rata Lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia serta Untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.

Metedologi pengukuran Rata Lama Sekolah yang digunakan adalah pengukuran BPS Kota Subulussalam Tahun 2020 dengan menggunakan indikator Lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun dan Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas.

lndikator Kinerja " Rata Lama sekolah" ditargetkan pada tahun 2020 yaitu 7,88 Tahun, dengan realisasi diangka 7,84 Tahun dengan tingkat capaian 99,5% dengan kategori pencapaian kinerja **BAIK**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama periode 2015 sampai dengan 2019 Rata Lama Sekolah di Kota Subulussalam terus menunjukan peningkatan, Pada tahun 2015 angka Rata Lama Sekolah yaitu 6,78 Tahun dan pada tahun Tahun 2020 Rata Lama Sekolah menjadi 7,84 tahun mengalami peningkatan sebesar 16 persen dengan rata-rata kenaikan pertahunnya 3%, seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam dari Tahun 2015 -2020

Tahun	Rata Lama Sekolah	Persentase Kenaikan Rata Lama Sekolah
2015	6,78	
2016	6,88	1%
2017	7,12	3%
2018	7,39	4%
2019	7,58	3%
2020	7,84	3%

Sumber: Badan pusat Statistik (Kota Subulussalam Dalam Angka 2021)

Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target sampai tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJM 2024
Rata Lama Sekolah	7,84	7,92	8,04	8,17	8,24

Rata Lama Sekolah di Kota Subulussalam yang berada diangka 7,84 Tahun masih berada dibawah angka Rata Lama Sekolah Provinsi Aceh dan nasional, dimana angka rata-rata lama sekolah Aceh pada tahun 2020 yaitu 9,33 tahun, sementara angka rata-rata lama sekolah secara nasional untuk tahun 2020 yaitu 8,48 Tahun. Berikut grafik perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam dengan Aceh, Nasional.

Grafik.2.1 Perbandingan Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam dengan Provinsi Aceh dan Nasional

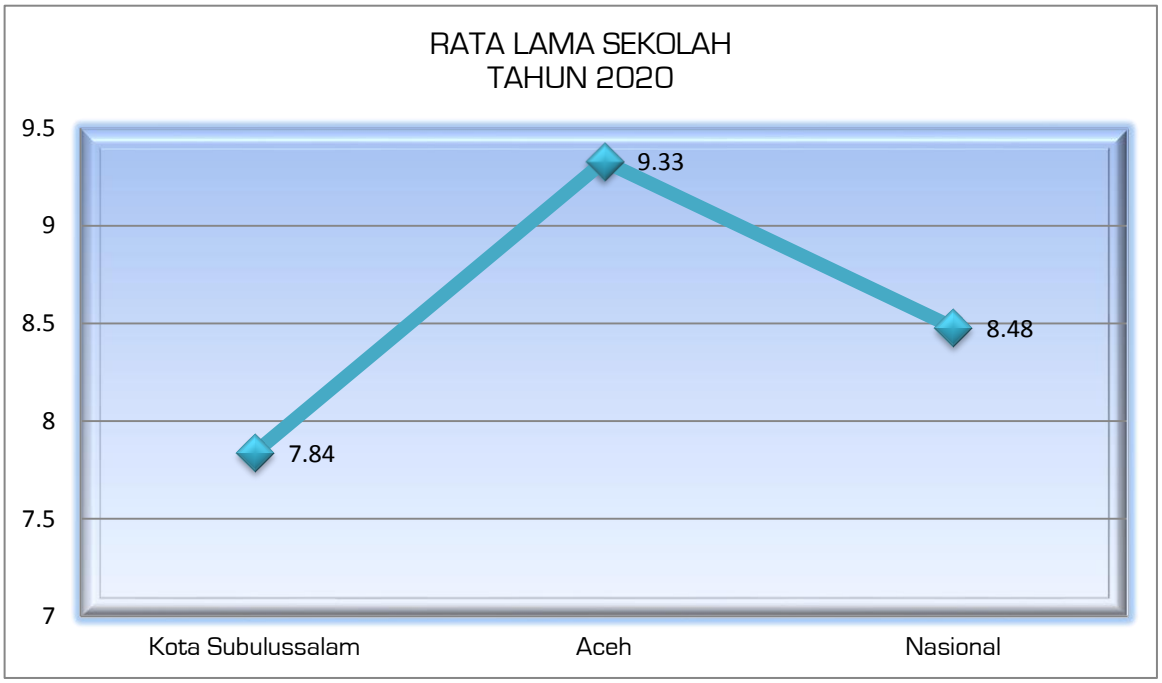

Sumber: Badan pusat Statistik (Kota Subulussalam Dalam Angka 2021) BPS Aceh dan BPS Pusat

Jika dibandingkan dengan 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, realisasi Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2020 menempati posisi paling rendah atau berada di urutan 23 dari 23 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh, untuk lebih jelasnya disajikan dalam table berikut ini;

Grafik 2.2 Perbandingan Rata Lama Sekolah

Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2020

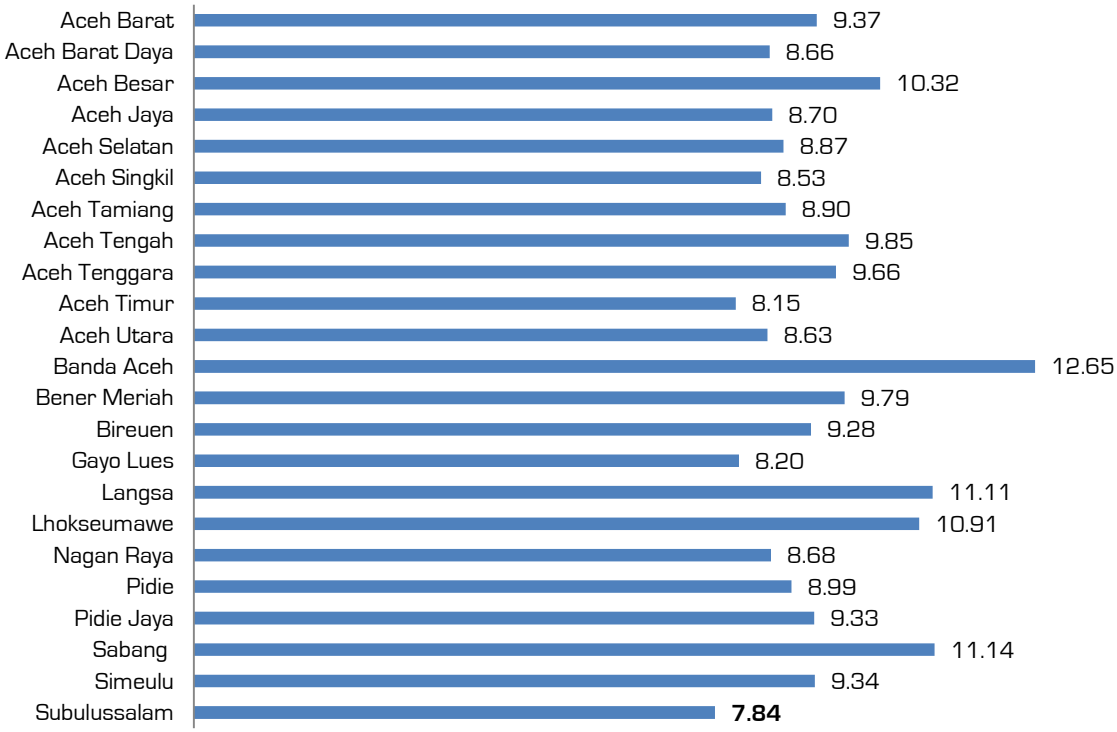

Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka 2021, BPS Aceh

Walaupun capaian kinerja Rata Lama Sekolah dengan kategori BAIK, tetapi rendahnya Angka Rata Lama Sekolah dibandingkan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Aceh tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kota Subulussalam agar kedepan Rata Lama Sekolah bisa terus ditingkatkan, salah satu penyebab belum optimalnya pencapaian angka rata lama sekolah di Kota Subulussalam adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Gambar 2.1 Siswa Sedang Mengikuti Kegiatan Pembelajaran di Sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

Upaya Pemerintah kota Subulussalam dalam meningkatkan Rata Lama Sekolah adalah dengan meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang capaian Indikator Rata Lama Sekolah antara lain Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Daerah, Program Pelayanan Pendidikan Tinggi untuk anak daerah, Program manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama sekolah (HLS) / *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan Lama Sekolah yaitu kemungkinan anak

tersebut akan tetap bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah untuk mengetahui mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Metedologi pengukuran Harapan Lama Sekolah yang digunakan adalah pengukuran BPS Kota Subulussalam Tahun 2020 dengan menggunakan indikator Jumlah Penduduk usia 7 tahun ke atas dan Jumlah penduduk usia 7 Tahun ke atas yang bersekolah.

lndikator Kinerja "Harapan Lama Sekolah" ditargetkan pada tahun 2020 yaitu 14,48 Tahun, dengan realisasi diangka 14,61 Tahun dengan tingkat capaian 101% dengan kategori pencapaian kinerja **SANGAT BAIK**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama periode 2015 sampai dengan 2019 Harapn Lama Sekolah di Kota Subulussalam terus menunjukan peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, Pada tahun 2015 angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,73 Tahun dan pada tahun Tahun 2020 Harapn Lama Sekolah menjadi 14,61 Tahun tahun mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen dengan rata-rata kenaikan pertahunnya 1%, seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam dari Tahun 2015 -2020

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Persentase Kenaikan Harapan Lama Sekolah
2015	13,73	
2016	14,18	3%
2017	14,19	0,1%
2018	14,20	0,1%
2019	14,21	0,1%
2020	14,61	3%

Sumber: Badan pusat Statistik (Kota Subulussalam Dalam Angka 2021)

Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target sampai tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.6 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJM 2024
Harapan Lama Sekolah	14,61	14,76	14,98	15,34	15,60

Harapan Lama Sekolah di Kota Subulussalam yang berada diangka 14,61 Tahun berada diatas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh dan nasional, dimana angka Harapan Lama Sekolah Aceh pada tahun 2020 yaitu 14,31 tahun, sementara angka Harapan Lama Sekolah secara nasional untuk tahun 2020 yaitu 12,98 Tahun. Berikut grafik perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam dengan Aceh, Nasional.

Grafik.2.3 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam dengan Provinsi Aceh dan Nasional

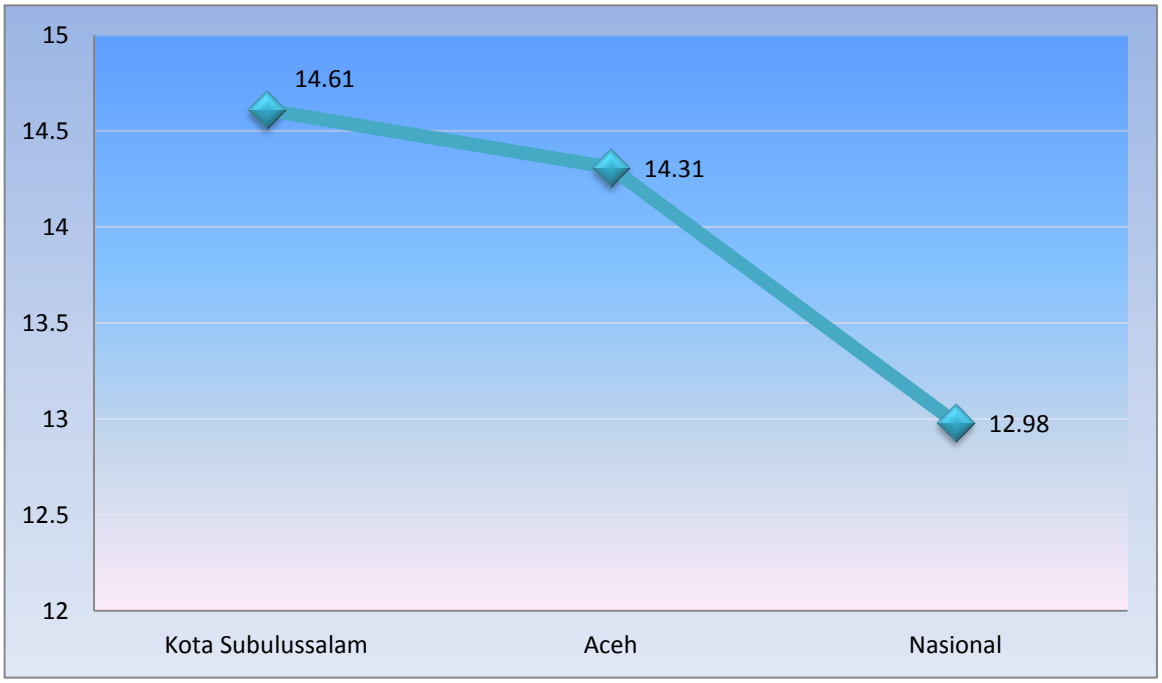

Sumber: Badan pusat Statistik (Kota Subulussalam Dalam Angka 2021) BPS Aceh dan BPS Pusat

Jika dibandingkan dengan 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, realisasi Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2020 berada di urutan 8 dari 23 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh, dimana diurutan pertama ditempati Banda Aceh dengan Harapan Lama Sekolah 17,79 Tahun dan di urutan 23 ditempati Kabupaten Aceh Timur dengan Harapan Lama Sekolah 13,03 Tahun untuk lebih jelasnya disajikan dalam table berikut ini;

Grafik 2.2 Perbandingan Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2020

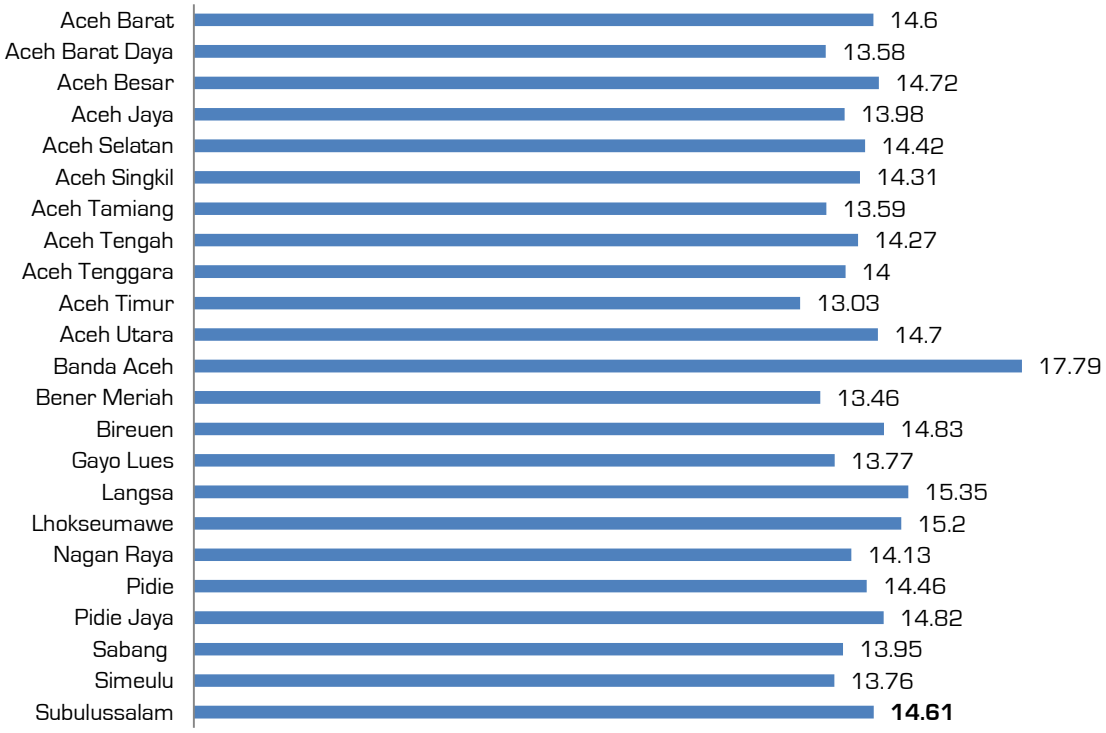

Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka 2021, BPS Aceh

Gambar 2.3 Murid Sekolah Dasar mengikuti Upacara Pengibaran Bendera

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

Tercapainya Target Harapan Lama Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2020 tidak terlepas dari berbagai upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam seperti dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), menekan angka putus sekolah serta berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Lama Sekolah antara lain Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Pendidikan anak Usia Dini.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ***Meningkatnya Pemerataan dan Aksesibilitas dalam rangka Pelayanan Pendidikan*** ada 12 (dua Belas) Program dengan Total Anggaran Rp. 64.884.884.401.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.339.134.045.00 atau **60,63** Persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini hanya **100,2** Persen, dan hal ini menunjukkan capaian kinerja dan keuangan masih

menunjukkan efesiensi sebesar **39,57** Persen. Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada tabel pada lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 2 (dua) ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel. 2.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	63.80	64.02	100.34%	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				**100,34**	**Sangat Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **Sangat Baik** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **100,34 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Pada tahun 2020, capaian angka harapan hidup penduduk Kota Subulussalam diangka 64.02 tahun mengalami peningkatan sebesar 0.08 persen dibandingkan tahun 2019 diangka 63,94 tahun.

Perkembangan capaian angka harapan hidup di Kota Subulussalam dibandingkan dengan tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup sebesar 63,56 tahun, di tahun 2018 sebesar 63,69 tahun dan di tahun 2019 sebesar 63,94 tahun sebagaimana digambarkan pada grafik 3.4 berikut ini:

Grafik 2.4 Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Subulussalam

Tahun 2017-2020

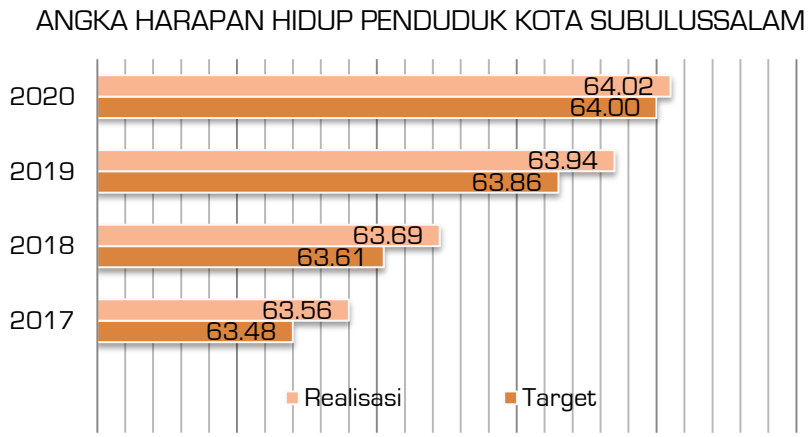

Dari garfik diatas dapat dilihat Angka Harapan Hidup penduduk Kota Subulussalam dari tahun 2017-2020 mengalami Peningkatan Angka Harapan Hidup hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan khusunya derajat kesehatan,umur panjang dan layak hidup. Keberhasilan peningkatan Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Subulussalam tidak terlepas dari peran serta Dinas Kesehatan Kota Subulussalam melalui program antara lain :

- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, melalui program ini dilakukan pelatihan kader dan pemegang program pos pembinaan terpadu **(Posbindu**) bagi usia lanjut usia.

- Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana Imunisasi,Peningkatan gizi,Penanggulangan, diare, Sanitasi, dasar dan Penyediaan obat esensial melalui program ini juga dllakukan pelatihan kader Pos Pelayanan Keluarga *Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu).*

Gambar 2.4 Lunching Rumah Gizi Kampung (RGK) di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri

Sumber Photo : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pemerintah Kota Subulussalam terus berkomitmen akan lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hal ini tertuang dalam RPJMD Kota Subulussalam tahun 2019-2024,

Tabel 2.8 Perbandingan Angka Harapan Hidup Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2019	2020		2021	2022	2023	Target Akhir 2024
		Target	Realisasi				
Angka Harapan Hidup	63.69	63.80	64.02	64.13	64.42	64.65	64.71

Secara umum Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2020 dengan angka 64.02 tahun dengan kategori ***Sangat Baik*** jika dibandingkan dengan Angka Harapan

Hidup Penduduk di Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Aceh berkisar diangka 69.93 tahun naik 0.06 persen dari tahun sebelumnya di angka sebesar 69.87 tahun. sedangkan Nasional Angka Harapan Hidup Penduduk di Indonesia berkisar 70.32 tahun.

Gfarik 2.5 Perbandingan Angka Harapan Hidup Penduduk

Kota Subulussalam dengan Provinsi Aceh dan Nasional

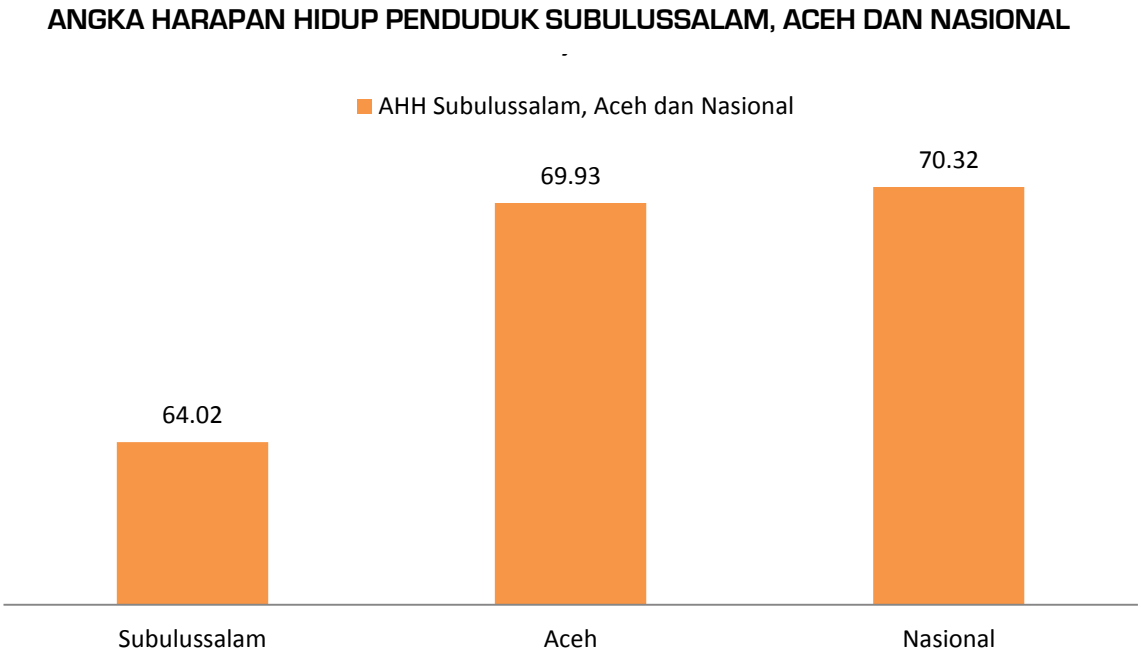

Gfarik 2.6 Perbandingan Angka Harapan Hidup Penduduk

Kabupaten Kota se Aceh

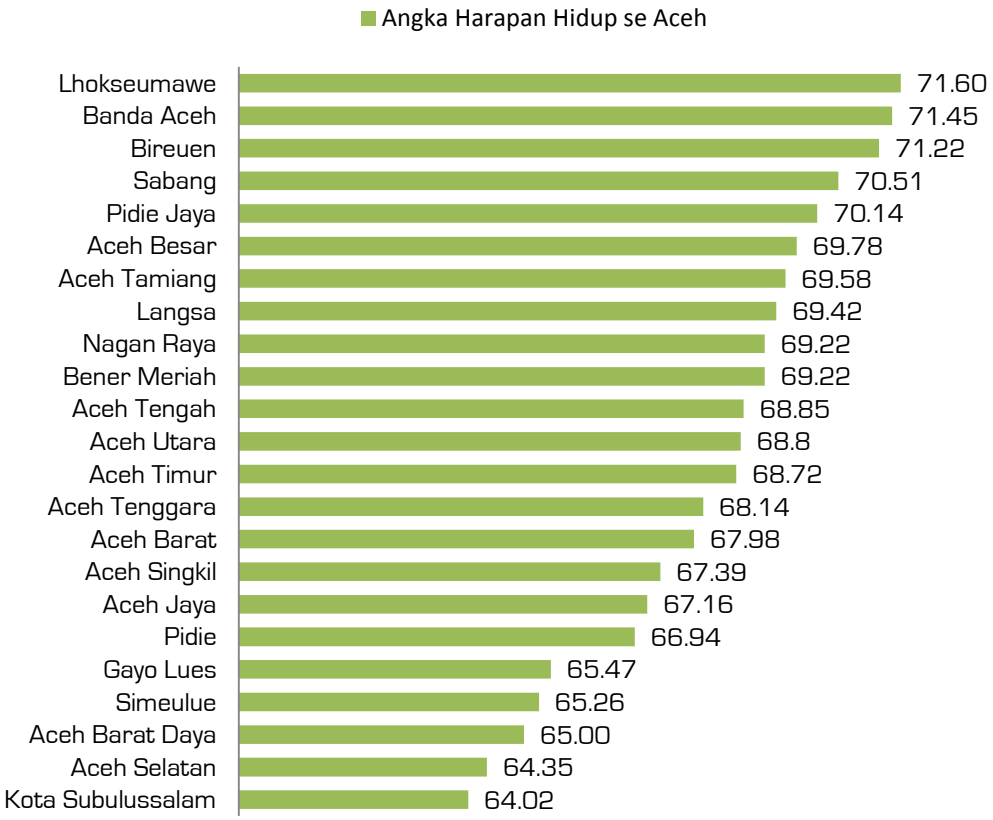

Angka Harapan Hidup penduduk Kota Subulussalam berada di urutan ke terendah dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh disusul Kabupaten Aceh Selatan. Sementara Kabupaten dengan Angka Harapan Hidup paling tinggi ialah Kota Lhokseumawe sebesar 71.60 tahun.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran indikator kinerja Angka Harapan Hidup sebanyak 16 program dengan anggaran Rp. 74.277.487.271.00 dengan realiasi Anggaran Rp. 62.944.046.499 atau 84,74 persen jika dibandingkan capaian kinerja dan capaian keuangan menunjukan efisiensi sebesar 15.60 persen. Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada tabel pada lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya derajat kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya pengarusutamaan gender

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 3 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel. 2.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Indeks Pembangunan Gender	85,06	85,06	100	Baik
Tingkat Capaian				**100**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya derajat kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **SANGAT BAIK** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **100 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perempuan merupakan sebagian besar sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dalam kehidupan, hal ini tercermin dalam segala aspek kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Untuk menggambarkan pembangunan manusia yang berbasis gender dalam suatu wilayah, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan Indeks pembangunan gender (IPG) yang dilihat dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi (pendapatan).

Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengukur kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan di dalam wilayah Kota Subulussalam dan mengukur pencapaian sasaran kebijakan pengarusutamaan gender telah menetapkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 sebagai salah satu indikator Kinerja.

Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Subulussalam yang digunakan adalah hasil pengukuran BPS Kota Subulussalam tahun 2020, dengan menggabungkan beberapa unsur pengukuran yaiatu Angka Harapan Hidup menurut jenis kelamin, Rata-Rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin, Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin. lndikator Kinerja "Indeks Pembangunan Gender (IPG)" ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 85,06 mampu direalisasi sebesar 85,06 dengan tingkat capaian 100% atau BAIK.

Jika dibandingkan dengan sebelumnya selama periode 2015 sampai dengan 2019 indeks pembangunan gender di Kota Subulussalam mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Perbandingan ini terlihat jelas di tahun 2015 dari angka 82,94 mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 83.51 di tahun 2017 mengalami kenaikan ke angka 83,96, selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2020 hanya mengalami peningkatan yang tidak signifikan sebesar ≤ 0,52 persen seperti tergambar dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Gender Kota Subulussalam

Tahun	Indeks Pembangunan Gender	Persentase Kenaikan Indeks Pembangunan Gender
2015	82,94	1,01
2016	83.51	0,57
2017	83,96	1.02
2018	84,53	0,57
2019	85,05	0,52
2020	85,06	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Subulussalak antara Realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJM Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2022	Target Akhhir RPJM Tahun 2024
Indeks Pembangunan Gender	85,06	85,07	85,08	85,09	86.00

Hasil pengukuran indeks pembangunan gender Kota Subulussalam ini dilihat 4 (empat) indikator kinerja yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin tahun 2020, seperti terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.12 Pengukuran Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Angka Harapan Hidup	62,08	65,86
2.	Harapan Lama Sekolah	14,36	14,89
3.	Rata-Rata Lama Sekolah	8,53	7,57
4.	Pengeluaran Perkapita	11,798,000	4,978,000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam

Dari hasil perhitungan indeks pembangunan gender ini juga menghasilkan angka indeks kesehatan, Indeks pendidikan, indek pengeluaran dan indeks pembangunan manusia menurut jenis kelamin tahun 2020 di Kota Subulussalam seperti terlampir dalam 168able berikut :

Tabel 2.13 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

No.	Indikator Kinerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Indeks Pendidikan	0,6832	0,6659
2.	Indeks Kesehatan	0,6858	0,6671
3.	Indeks Pengeluaran	0,7519	0,4882
4.	IPM	70,62	60,08

Indeks Pembangunan Gender jika dibandingkan dengan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dan Nasional, Kota Subulussalam masih dibawah angka provinsi sebesar 7.01 dimana Indeks Pembangunan Gender Provinsi Aceh 92,07 sedangkan Nasional berada di angka 91,06 tahun 2020, seperti terlampir dalan grafik berikut ini :

Grafik 2.7 Perbandingan IPG Kota Subulussalam, Aceh dan Nasional Tahun 2020

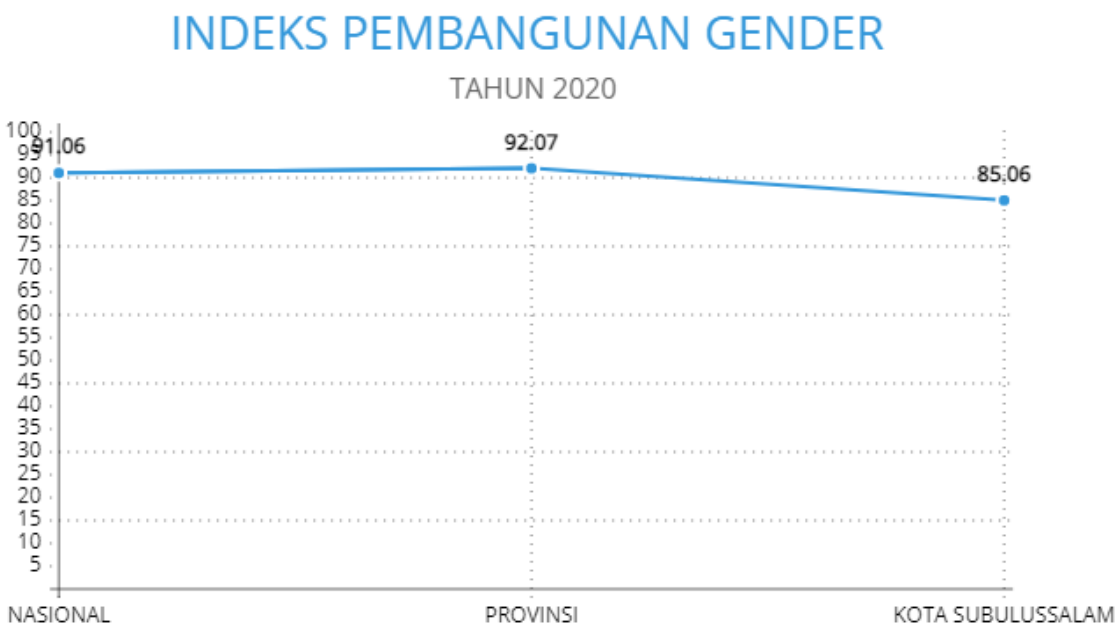

Dari grafik indeks pembangunan gender diatas dapat disimpulkan bahwa di Kota Subulussalam masih terdapat ketimpangan yang besar antara kualitas perempuan dan laki-lakinya jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional.

Tercapainya target indeks pembangunan gender pada tahun 2020, Pemerintah Kota Subulussalam melalui beberapa Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) terkait telah membuat kebijakan-kebijakan yang Pro Gender dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya perempuan dan anak di Kota Subulussalam., contohnya seperti dalam bidang kesehatan adanya jaminan persalinan (JAMPERSAL), adanya sosialisasi kesehatan yang sasaran utamanya adalah perempuan dan anak, dan dibidang pendidikan seperti adanya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Gambar 2.5 Peran Aktif Wanita Dalam Pemerintahan Kota Subulussalam

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa program antara lain; Program Keluarga Berencana, keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Pelayanan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi untuk anak Daerah, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ***Meningkatnya derajat kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender*** ada 7 Program yaitu :

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program keluarga sejahtera;
3. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
6. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.; dan
7. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Dengan Total Anggaran Rp. 4,816,400,200 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,021,055,056 atau **83,49 persen** Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini 100 Persen, dan hal ini menunjukkan capaian kinerja dan keuangan menunjukkan

efesiensi biaya sebesar **16,51** Persen atau Rp.795,345,144. Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada tabel pada lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 4 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel. 2.14 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,50	64,77	98,89	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				**98,89**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **BAIK** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **98,89 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Indicator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari tiga indicator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Metedologi pengukuran indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL). IKLH pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 65,50 mampu direalisasi sebesar 64,77 dengan tingkat capaian 98,89 atau BAIK.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terjadi kenaikan sebesar 2,08 dari priode 2019 tetapi dari segi capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 1,11 dari priode 2019 ini tergambar dalam table sebagai berikut;

Tabel 2.15 Perbandingan KLH Tahun 2019 – 2020 antara Target dan Realisasi

Tahun	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
2019	62,69	62,69	100
2020	65,50	64,77	98,89

Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.16 Perbanding KLH antara Realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJM Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhhir RPJM Tahun 2024
Indeks kualitas lingkungan hidup	64,77	65,83	69,12	72,57	76,20

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup jika dibandingkan dengan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dan Nasional, Kota Subulussalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka 64,77 persen , dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh pada angka 58,52 persen, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional berada di angka 74,68 persen.

Grafik 2.8 Perbandingan IKLH Kota Subulussalam, Aceh dan Nasional

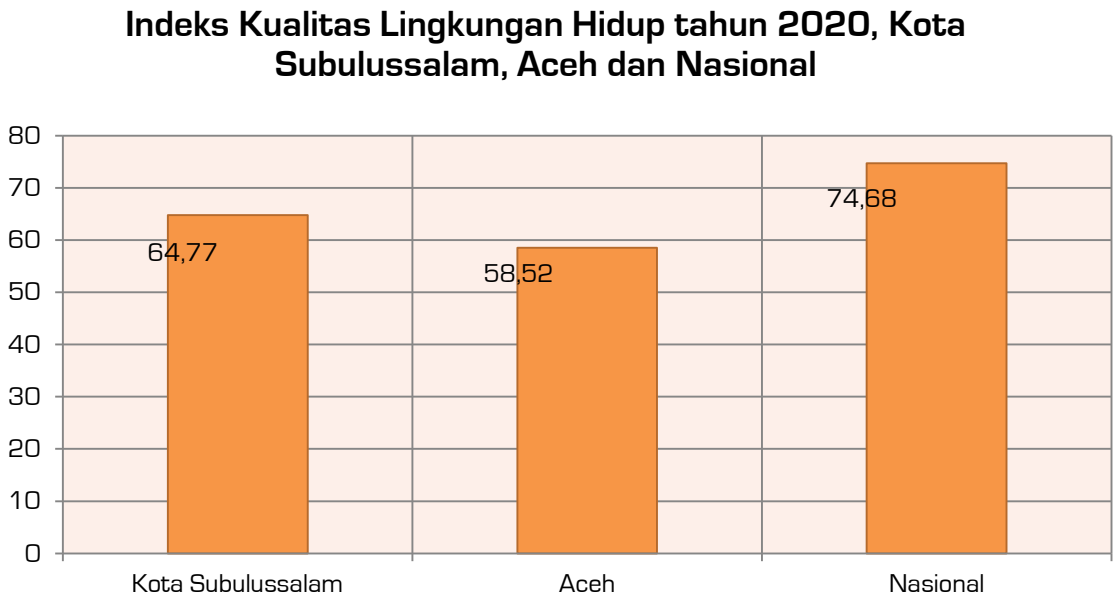

Adapun upaya Pemerintah kota Subulussalam dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Subulussalam yaitu mengadakan kelengkapan sarana dan prasarana berupa alat ukur dalam pengambilan dan pengumpulan data sampel dilapangan, yang nantinya dapat menjadi bahan dan informasi data guna mengantisipasi dan penanganan pencemaran atau kerusakan lingkungan dikemudian hari.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ada 9 Program dengan total anggaran Rp. 8.617.126.858,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.239.292.400,- atau 95,62 Persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini mencapai 98,89 persen, dalam hal ini capaian kinerja dan keuangan masih menunjukkan efisiensi sebesar 3,27 persen. Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada table lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Baik dan Terintegrasi

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 5 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.17 di bawah ini :

Tabel. 2.17 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Jalan Kondisi Baik	34,58	31,50	91,10	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				**91,10**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Baik dan Terintegrasi,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **Baik** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **91,10 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Persentase Jalan Kondisi Baik

Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dengan terus melakukan pembenahan di bidang insfrastruktur dengan melakukan peningkatan kualitas jalan. Upaya ini ditangani Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik.

Sesuai Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/026.e/2015 Tentang Perubahan Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai jalan Kota, panjang jalan kota berubah menjadi 473, 68 Km. Panjang Jalan di Kota Subulussalam berdasarkan Panjang Tiap Kondisi tahun 2015-2020 disajikan pada Tabel 3.17 berikut;

Tabel 2.18 Panjang Jalan di Kota Subulussalam Berdasarkan Panjang Tiap Kondisi 2015-2020

No	Tahun	Panjang Ruas Jalan (Km)	Panjang Tiap Kondisi (Km)			
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2015	473,68	82,77	116,20	87,99	186,72
2	2016	473,68	110,01	111,64	78,70	173,33
3	2017	473,68	112,86	111,42	78,22	171,18
4	2018	473,68	140,44	102,77	96,62	133,85
5	2019	473,68	147,80	96,01	96,02	133,85
6	2020	473,68	149,20	96,01	94,62	133,85

Persentase Jalan Kondisi Baik di tahun 2020 ditargetkan sebesar 34,58 persen mampu direalisasi sebesar 31,50 persen dengan tingkat capaian 91,10 atau BAIK.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi Persentase Jalan Kondisi Baik terjadi kenaikan sebesar 0,31 persen dari priode 2019 dan kenaikan dari capaian kinerja sebesar 23,09 dari priode 2019 ini tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.9 Perbandingan Capaian Persentase Jalan Kondisi Baik pada Tahun 2015-2020

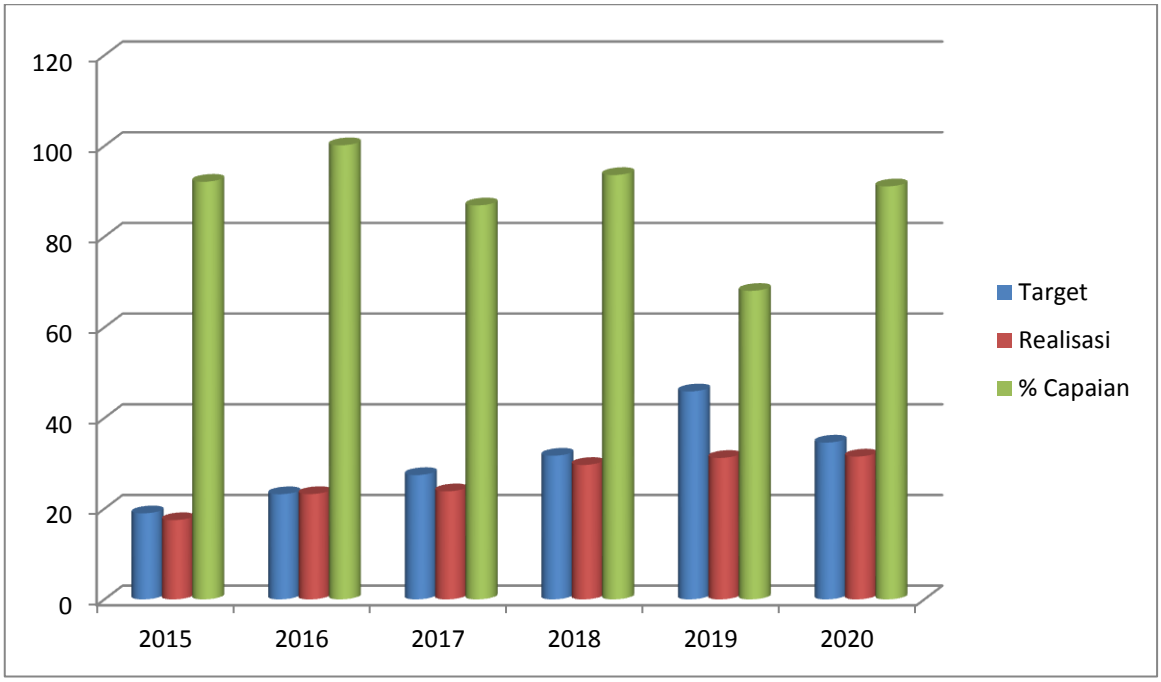

Sebagai perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada 176able realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.19 Perbandingan Persentase Jalan Kondisi Baik Realisasi Tahun 2020 – Target Akhir RPJM Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhhir RPJM Tahun 2024
Persentase Jalan Kondisi Baik	31,50	35,00	35,42	3584	36,26

Adapun upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di sektor pertanian dan perdagangan sangat dibutuhkan konektivitas antar wilayah Kota Subulussalam. Dengan terbangunnya jalan kondisi baik akan menghemat jarak tempuh antar Kecamatan, Desa dan Dusun sehingga masyarakat lebih lancar dalam mendistribusikan hasil – hasil panen pertanian, perkebunan, Perikanan dan industry rumah tangga sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Baik dan Terintegrasi ada 6 Program dengan total anggaran Rp. 71.237.359.903,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.43.851.878.382,- atau 61,56 Persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini mencapai 91,10 persen, dalam hal ini

capaian kinerja dan keuangan masih menunjukkan efisiensi sebesar 29,54 persen. Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada table lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 6 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel. 2.20 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	90,55	90,51	99,96	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				**99,96**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis **Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni,** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **Baik** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **99,96 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Rumah Layak Huni

Sebuah rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Konsep rumah layak huni yang digunakan disini adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Pemenuhan rumah layak huni juga merupakan salah satu indikator penurunan kemiskinan dan penurunan stanting di Kota Subulussalam yang masih tinggi.

Persentase Jumlah Rumah Layak Huni di tahun 2020 ditargetkan sebesar 90,55 persen mampu direalisasi sebesar 90,51 persen dengan tingkat capaian 99,96 persen atau BAIK.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi Jumlah Rumah Layak Huni terjadi kenaikan sebesar 2,14 persen dari priode 2019 dan kenaikan dari capaian kinerja sebesar 1,39 dari priode 2019 ini tergambar dalam Tabel sebagai berikut;

Tabel 2.21 Perbandingan Realisasi Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2019 sampai 2020

Tahun	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
2019	89,65	88,36	98,57
2020	90,55	90,51	99,96

Sebagai perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.22 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	90,51	94,22	92,37	93,29	94,22

Adapun upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk menurunkan isu Stanting dan Kemiskinan salah satunya dengan pembangunan rumah layak huni yang tersebar di lima Kecamatan dalam wilayah Kota Subulussalam.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni ada 4 Program dengan total anggaran Rp. 8.175.561.353,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.729.362.998,- atau 57,85 Persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini mencapai 99,96 persen, dalam hal ini capaian kinerja dan keuangan masih menunjukkan efisiensi sebesar 42,11 persen. Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada table lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 7 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.23 di bawah ini :

Tabel. 2.23 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Laju Pertumbuhan Kujungan Wisatawan	2,36	2,36	100	Sangat Baik
Tingkat Capaian				**100**	**Sangat Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **Sangat Baik** dengan persentase 100 persen**.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Presentase Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik, memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian salah satunya, UMKM. Kehadiran wisatawan pada suatu obyek wisata, diharapkan mampu menggerakan sektor jasa perdagangan/transportasi/penginapan serta sektor usaha kecil lainnya.

Melalui sembilan obyek unggulan Kota Subulussalam, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Subulussalam mentargetkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan, sebanyak 2,36 persen. Dari target laju pertumbuhan kunjungan wisatawan 2,36 persen dapat tercapai 2,36 persen dengan capaian kinerja 100 persen.

Grafik. 2.10 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan, Tahun 2020 dan tahun 2019

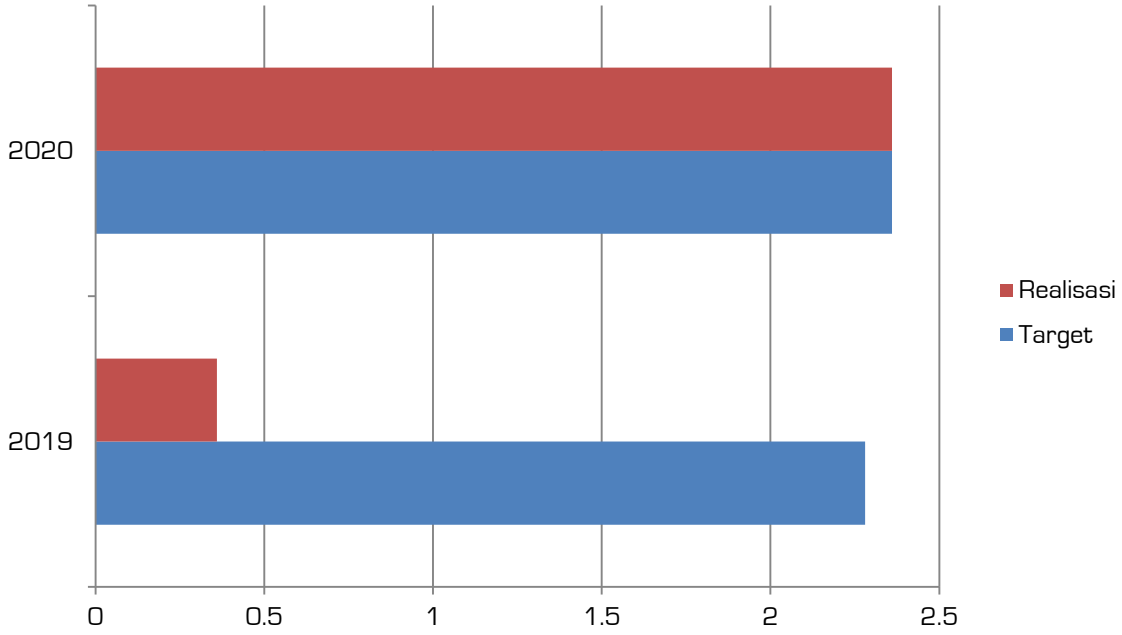

Dari table diatas, menunjukan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan, pada kondisi awal RPJMD antara tahun 2019 dan 2020 mengalami rrealisasi sebesar 2,36 persen. Tentunya kondisi ini menunjukan bahwa indikator ini tidak terpengaruh dengan kondisi covid-19, yang sedang terjadi serta adanya kebijakan penutupan tempat obyek wisata selama bulan maret sampai juli 2020.

Tabel 2.24 Lokasi Destinasi Obyek Wisata
Daftar Lokasi Obyek Wisata

No	Destinasi Wisata	Lokasi
1	Wisata Rafting Air Terjun Kedabuhan	Desa Jontor
2	Wisata Ai Terjun Lea Impal	Desa Sikelang
3	Wisata Keluarga Nantampuk Emar	Desa Lae Bersih
4	Wisata Air Terjun Penuntungan (SKPC)	Desa Penuntungan
5	Wisata Tahura Lae Kombih	Desa Jontor
6	Wisata Religi Maham Syeh Hamzah Fanzuri	Desa Oboh
7	Wisata Air Terjun Lae Namo Keterahen	Desa Darul Makmur
8	Wisata Air Terjun Lae Simanuk-Manuk	Desa Pasir Belo
9	Wisata Air Terjun Silangit-Langit	Desa Singgersing

Sumber: BPS dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Pada tahun 2020, target laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dijanjikan sebesar 2,36 persen dan terealisasi 2,36 persen. Dengan capaian kinerja 100 persen dengan kategori pencapaian kinerja **Sangat Baik.** Perbandingan antara target dan realisasi indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan, dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 2.25 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Indikator "Laju Pertumbuhan kunjungan Wisatawan"

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Laju Pertumbuhan Kujungan Wisatawan	2,36	2,36	100	Sangat Baik
Tingkat Capaian				100	**Sangat Baik**

Realisasi laju pertumbuhan kunjungan wisatawan di tahun 2020, tercapai target sebesar 2,36 persen atau dengan 571 wisatawan dibanding tahun 2019 yang targetnya 2,28 persen atau 86 wisatawan dan yang terrealisasi 0,36 persen capaian kinerja 15,26 persen dengan kategori Kurang.

Untuk melihat laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dari 2019 sampai 2020 dapat dilihat dalam Grafik di bawah ini :

Grafik 2.11 Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisaawan tahun 20219 sampai dengan 2020

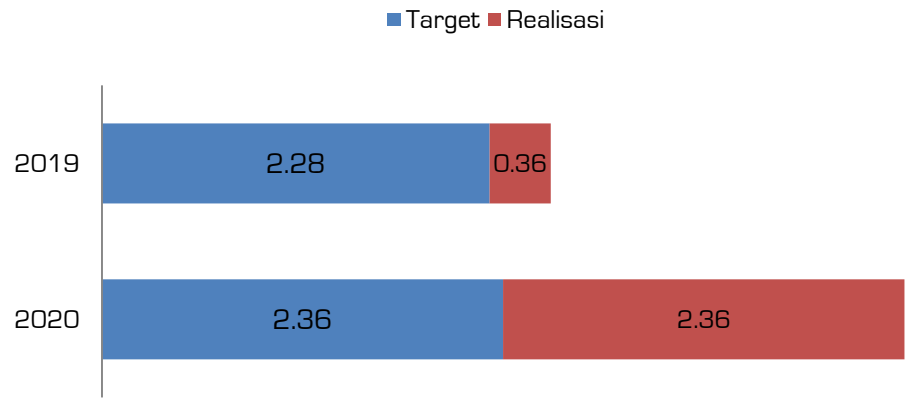

Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kota Subulussalam

Dari perbandingkan grafik capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan terjadi peningkatan laju pertumbuhan sebesar 2 persen dibandingkan dari capaian realisasi tahun 2019 yang ditargetkan 2,28 persen terrealisasi 0,36 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dalam situasi pandemi covid-19, tentunya menjadi prestasi yang positif. Mengingat hampir sekitar empat bulan antara bulan April sampai dengan Juli lokasi obyek wisatawa dilakukan penutupan untuk menghindari penyebaran kasus covid-19. Dan, mulai dibuka secara efektif kembali dipertengahan bulan agustus 2020, kebijakan pembukaan lokasi obyek wisata tetap dengan mempedomani protokol kesehatan yang ketat.

Grafik 2.12 Daftar Kunjungan Wisatawan

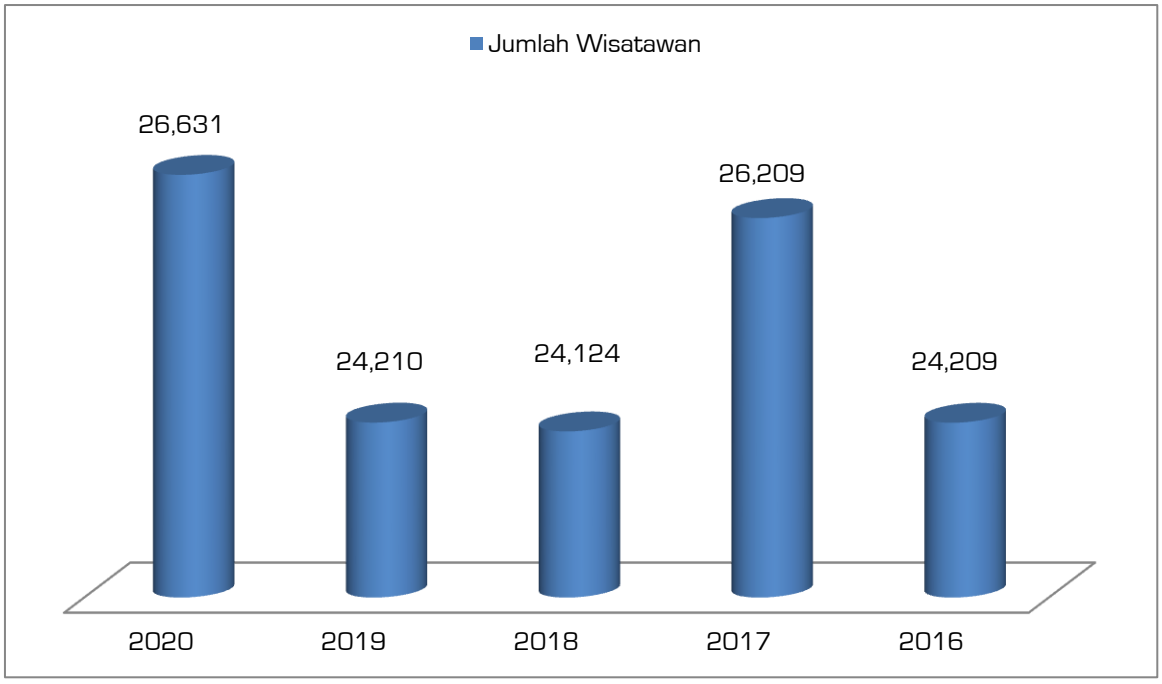

Sumber Data : Dinas Pemuda Olaraga dan Pariwisata, Kota Subulussalam
Data kunjungan wisatawan Tahun 2020, data proyeksi

Keberhasilan pada indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan, diperngaruhi oleh beberapa hal, diantaranya; animo masyarakat yang tinggi akan pemenuhan hiburan berupa rekreasi terlebih hampir lima bulan (April-Agustus) adanya pelarangan untuk mendatangi lokasi obyek wisata, obyek lokasi wisata di kota subulussalam yang didominasi dengan wisata alam yang tidak membutuhkan biaya tinggi dan cenderung gratis, minimnya lokasi obyek wisata di kota Subulussalam sehingga masyarakat haus akan rekreasi.

Gambar 2.6 Lokasi Obyek Wisata Yang Mulai diKunjungi Wisatawan

Foto: Obyek Wisata SKPC, Kecamatan Penanggalan.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan ada 6 Program dengan total anggaran Rp. 3.154.042.496.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.277.718.866,00,- atau 72,22 Persen. Capaian realisasi kinerja dan keuangan masih menunjukan efisiensi sebesar 27,78 persen.

Adapun Program yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan: Program pendukung laju pertumbuhan kujungan wisatawan diantaranya; Program Pengembangan Destinasi Pariwsiata dengan pagu anggaran Rp. 1.749.801.496,- dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 36.736.000,-. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 675.800.000, Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp, 254.500.00, Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp. 216.030.000 serta Program perencanaan sosial dan budaya Rp. 221.175.000,-

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 8 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.26 di bawah ini :

Tabel. 2.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Pertumbuhan PDRB	4,45	1,967	44,20	Kurang
Tingkat Capaian				44,20	**Kurang**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **Kurang** dengan persentase capaian sebesar 44,20 **Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah regional atau provinsi dalam kurun waktu satu tahun tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Secara umum pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan.

Table 2.27 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Subulussalam Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan
1	*2*	*3*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,99
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,92
3	Industri Pengolahan	3,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,89
6	Konstruksi	10,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reprarasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,85
8	Transportasi dan Pergudangan	-15,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,98
10	Informasi dan Komunikasi	10,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47
12	Real Estat	-3,85
13	Jasa Perusahaan	-2,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,52
15	Jasa Pendidikan	3,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,6
17	Jasa Lainnya	0,93
	Produk Domestik Regional Bruto	1,967

Sumber: BPS Subulussalam Dalam Angka Tahun 2021

Dari 17 lapangan usaha yang ada, laju pertumbuhan PDRB Kota Subulussaam memfokuskan pada 4 lapangan usaha diantaranya; sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran reprarasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor jasa persahaan.

Pada tahun 2020, target laju pertumbuhan PDRB yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan target 4,43 persen dan terrealisasi 1,967 persen dengan capaian 44,20 Persen

dengan capaian kinerja **Kurang.** Perbandingan antara target dan rialisasi indikator laju pertumbuhan PDRB, dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.28 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Indikator Petumbuhan PDRB

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Pertumbuhan PDRB	4,43	1,967	44,20	Kurang

Dari gambaran tabel diatas, laju pertumbuhan PDRB sebesar 1,967 persen belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 4,43 persen. Sehingga capaianya hanya memperoleh 44,20 persen dengan kategori Kurang.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2020, mengalami penurunan, gambaran laju pertumbuhan PDRB tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam Grafik di bawah ini;

Grafik. 2.13 Perbandingan Pertumbuhan PDRB antara Target dan Realisasi Tahun 2016-2020

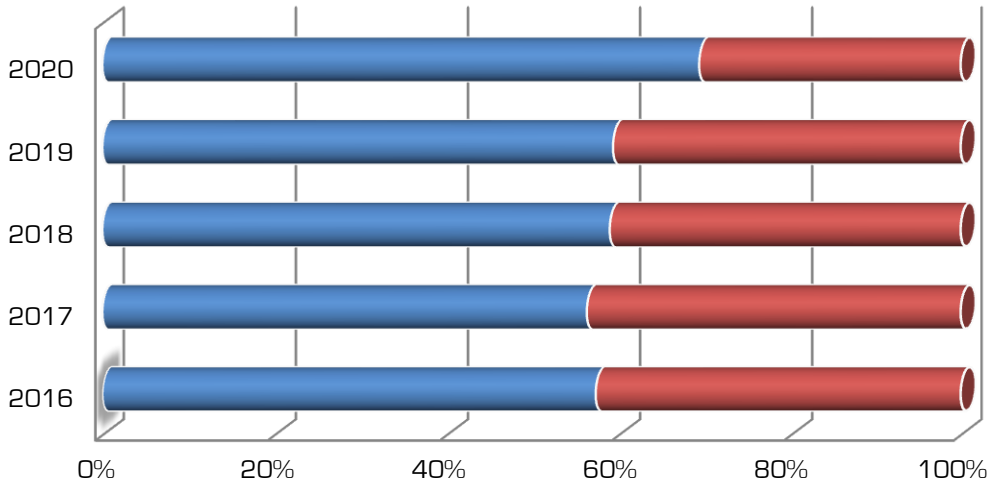

	2016	2017	2018	2019	2020
Target	6.3	6.35	6.35	6.45	4.45
Realisasi	4.69	4.93	4.42	4.42	1.967

Sumber : BPS Subulussalam dalam angka

Laju pertumbuhan PDRB, pada tahun 2020, menjadi kondisi laju pertumbuhan PDRB yang mengalami penurunan cukup drastis, dibanding dua tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dan tahun 2018. Dimana dua tahun sebelumnya telah mengalami pertumbuhan kendati tidak mencapai target direncanakan.

Tahun 2020, sebagai tahun dimana kondisi daerah yang sedang dihadapkan dengan situasi yang sulit akibat adanya kasus pendemi covid-19. Maka, untuk tahun-tahun kedepan pemerintah diharapkan dapat melakukan terbosan agar target pertumbuhan PDRB sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Subulussalam 2020-2024, tidak mengalami penurunan maupun stagnasi.

Grafik 2.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020 dengan Target RPJMD

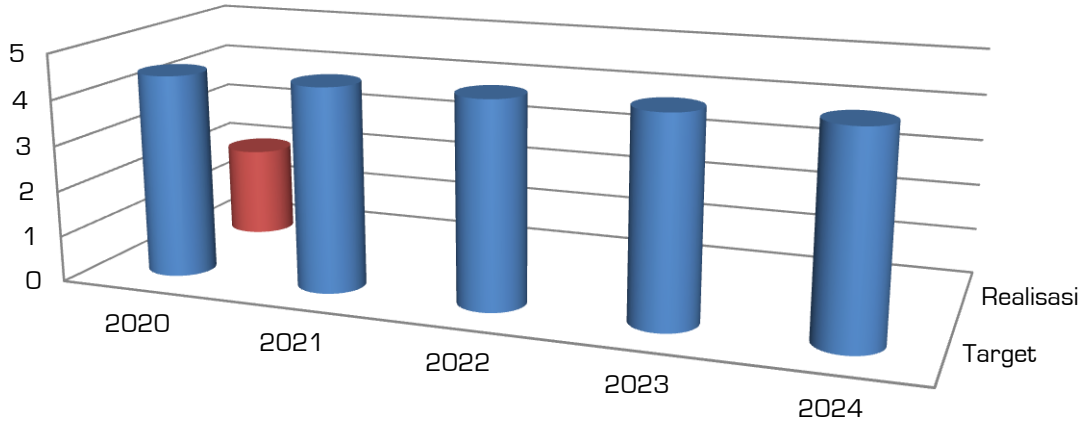

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4.45	4.46	4.47	4.47	4.48
Realisasi	1.967				

Tidak tercapainya target indikator Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2020, dikarenakan oleh beberapa hal mendasar yang terjadinya diantaranya; adanya pandemi covid-19 yang terjadi secara nasional termasuk di Kota Subulussaam, adanya pembatasan sosial/pergerakan penduduk antara kabupaten/kota baik menuju ke Kota Subulussalam maupun keluar Kota Subulussalam, menurunya sektor usaha perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa perusahaan akibat adanya pembatasan pergerakan penduduk antar kab/kota. Dan, sektor ini mengalami penurunan dibanding dua sektor prioritas lainnya, terlebih Kota Subulussalam sebagai daerah perlintasan dan banyaknya pedagang dari Kabupaten tetangga yang tidak lagi melakukan aktifitas perdagangan akibat pandemi.

Grafik 2.15 Lapangan Usaha Prioritas Pendukung Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2020

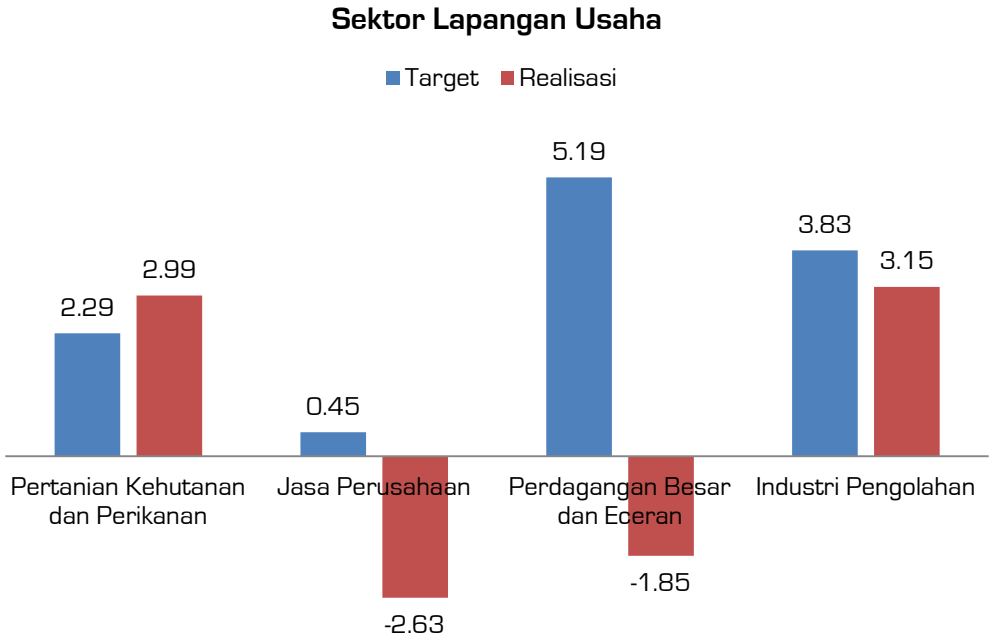

Sumber; BPS Kota Subulussalam tahun 2020

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan PDRB pada tahun 2021, antara lain; meningkatkan dukungan pemerintahan dalam meningkatan perdagangan khususnya sektor UMKM, menggerakan tujuh belas lapangan usaha selain empat yang menjadi prioritas, melaksanakan kegiatan pemerintah dengan melibatkan hotel sehingga sektor ini dapat kembali bangkit, meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal melalui pemberian pelatihan sehingga memiliki daya saing, memberikan bantuan bibit/pupuk untuk mendukung sektor pertanian dan kehutanan, melalui OPD terkait agar dapat menyusun program kegiatan pembukaan investasi bagi investor lokal/nasional.

Table. 2.29 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Simeule	4,55	4,42	4,24	4,60	0,15
Aceh Singkil	4,16	3,92	3,98	3,99	-1,16
Aceh Selatan	4,64	3,93	4,53	4,43	-0,05
Aceh Tenggara	4,24	5,03	3,26	4,23	-0,17
Aceh Timur	-1,16	4,34	4,2	4,42	1,79
Aceh Tengah	4,59	4,05	4,22	3,51	-1,21

Aceh Barat	2,92	13,23	10,14	4,99	1,87
Aceh Besar	4,05	4,01	3,78	4,35	0,31
Pidie	3,88	4,42	4,16	4,43	-0,14
Bireuen	4,04	4,23	4,22	5,00	-0,94
Aceh Utara	0,07	2,30	4,77	3,48	0,97
Aceh Barat Daya	4,56	4,46	4,61	4,75	-0,52
Gayo Lues	4,13	4,7	1,28	1,26	0,88
Aceh Tamiang	2,83	4,00	4,25	4,55	0,42
Nagan Raya	4,05	3,95	4,29	6,77	3,54
Aceh Jaya	3,89	4,00	4,04	3,75	-0,62
Bener Meriah	4,43	4,09	4,16	4,32	0,26
Pidie Jaya	3,7	5,80	4,63	4,08	1,11
Banda Aceh	5,93	3,39	4,45	4,18	3,29
Sabang	4,85	6,07	5,87	5,82	1,15
Langsa	4,49	4,43	4,33	4,39	1,06
Lhokseumawe	1,52	2,19	3,78	3,98	1,45
Subulussalam	4,69	4,93	4,42	4,42	1,97
Aceh	3,29	4,18	4.61	4,14	-0,37

Sumber BPS Subulussalam dalam agka, thaun 2021

Capaian laju PDRB Kota Subulussalam sebesar 1,967 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,45 persen. Kondisi, laju PDRB Subulussalam masih berada diatas pertumbuhan PDRB Aceh, dimana pertumbuhan PDRB Aceh sebesar -0,37 persen dan pertumbuhan PDRB nasional sebesar -2,07 persen. Perbandingan laju pertubuhan PDRB Kota Subulussalam, Aceh dan nasional dapat dilihat di table dibawah;

Grafik 2.15 Perbandingan Pertumbuhan PDRB antara Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019

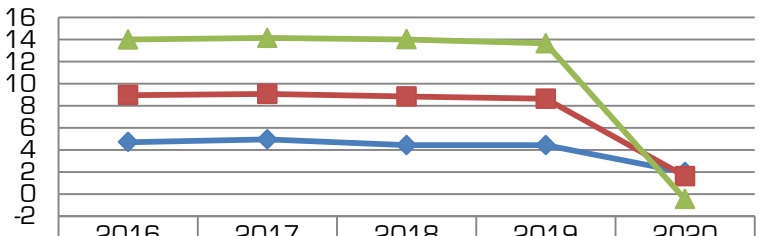

	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07
Aceh	4.26	4.13	4.4	4.2	-0.37
Subulussalam	4.69	4.93	4.42	4.42	1.967

Sumber : BPS Subulussalam dalam angka

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, ada 24 Program dengan total anggaran Rp.46.295.505.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.181.287.550.00,- atau 82,47 Persen. Capaian realisasi kinerja dan keuangan masih menunjukan kurang efisiensi sebesar -38,07 persen.

Adapun Program yang mendukung sasaran Kinerja Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, meliputi:

- Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi peternakan
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 9 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.30 di bawah ini :

Tabel. 2.30 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Penduduk Miskin	17,50 %	17,60%	99,43	Baik
Tingkat Capaian				**99,43**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **BAIK** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **99,43 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk Miskin

Tahun 2020 adalah tahun awal RPJMD Kota Subulussalam dimana tahun 2019 adalah masa transisi pergantian Kepala Daerah, dan Indikator Kinerja Persentase penduduk miskin ini menjadi prioritas daerah dalam menekan angka kemiskinan sehingga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sbulussalam 2019-2024.

Metedologi pengukuran angka kemiskinan yang digunakan adalah pengukuran BPS Kota Subulussalam dimana menggabungkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan diukur sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. lndikator Kinerja "Persentase Penduduk Miskin" ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 17,50% mampu direalisasi sebesar 17,60% dengan tingkat capaian 99,43% atau **BAIK**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama periode 2015 sampai dengan 2019 persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan hasil tren penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Perbandingan ini terlihat jelas di tahun 2015 dari angka 20,39% mengalami penurunan 0,82% di tahun 2016 menjadi 19,57% dan ternyata di tahun 2017 mengalami kenaikan 0,14% ke angka 19,71% atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 15,440 Jiwa. Kemudian ditahun 2018 sampai 2019 mengalami rata-rata 0,55% penurunan kembali seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut;

Tabel. 2.31 Penduduk Miskin Kota Subulussalam dari Tahun 2015 -2020

Tahun	Jumah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2015	15,250	20,39
2016	14,990	19,57
2017	15,440	19,71
2018	14,780	18,51
2019	14,560	17,95
2020	14,460	17,60

Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target sampai tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.32 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJM

Indikator Kinerja	**Realisasi Tahun 2020**	**Target Tahun 2021**	**Target Tahun 2022**	**Target Tahun 2023**	**Target Akhir RPJM 2024**
Persentase Penduduk Miskin	17,60	17,10	16,70	16,30	15,90

Target perencanaan kinerja untuk indikator ini memang ditetapkan sangat realistis dengan melihat sumber daya kemampuan keuangan daerah serta pemulihan ekonomi masa dan kebiasaan baru (new normal) pandemi Covid-19, selain itu target ditetapkan berdasarkan pengukuran realisasi terhadap rata-rata penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga ditetapkan target untuk menekan angka kemiskinan 0,40 % per tahun

nya, dimana di masa akhir RPJMD diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sebesar 1,6 Persen.

Persentase penduduk miskin Kota Subulussalam tahun 2020 jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, angka kemiskinan Kota Subulussalam masih relatif tinggi, dimana Angka Kemiskinan Kota Subulussalam masih di angka 19,60% sedangkan Provinsi Aceh 15,44% sementara Nasional berada pada angka satu digit yaitu 9,78%. Dan melihat angka kemiskinan di Kota Subulussalam masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 90.751 jiwa dengan penduduk miskin sekitar 14.460 Jiwa.

Grafik 2.16 Perbandingan Persentase Pendduduk Miskin dengan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional

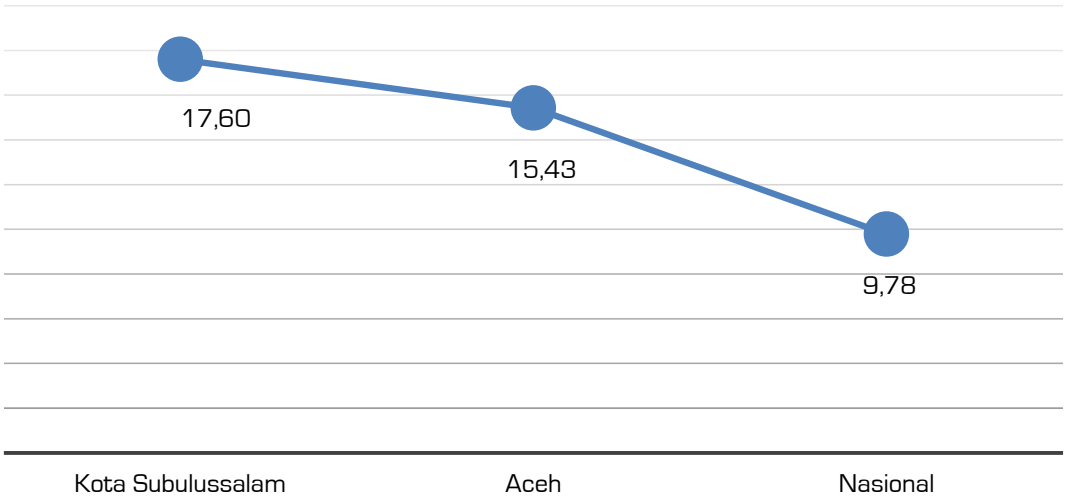

Sumber : Badan pusat Statistik (Kota Subulussalam Dalam Angka 2021) BPS Aceh dan BPS Pusat

Jika dibandingkan dengan 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, Kota Subulussalam bukan lah satu-satunya Kabupaten/Kota yang memiliki angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, masih ada beberapa Kabupaten dan Kota yang justru lebih tinggi persentasenya, untuk lebih jelasnya disajikan dalam table berikut ini;

Grafik 2.17 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2020

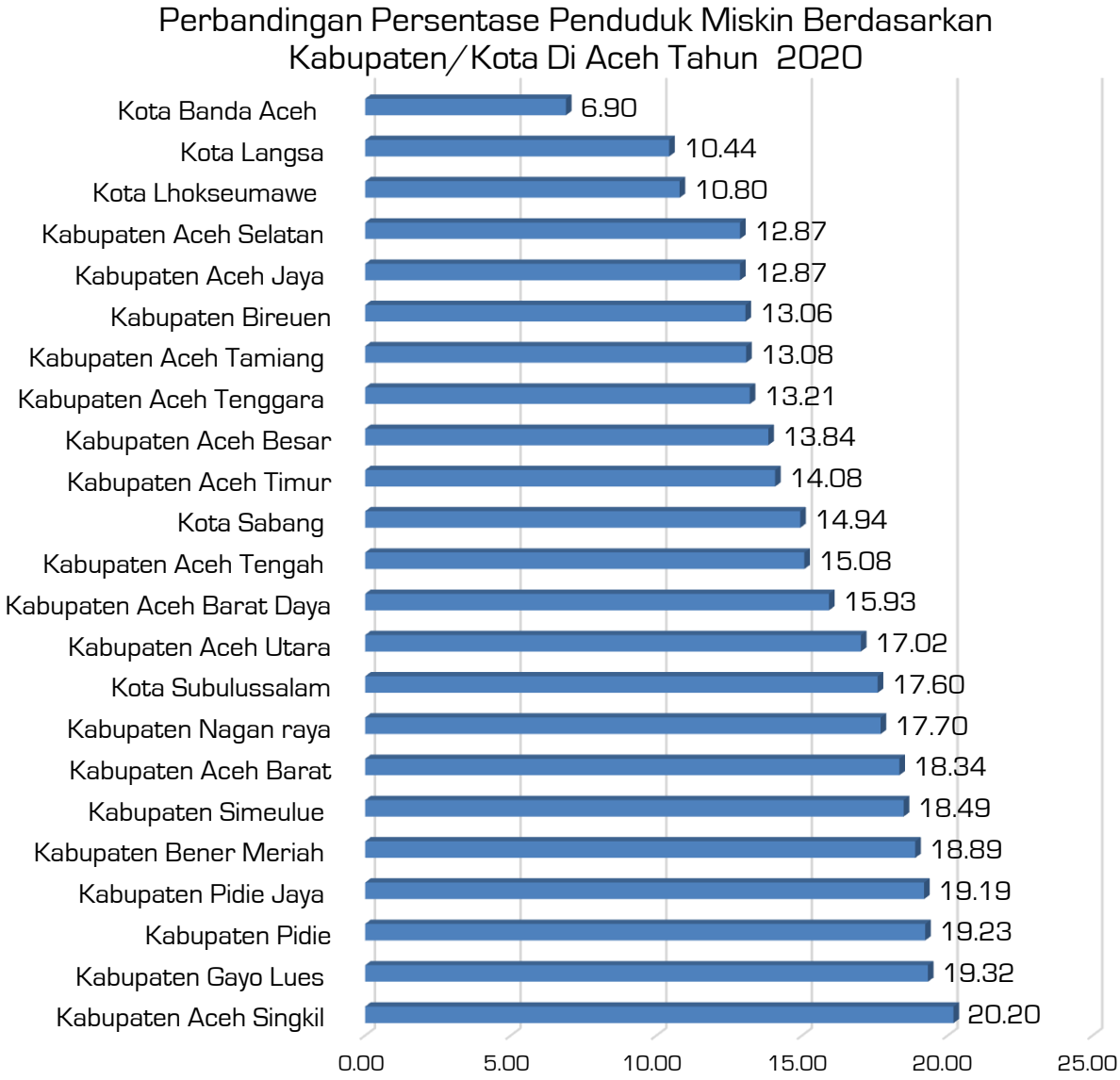

Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka 2021, BPS Aceh

Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam berada di urutan ke 15 dari Penduduk miskin yang paling terendah di Aceh yaitu Kota Banda Aceh sekitar 6,90 %, sementara Kabupaten yang paling terdekat dengan Kota Subulussalam yaitu Kabupaten Aceh Singkil memiliki Persentase Penduduk Miskin tertinggi di Aceh.

Adapun upaya Pemerintah kota Subulussalam dalam menekan angka kemiskinan di Kota Subulussalam yaitu dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang terkena

dampak langsung, mengingat di tahun 2020 masa pandemic covid-19 yang menimbulkan masalah sosial baru dan jika tidak tanggap mengatasinya tentu akan menimbulkan masalah sosial baru berupa kemiskinan baru. Berbagai upaya dilakukan dalam menekan kemiskinan selain refoussing anggaran yang lebih dikhususkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dengan pemberian bantuan, baik tunai maupun non tunai, dan pemberdayaan yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung sehingga mampu menekan angka penyebaran virus, dan berdampak positif terhadap kemampuan daya beli masyarakat t dan kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di sektor pertanian, perdagangan dan industri olahan.

Gambar 2.7 Salah Satu Program/Kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Miskin

Selain itu, Pemerintah Desa juga sangat berperan penting dalam membantu menekan angka kemiskinan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dimana setiap desa wajib memiliki satu Badan Usaha yang memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan desa yang berkontribusi secara tidak langsung dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Subulussalam.

Dari sisi ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kota Subulussalam tahun 2020 berdasarkan data BPS, masih dalam kategori ketimpangan yang moderat dengan indeks gini 0,3444 dimana berdasarkan Bank Dunia dimana ketimpangan pendapatan diukur dengan besarnya pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dimana

batasan kategori moderat adalah jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima antara 12 sampai 17 persen pendapatan.

Meskipun capain ini masih dalam kategori baik, namun Penduduk miskin masih relatif tinggi, perlu peran penting semua pihak dalam mengatasi masalah sosial ini. Dengan sistem penanganan masalah kemiskinan yang terintegrasi agar lebih cepat dapat menekan angka kemiskinan di Kota Subulussalam.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa program antara lain; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan fokus kegiatan yang lebih tepat sasaran di masa pandemi.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ***Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan*** ada 6 (enam) Program dengan Total Anggaran Rp. 3.681.013.250,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.110.672.050.00 atau **57,34** Persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini mencapai **99,43 Persen**, dan hal ini menunjukkan capaian kinerja dan keuangan masih menunjukkan efesiensi sebesar **42,09 Persen.** . Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada tabel pada lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 10

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Capaian Menurunnya Tingkat Pengangguran tergambar dari capaian 1 (satu) Indikator Kinerja dengan uraian sebagaimana disajikan dalam tabel 2.33 di bawah ini :

Tabel 2.33 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Tingkat pengangguran terbuka	7.23	6.93	104.33	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				**104.33**	**Sangat Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (dua) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Menurunnya Tingkat Pengangguran*** disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori ***Sangat Baik*** dengan persentase capaian sebesar **104.33 %**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Secara sederhana pengangguran terbuka dikatakan sebagai tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah bersungguh-sungguh mencari pekerjaan, yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur atau pencari kerja terhadap Jumlah angkatan kerja.

Korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah dua variable yang sangat erat hubungannya untuk mengukur jumlah pengangguran.

Pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kerja di kota Subulussalam sebesar 51.673 Jiwa atau 64.18 Persen dari jumlah penduduk 90.751 jiwa. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 64,25 Persen atau 52.310 jiwa dari jumlah penduduk 81.417 jiwa. Dibawah ini akan disajikan jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan Jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 2.34 Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	
1	Laki-laki	26.373
2	Perempuan	25.300
Jumlah		**51.673**

Dari tabel diatas dapat diketahui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih didomain pekerja laki-laki maskipun perbedaannya tidak terlalu siginifikan. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Kota subulussalam adalah 33.165 jiwa atau 64.18 Persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 51.673 jiwa.

Pada tabel 2.35 akan disajikan jumlah angkatan kerja dengan bekerja
Berdasarkan jenis pekerjaan

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	10.126	2.189	12.315
2	Bidang Pertambangan dan Penggalian	205	-	205
3	Bidang Industri Pengolahan	814	368	1.182
4	Bidang Listrik, Gas dan Air	56	25	81
5	Bidang Bangunan	1.020	-	1.020
6	Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	2.521	3.762	6.283
7	Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.366	47	1.413
8	Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	330	112	442
9	Tenaga Kerja di Bidang Jasa	3.969	3.957	7926
Total		**20.407**	**10.460**	**30.867**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Penduduk bekerja di Kota Subulussalam didominasi bekerja di sektor pertanian Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan disusul dengan tenaga kerja di bidang jasa kemasyarakatan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan presentase dari jumlah partisipasi angkatan kerja dengan jumlah yang telah bekerja dilapangan sebesar 2,298 jiwa atau 6.93 Persen dari jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam berdasarkan jenjang pendidikan

NO	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	Jiwa	Persen
1	Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat	292	2.81
2	Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat	349	1.3
3	Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat	1173	1.07
4	Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III	123	1.30
5	Jumlah Pengangguran Tamatan S1 (termasuk Tamatan S2)	361	0,45
Jumlah		**2.998**	**6.93**

Tren penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Subulussalam pada tahun 2020 sebesar 6.93 Persen dari target yang direncanakan sebesar 7.23 Persen jika di bandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian 7.25 Persen atau turun 0.32 Persen.

Grafik 2.18 Capaian Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam Tahun 2018-2020

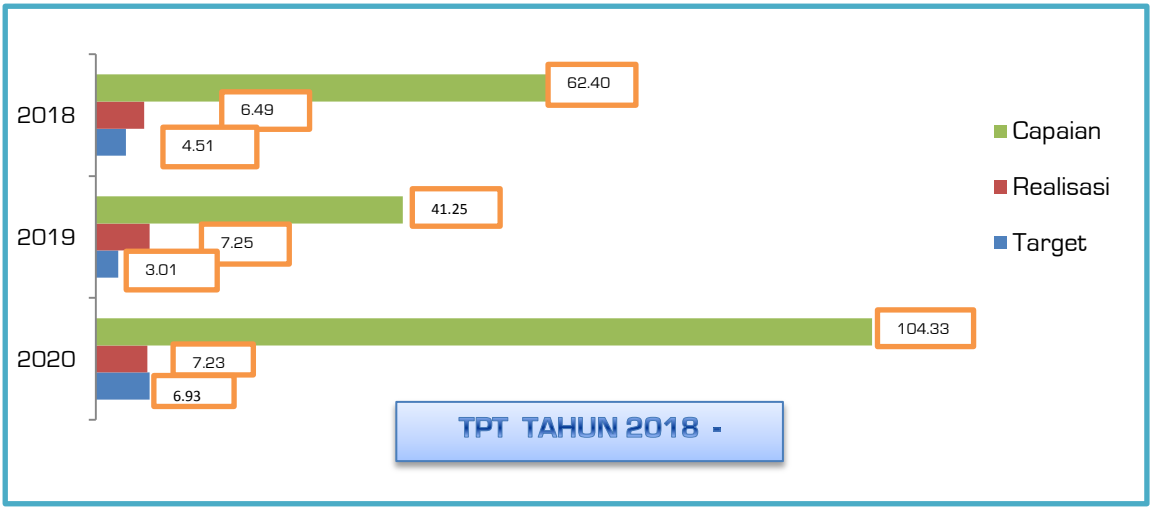

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Tingkat pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam dari tahun 2018 – 2020 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, karena pada tahun 2020 harga komuditas di sektor pertanian khususnya harga kelapa sawit relatif stabil sehingga mempengaruhi daya serap tenaga kerja. dibawah ini akan disajikan tabel nilai capaian target dan realisasi RPJMD 2019 – 2024 dengan sasaran strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 2.37 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka RPJMD 2019 - 2024

Indikator Strategis	Kondisi Awal 2019	2020		2021	2022	2023	2024	Target Akhir
		Target	Realisasi					
Tingkat Pengangguran Terbuka	7.25	7.23	6.93	7.16	6.96	6.81	6.76	6.76

Dibandingkan dengan tingkat Pengangguran terbuka Provinsi dan Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam berada pada level 6.93 atau turun 0.32 persen dari tahun 2019. Menurut data BPS Aceh Bulan Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh adalah pada level 6,59 persen ada kenaikan sebesar 0,42 persen dari tahun 2019 dan tingkat Pengangguran Terbuka Nasional berada pada level 7.07 persen meningkat 1.84 Persen dibanding dengan tahun 2019.

Grafik 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional

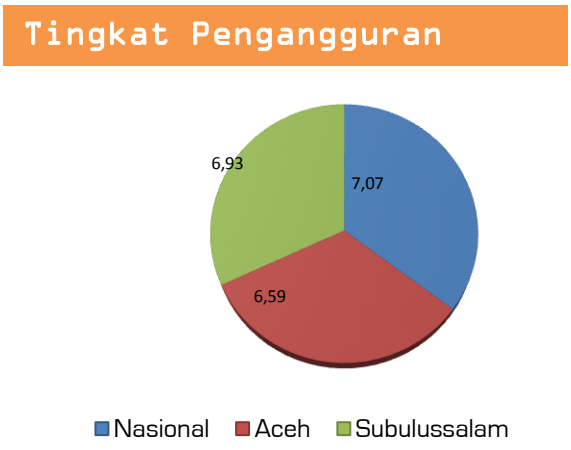

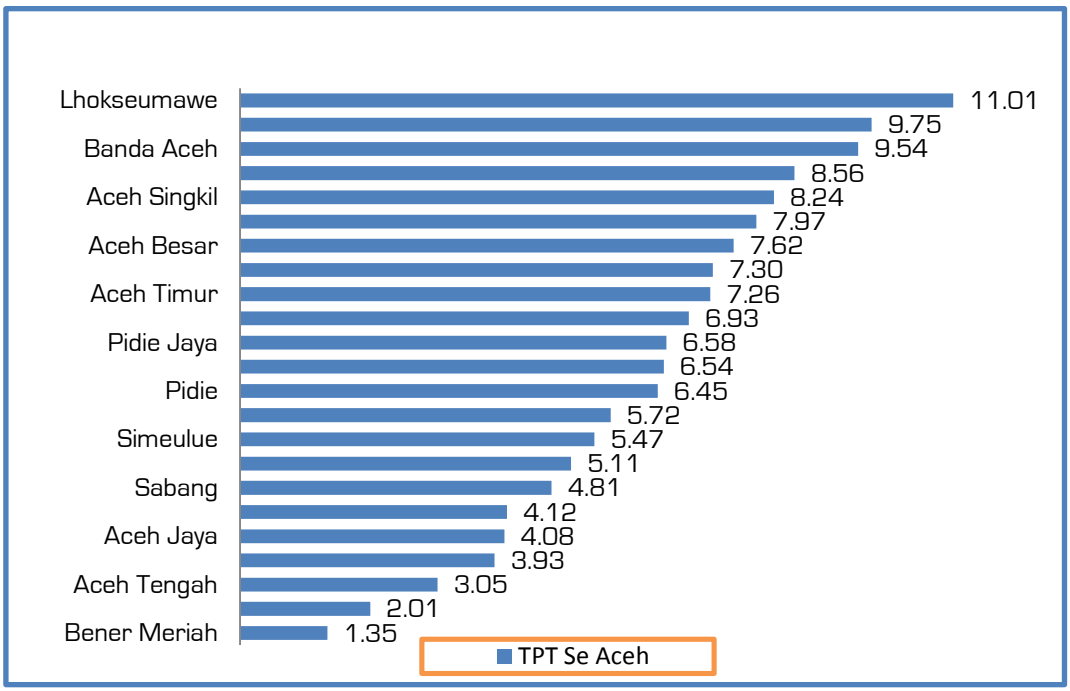

Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka 2021, BPS Aceh

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam berada di urutan ke 14 dari Tingkat Pengangguran Terbuka terendah di Aceh yaitu Bener Meriah sekitar 1.35 persen, sementara Kabupaten yang paling tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka ialah Kota Lhokseumawe sebesar 11.01 persen

Gambar 2.8 Pelatihan Berbasis Kompetensi
UPTD Balai Latihan Kerja Kota Subulussalam
Sumber Photo : Instagram BLK Kota Subulussalam

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
5. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

dengan total anggaran Rp. 20.753.926.036 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.079.723.242 atau 58.20 Persen. Capaian realisasi kinerja dan keuangan masih menunjukan efisiensi sebesar 46,13 persen. Dan untuk lebih lengkapnya rincian program per sasaran dan tingkat efektivitas akan disajikan pada table pada lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 11 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.387 di bawah ini :

Tabel. 2.38 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Nilai Akip	C/40	C/39,65	99,13	Baik
2	Opini BKP Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	100	Baik
3	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	84,5	76,94	91,05	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				**96,73**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **Baik** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **96,73 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Nilai AKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri tersebut Implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Subulussalam masih tergolong masih sangat rendah dengan perolehan nilai tahun 2020 sebesar **39,65*** atau dengan **predikat C**.

Hasil dari nilai AKIP Pemerintah Kota Subulussalam masih rendah disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di

Pemerintah Kota Subulussalam belum berjalan dengan baik dan membutuhkan perbaikan mendasar.

Tahun 2020, merupakan tahun pertama dari RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 dan pada capaian kinerja pada tahun 2020 sebagai tahun Pertama RPJMD mendapat nilai 39,65 (Nilai ini masih hasil proyeksi dan bersifat sementara sambil menunggu penyerahan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Pada tahun 2020 target kinerja yang dijanjikan pada indikator ini yaitu dengan Nilai 40 atau dengan kategori C dan realisasi hanya mampu dicapai dengan nilai 39,65 dan Predikat C dengan persentase capaian sebesar **99,13** % dengan kategori **Baik**. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.39 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Nilai Akip Tahun 2020
Pemerintah Kota Subulussalam

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Nilai Akip	C/40	C/39,65	99,13	Baik

Jika dibandingkan target dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 maka capaian kinerja pada indikator Nilai AKIP Pemerintah Kota Subulussalam ini mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang dijanjikan. Komponen Nilai Akip atas capaian kinerja dari tahun 2015 s/d 2020 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40 Komponen Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kota Subulussalam antara tahun 2015 s/d 2020

Komponen	Bobot	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	11,78	11,76	11,76	8,98	8,98	8.98
Pengukuran Kinerja	25	6,42	6,81	6,81	7,71	8,96	8.96
Pelaporan Kinerja	15	7,39	7,39	7,39	6,68	6,27	7.27
Evaluasi Kinerja	10	1,06	1,06	1,23	5,08	5,17	6.18
Capaian Kinerja	20	8,48	8,98	8,98	8,98	8,28	8.26
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**35,33**	**36,00**	**36,17**	**37,42**	**37,64**	**39.65**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**

Tabel 2.41 Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Indikator Kinerja	**Realisasi Tahun 2020**	**Target Tahun 2021**	**Target Tahun 2022**	**Target Tahun 2023**	**Target Akhhir RPJM Tahun 2024**
Nilai Akip	39,65/C*	45/CC	50/CC	55/CC	65/B

**} Proyeksi Angka Sementara*

Jika dibandingkan Nilai AKIP dari tahun 2019 sampai 2020, capaian kinerja di tahun 2019 yaitu dari target nilai 65 dengan kategori B dan hanya mampu terealisasi sebesar 37,64 dengan kategori C sedangkan ditahun 2020 adalah awal dari Tahun RPJM terbaru mengalami penurunan target menjadi 40 dengan kategori C dan mampu direalisasi sebesar 39,65 dengan kategroi C, dan dari tahun 2015 sampai akhir RPJM tahun 2019 belum pernah mencapai target yang dijanjikan meskipun secara nilai menunjukkan kenaikan perlahan setiap tahun, dari sisi kategori Nilai AKIP tetap berada pada kategori C dan di tahun 2019 sampai 2024 RPJM terbaru khususnya ditahun 2020 target diturunkan menjadi 40 dengan kategori C, seperti grafik dibawah ini :

Grafik 2.20 Nilai Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Kota Subulussalam antara Target dan Realisasi tahun 2015, 2016, 2017,2018 dan Target Akhir RPJMD 2019

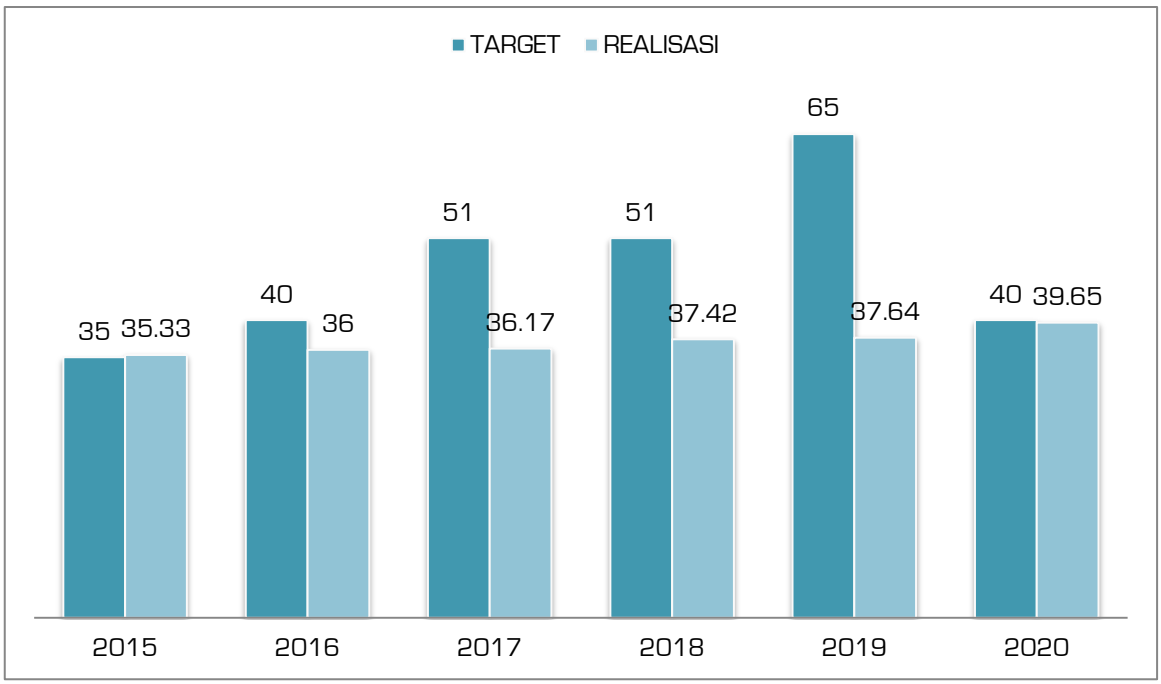

Adapun penyebab belum tercapainya capaian kinerja pada indikator ini adalah kurangya komitmen yang kuat dari pimpinan dan SKPK tentang LKj-IP untuk mengukur efektivitas sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan kota Subulussalam yang berdampak langsung manfaatnya terhadap masyarakat. Selain itu masih rendahnya pemahaman Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam terhadap perencanaan yang terintegrasi yang selaras dengan *logic model* yang jelas, pengukuran dan evaluasi kinerja sehingga menghasilkan pelaporan kinerja yang tidak sistematis, tidak terukur dan Indikator Kinerja Utama masih berorientasi pada *output* kegiatan dan bukan pada *outcome*.

Adapun program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran indikator Nilai Akip Selain itu, ketidakselarasan Program dan kegiatan dengan perencanaan sering dijumpai pada sebagian Perangkat Daerah sehingga tidak menghasilkan *outcome* yang benar-benar terukur dan berdampak pada manfaat karena belum menerapkan sepenuhnya anggaran berbasis kinerja.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Subulussalam dalam komponen pelaporan pada SAKIP adalah merumuskan regulasi melalui Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam dan Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dan sekaligus menetapkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam 188.45/72/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 - 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Adapun solusi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP yang masih rendah kedepan adalah pentingnya komitmen bersama antara Kepala Daerah dengan Tim SAKIP yaitu unsur Bapeda, Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat dan juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik, dengan mulai memperbaiki sistem AKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, capaian kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik agar menghasilkan efesiensi dan efektivitas anggaran dalam mencapai tujuan seiring dengan sasaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu pentingnya menyamakan presepsi untuk meningkatkan pemahaman tentang SAKIP untuk memulai membudayakan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan bukan berorientasi pada serapan anggaran (input) dan terlaksananya kegiatan (output).

2. Opini BKP Terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Subulussalam, melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2020 menargetkan Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Ekternal BPK dengan target WDP dan terealisasi WDP dengan persentase 100 persen mendapat kategori **Baik**.

Tabel 2.42 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Opini BKP Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2020 Pemerintah Kota Subulussalam

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Opini BKP Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP*	100*	Baik

**} Proyeksi Angka Sementara*

Untuk mewujudkan Pemerintah yang Good Government (Pemerintah yang baik), good governance (tata Pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih) dalam pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Kinerja tata kelola keuangan daerah tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam untuk tahun 2020 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.43 Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJM Tahun 2024
Opini BKP Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Jika dibandingkan dengan sebelumnya selama periode 2015 sampai dengan 2019 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam Flukluatif, pada Tahun 2015 mendapat Kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan 2016 sampai dengan 2018 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara di tahun 2019 sampai 2020 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tergambar dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2.21 perbandingan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan*
dari tahun 2015 - 2019

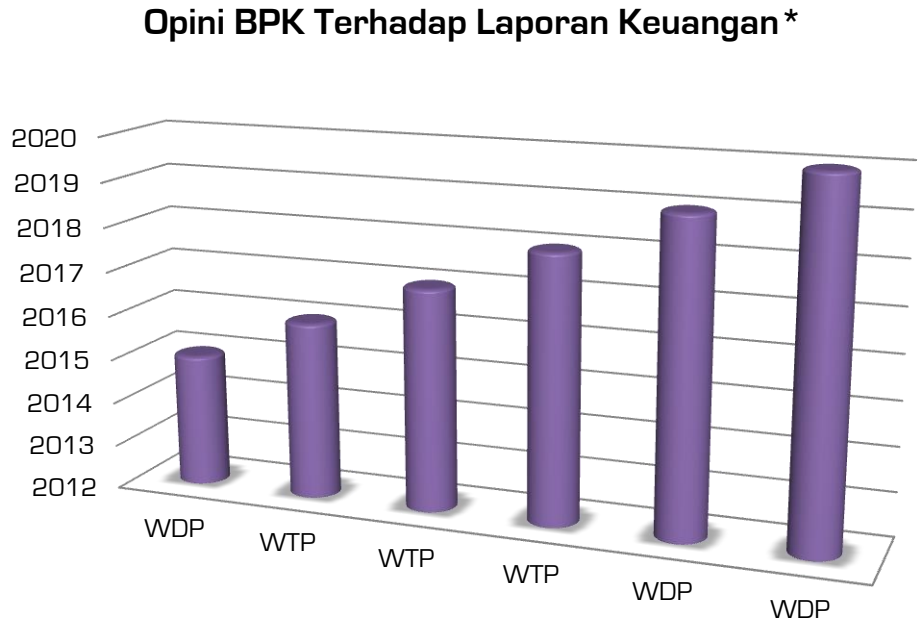

Dari grafik diatas dapat kita simpulkan Pemerintah Kota Subulussalam harus Mengambil langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan dalam mempertahankan opini laporan keuangan dari WDP agar menjadi WTP yaitu dengan Penyusunan Laporan keuangan tepat waktu, Penataan dan pendataan aset deareh secara lebih baik dan Penggunakan sistem aplikasi yang dimulai dari sistem perencanaan pembangunan hingga sistem laporan kinerja.

Sebagai bahan gambaran capaian kinerja opini laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam, dari tahun 2015 s/d 2020 dapat dilihat di tabel dibawah;

Tabel 2.44 Capaian Opini Laporan Keuangan BPK dari tahun 2015 sampai 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa opini laporan keuangan pemerintah Kota Subulussalam, dari tahun 2015 menunjukan trend yang positif. Dengan ditandai peningkatan prestasi yang di mulai dari tahun 2016, 2017 dan 2018 memperoleh WTP (wajar tanpa pengecualian), sedangkan akhir RPJM tahun 2019 sampai dengan awal RPJM baru tahun 2020 memperoleh WDP (wajar Dengan pengecualian).

Keberhasilan capaian opini laporan keuangan dengan opini WTP, didukung oleh beberapa hal diantaranya ;

- Ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Akuntansi, yang memuat tentang pengaturan tata kelola keuangan daerah;
- Tertatanya penghitungan aset daerah secara baik.

3. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Subulussalam mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu satu Pintu (DPMP2TSP) Kota Subulussalam untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan penanaman modal, dan hasilnya memperoleh nilai 76.94 dengan Nilai mutu pelayanan kategori B dengan Kinerja unit pelayanan adalah Baik. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat ditargetkan dengan nilai 84.05 dan dapat terealisasi sebesar 76.94 atau turun sebesar 6.16% dari tahun 2019 dengan realisasi 83.10.

Grafik 2.22 Capaian nilai Survey kepuasan masyarakat tahun 2020

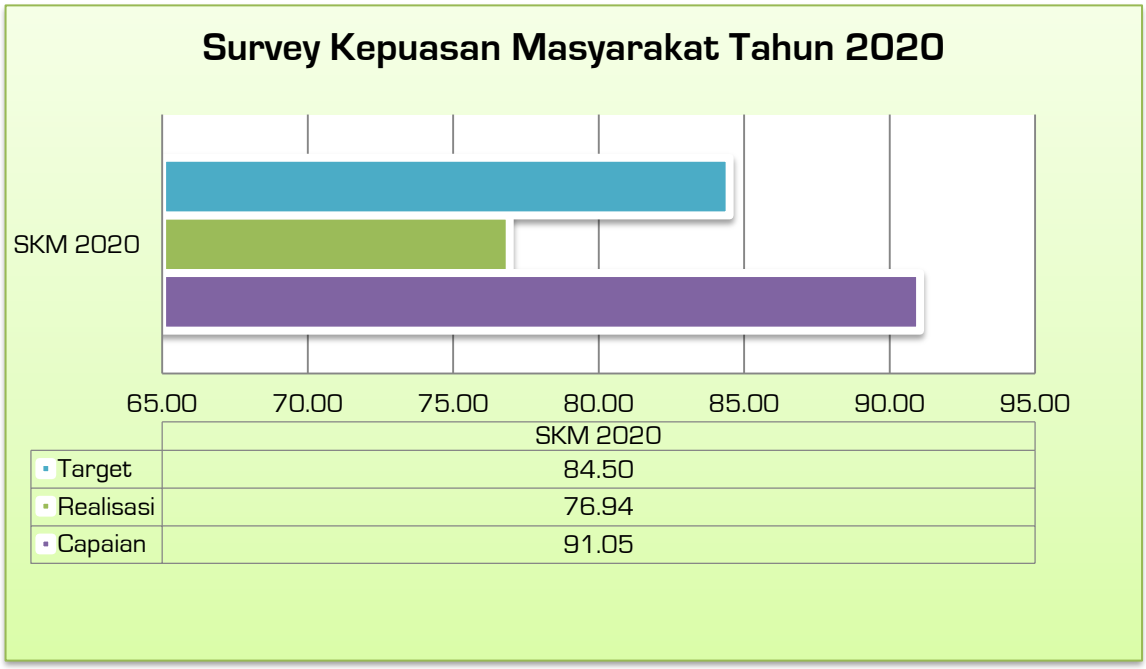

Dari grafik diatas, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang telah melakukan survey terhadap kepuasan layanan yang dilakukan pada tahun 2019 dan tahun 2020. untuk tahun 2019 Survey Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 90 dengan realisasi sebesar 83.10 sedangkan di tahun 2018 tidak ada pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan menurun sebesar 6.16% dari tahun 2019. Meskipun menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah masih baik.

Grafik 2.23 Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah tahun 2018 - 2020

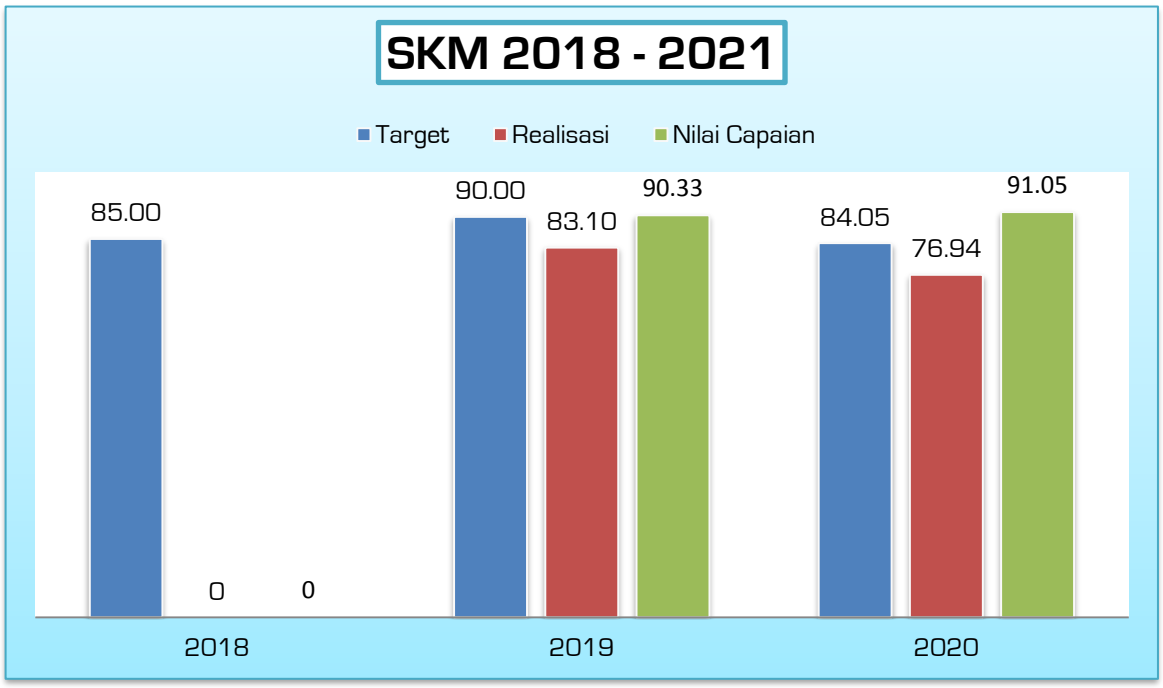

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang didampingi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Subulussalam untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Selain itu, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah mulai menerapkan Standar Operasional Prosedur dan juga Standar Pelayanan dalam pengurusan perizinan, Untuk upaya peningkatan kinerja kedepan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah melakukan Inovasi dan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Gambar 2.9 Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gambar XX. Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Di tahun mendatang, Survey kepuasan masyarakat bukan hanya pada layanan perizinan saja bahkan bisa menyentuh OPD lain yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti RSUD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan OPD lainnya. Sehingga upaya perbaikan layanan masyarakat kedepan bisa lebih baik, mudah dan cepat.

Sebagai upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022 mendatang Pemerintah Kota Subulussalam berkomitmen dan telah merencanakan pembangunan Mal Pelayanan Publik, dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sehingga harapan masyarakat terhadap pelayanan publik lebih terintegrasi dalam satu atap sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik** ada 32 Program yaitu :

1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
2. Program kerjasama informasi dengan mas media
3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur bidang kesehatan
9. Program Penataan Administrasi Kependudukan
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
12. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
14. Program pendidikan politik masyarakat
15. Program pengembangan wawasan kebangsaan
16. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
17. Program peningkatan disiplin aparatur
18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
19. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
22. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
23. Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat
24. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27. Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan
28. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
29. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
30. Program perencanaan pembangunan daerah
31. Program perencanaan pembangunan Pemerintahan
32. Program Lanjutan

Dengan Total Anggaran Rp. **121,284,332,608,00** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **121,128,737,223,00** atau **99,87** Persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini hanya **96,73** Persen, dan capaian kinerja dan keuangan masih menunjukkan inefisiensi sebesar **3,14** Persen. Dan untuk lebih lengkapnya akan disajikan pada tabel pada lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 12 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.45 di bawah ini :

Tabel. 2.45 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Konektivitas Layanan Angkutan	55,55 %	55,55%	100	Baik
2	Persentase rata-rata Nilai Keselamatan LLAJ	10,10	10,10	100	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				**100**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan jalan ,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **BAIK** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **100 Persen.**

Dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Persentase Konektivitas Layanan Angkutan

Tahun 2020 adalah tahun awal RPJMD Kota Subulussalam dimana tahun 2019 adalah tahun transisi pergantian Kepala Daerah, kondisi awal Indikator persentase konektivitas Layanan Angkutan ini berada pada posisi 55 % .

lndikator Kinerja "Persentase Konektivitas Layanan Angkutan " ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 55,55% mampu direalisasikan sebesar 55,55% dengan tingkat capaian 100% atau BAIK.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0,55 % konektivitas lalu lintas angkutan jalan di lingkungan Kota Subulussalam.

Tabel 2.46 Sebagai perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJM 2024
persentase rata-rata Nilai Keselamatan Lalu Lintas Jalan Angkutan	55,55	56,11	56,67	57,23	57,81

Konektivitas layanan angkutan saat ini adalah transportasi berbasis jalan dengan kinerja pelayanan angkutan kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena ada beberapa desa di wilayah kota Subulusalam yang belum mendapatkan layanan angkutan dari pemerintah. Layanan angkutan penumpang dalam kota hanya memiliki 7 trayek yang melayani tujuan dari pusat kota yang berada di Kecamatan Simpang Kiri ke kecamatan-kecamatan yang ada di kota subulussalam dengan armada yang sangat terbatas.

Layanan angkutan yang dominan adalah angkutan mandiri dari masyarakat berupa becak motor dan sepeda motor atau ojek. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Subulusalam terus berupaya untuk meningkatkan konektivitas layanan angkutan di seluruh kecamatan yang ada khususnya untuk membantu para pelajar yang berada di desa-desa terpencil, hal ini dilakukan dengan menambah rute trayek bus sekolah yang ada dan menambah jumlah armada angkutan bus sekolah dan angkutan pedesaan perintis.

Gambar 3.10 Moda Angkutan Bus Sekolah Kota Subulussalam

2. Persentase Rata-rata Nilai Keselamatan Jalan

Kondisi awal Indikator persentase rata-rata nilai keselamatan jalan berada pada posisi 10%. lndikator Kinerja "Persentase rata-rata Nilai Keselamatan jalan " ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 10,10% mampu direalisasikan sebesar 10, 10% dengan tingkat capaian 100% atau BAIK.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0,10 % persentase rata-rata Nilai Keselamatan Lalu Lintas Jalan Angkutan.

Tabel 2.47 Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut;

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJM 2024
persentase rata-rata Nilai Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	10,10	10,20	10,30	10,41	10,51

Kota Subulussalam merupakan kota yang sedang dalam tahapan pembangunan dan merupakan daerah perlintasan dan transit dari jalur Lintas Barat Selatan Aceh menuju Kota Medan Sumatera Utara dengan kondisi lalu lintas di jalur Lintas Barat yang merupakan jalan

Negara dalam keadaan ramai lancar. Keselamatan harus menjadi prioritas bagi para pemakai jalan khususnya pemakai kendaraan angkutan jalan. Tren kecelakaan yang merenggut nyawa di wilayah kota Subulussalam tidak mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Kecelakaan yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh faktor pengguna jalan dan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan atau kelebihan muatan.

Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas Perhubungan terus berupaya untuk meningkatkan keselamatan angkutan jalan melalui berbagai program dan kegiatan di antaranya:

- Kegaiatan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang
- Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan Raya
- Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
- Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan
- Pengawasan lalu lintas angkutan Jalan
- Penciptaan kenyamanan Pelayanan angkutan lebaran
- Penciptaan kenyamanan pelayanan angkutan natal dan Tahun Baru, dan
- Inventarisasi Kelengkapan fasilitas Keselamatan lalu Lintas Angkutan Jalan

Gambar 2.11 Salah Satu Program/Kegiatan Penyerahan Helm Gratis kepda para Supir Becak

Adapun program yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya peresentase rata-rata Nilai keselamatan angkutan lalu lintas jalan ada 7 (tujuh) Program yaitu Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program perencanaan Pembangunan Daerah rawan bencana, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ,Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalulintas angkutan dengan total Angaran sebesar Rp. 14.339.967.749.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.969.602.111.49 atau 62,54 persen dan jika dibandingkan dengan realiasi capaian kinerja maka terjadi efisiensi anggaran yaitu sebesar 37,46 persen dan untuk lebih lengkapnya rincian Program persasaran dan tingkat efektivitas akan disajikan pada tabel pada lampiran III

SASARAN STRATEGIS 13

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Syariat Islam

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 13 (empat belas) ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.47 di bawah ini :

Tabel 2.48 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Indeks Melek Al-qur'an	77,43	76,03	98,19	Baik
Tingkat Capaian				**98,19**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Syariat Islam,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **Baik** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **98,19 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indeks Melek Alqur'an

Indeks Melek Al-qur'an merupakan salah satu indikator kinerja yang menjadi sasaran strategis dari RPJMD Kota Subulussalam tahun 2019-2024. Ada beberapa upaya yang di lakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam untuk meningkatkan indeks melek al-quran di Kota Subulussalam di antaranya mengaktifkan pengajian-pengajian di meunasah dan balai pengajian baik tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa.

Pada kondisi awal tahun 2019, capaian indeks melek al-qur'an Kota Subulussalam berada pada nilai indeks 75,82. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan nilai indeks melek al-qur'an menjadi 76,03, ada peningkatan nilai indeks sebesar 0,21%.

Indeks Melek Al-qur'an di Kota Subulussalam dari tahun 2019-2020 mengalami Peningkatan sehingga target akhir dari RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 terkait indikator sasaran ini dapat tercapai. Keberhasilan peningkatan Indeks Melek Al-quran Kota Subulussalam tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Subulussalam khususnya Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam melalui program antara lain :

- Program Silaturahmi Umara Dan Ulama
- Program Peningkatan Pembinaan Syariat Islam
- Program Pengawasan Syariat Islam
- Program Pengamanan Penegakan PERDA
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

Selain itu Pemerintah Kota Subulussalam juga mengadakan kegiatan Festival Anak Shalih Indonesia (FASI) untuk meningkatkan kualitas peserta didik dan memotivasi peserta didik dan pengajar untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca al-qur'an. Sehingga nilai indeks melek al-qu'ran di Kota Subulussalam dapat mencapai target yang telah di tetapkan.

Gambar 2.12 Kegiatan Festival Anak Shalih Indonesia (FASI) di Kota Subulussalam
Sumber Photo : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pemerintah Kota Subulussalam terus berkomitmen akan terus meningkatkan indeks melek al-qur'an Kota Subulussalam hal ini tertuang dalam target RPJMD Kota Subulussalam tahun 2019-2024,

Tabel 2.49 Target Indeks Melek Al-quran Kota Subulussalam dalam RPJMD 2019-2024

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2019	2020		2021	2022	2023	Target Akhir 2024
		Target	Realisasi				
Indeks Melek Al-qur'an	75,82	77,43	76,03	78,52	79,83	81,14	82,36

Dapat di lihat pada tabel di atas di harapkan pada akhir RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 indeks melek alqur'an Kota Subulussalam di targetkan mencapai nilai indeks 82,36. Untuk meningkatkan indeks melek alqu'an di Kota Subulussalam selain dari Program

yang di rencanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam di harapkan juga peran aktif dari orang tua untuk sadar akan pentingnya kemampuan membaca al-qur'an bagi anak-anak mereka.

Adapun program yang menunjang pencapaian sasaran ***Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Syariat Islam*** ada 5 (lima) Program dengan total anggaran Rp. 11.120.472.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.120.372.000,00 atau 99,99 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini mencapai 98,19 persen dan hal ini menunjukan kinerja dan keuangan masih menunjukan tingkat inefesiensi 1,80 persen. Untuk lebih lengkapnya rincian program per sasaran dan tingkat efektifitas akan disajikan pada lampiran III.

SASARAN STRATEGIS 14

Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 14 ini, ditetapkan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.49 di bawah ini :

Tabel. 2.50 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Penyaluran Zis Terhadap Golongan Penerima Zis	69,82%	69,82%	100	Baik
Tingkat Capaian				**100**	**Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Strategis ***Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat,*** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja mendapat kategori **BAIK** dengan persentase rata-rata capaian sebesar **100 Persen.**

Dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Persentase Penyaluran Zis Terhadap Golongan Penerima Zis

Persentase Penyaluran Zis adalah salah satu indikator baru dalam RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 untuk mendukung visi-misi Walikota terbaru "Kota Subulussalam Sejahtera dan Islami. Pada tahun 2019 persentase penyaluran Zis terhadap golongan penerima Zis sebesar 68,53 persen dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 69,82 persen dari total penerimaan Zis yang di himpun oleh Baitul Mal Kota Subulussalam pada tahun 2020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

Dapat kita saksikan pada tabel di bawah perbandingan persentase penyaluran Zis terhadap golongan penerima Zis:

Tabel. 2.51 Persentase Penyaluran Zis Terhadap Golongan Penerima Zis

Tahun	Persentase	Persentase Kenaikan
2019	68,53 %	1,29 %
2020	69,82 %	

Sebagai Perbandingan atas capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja dari tahun 2020 dan target sampai tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.52 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target di RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJM 2024
Persentase Penyaluran Zis Terhadap Golongan Penerima Zis	69,82 %	70,43 %	72,5 %	73,68	75,14

Diharapkan pada masa akhir RPJM tahun 2024 mampu meningkatkan Persentase Penyaluran Zis terhadap Golongan Penerima Zis sebesar 75,14 Persen. Sehingga penyaluran zis di Kota Subulussalam semakin optimal dan dapat menyentuh seluruh masyarakat Kota Subulussalam yang membutuhkan.

Ada beberapa kendala penyaluran Zis kepada golongan penerima Zis yaitu :

1. Kurangnya SDM yang memadai sehingga pengumpulan dan penyaluran Zis kurang optimal.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Zis melalui Baitul Mal.

3. Adanya pendemi Covid-19 yang membuat pendapatan masyarakat menurun
4. Data lapangan yang kurang valid

Untuk dapat meningkatkan persentase penyaluran Zis pada tahun 2021 perlu di lakukan :

1. Perencanaan yang baik
2. Peningkatan petugas lapangan yang mengimpun dan yang menyalurkan Zis
3. Mengupdate dan memverifikasi data masyarakat golongan penerima Zis
4. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder terkait

Gambar 2.13 Wali Kota Subulussalam, bersama Ketua Baitul Mal Kota Subulussalam memberikan bantuan zakat kepada 15 dayah di Subulussalam
Selasa 12/01/2021
Sumber: Humas dan Protokol Setdako Subulussalam

Berikut dapat di lihat perbandingan persentase Penyaluran ZIS Terhadap Golongan Penerima ZIS Kota Subulussalam dengan Provinsi Aceh :

Grafik 2.24 perbandingan persentase penyaluran ZIS terhadap golongan penerima ZIS

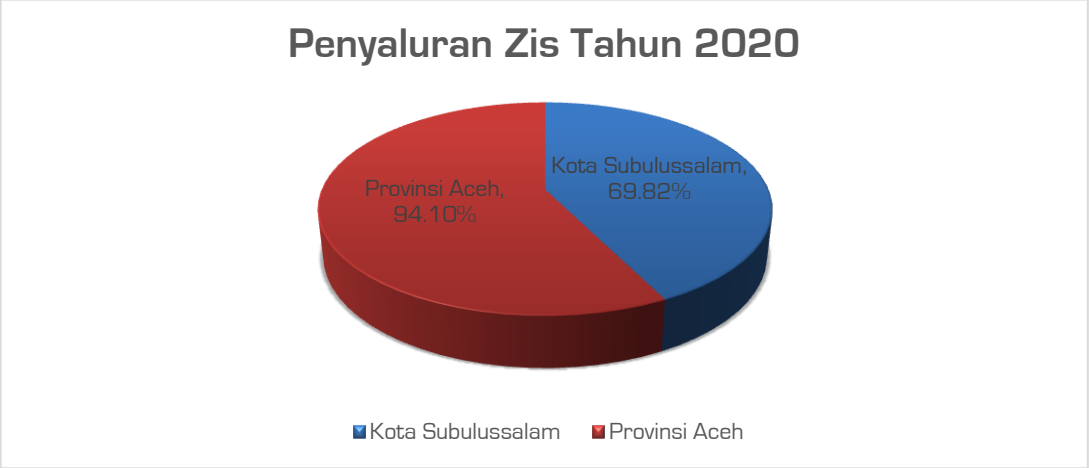

Dapat kita lihat pada grafik di atas perbandingan persentase penyaluran zis terhadap golongan penerima zis Kota Subulussalam masih jauh di bawah Provinsi Aceh yang telah mencapai persentase 94,10 %. Perlu upaya-upaya yang konkrit dari Pemerintah Kota Subulussalam dan Baitul Mal Kota Subulussalam dalam meningkatkan persentase penyaluran zis seperti yang di sampaikan di atas.

Untuk mencapai seperti Provinsi Aceh mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama cukup fokus terhadap target RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024, apabila target akhir dari RPJMD tersebut dapat terealisai maka dapat di lakukan kenaikan Target untuk RPJMD Kota subulussalam yang akan datang

Adapun Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ***Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam*** ada 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Dan Pengembangan Pendidikan, Litbang, Dan Ekonomi Ummat serta Program Peningkatan Peran dan Sumber Daya Ulama Dalam Pembangunan dengan Total Anggaran Rp.4.865.307.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.764.877.500,00 atau **97,94** Persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini mencapai **100 Persen**, dan hal ini menunjukkan capaian kinerja dan keuangan masih menunjukkan efisiensi sebesar **2,06 Persen.** Dan untuk lebih lengkapnya Rincian Program Per Sasaran dan Tingkat Efektivitas akan disajikan pada tabel pada lampiran III.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran tahun 2020 Pemerintah Kota Subulussalam yang disahkan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sebesar Rp. 457.503.348.137 dan terealisasi sebesar Rp. 363.757.059.922 atau 79,81.

Secara akumulatif capaian keuangan Pemerintah kota Subulussalam menunjukkan efesiensi sebesar 15,75% Rincian Program dan Anggaran dan TIngakt efektifitas dilampirkan dalam lampiran III.

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Subulussalam merupakan hasil pengukuran dari 14 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja yang telah di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan membandingkan realisasi dan target kinerja masing-masing, pengukuran kinerja masing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut;

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis yang sudah dijanjikan. Tahun 2020 merupakan awal tahun RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 dari capaian Indikator Kinerja utama (IKU) dari Tahun 2019-2024 menunjukkan perkembangan kinerja dan secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan, meskipun masih terdapat beberapa sasaran belum mencapai target maksimal dan beberapa indikator masih menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat efesiensi, hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatkan Pemerataan dan Aksesibilitas dalam rangka Pelayanan Pendidikan	Rata Lama Sekolah	7,88	7,84	100,2	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	14,48	14,61		
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	63,80	64,02	100,34	Sangat Baik
3	Meningkatkan derajat kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,06	85,06	100	Baik
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50	62,69	95,71	Baik
5	Meningkatnya infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi	Persentase Jalan Kondisi Baik	34,58	34,62	100,12	Sangat Baik

6	Meningkatnya akses rumah layak huni	Persentase Jumlah rumah layak huni	90,55	90,51	99,96	Baik
7	Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan	Persentase Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	2,36	2,36	100,00	Baik
8	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB	4,43	1,967	44,40	Kurang
9	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	17.50	17,60	99,43	Baik
10	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,23	6,93	104,33	Sangat Baik
11	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	40,00/C	39,65	96,73	Baik
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP		
		Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	84,50	76,94		
12	Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan	Persentase Konektivitas Layanan Angkutan	55,55	55,55	100	Baik
		Persentase Rata-rata Nilai Keselamatan LLAJ	10,10	10,10		
13	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Melek Al-Qur'an	77,43	76,03	98,19	Baik
14	Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat	Persentase penyaluran ZIS terhadap golongan penerima ZIS	69,82	69,82	100	Baik
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					**95,25**	**Baik**

Capaian kinerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020 secara keseluruhan dinyatakan dalam kategori "BAIK", karena capaian rata-rata kinerja menunjukkan angka 95,25 % dari target. Dari 14 Sasaran Strategis ada 4 (empat) Sasaran yang menunjukkan capaian kinerja diatas 100% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan ada 9 (sembilan) Sasaran dengan kategori capaian "BAIK" dengan capaian diatas 76% sampai dengan 100%, dan ada satu Sasaran Strategis masih dalam kategori "KURANG" karena pencapaiannya hanya dibawah 55%.

Capaian keuangan tahun 2020, ada 140 Program dan berbagai kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Kota Subulussalam Tahun 2020 dengan alokasi Anggaran Sebesar Rp. 457.503.348.137,00 direalisasikan sebesar Rp. 363.757.059.922,49 atau 79,51 Persen. Jika dibandingkan capaian kinerja dan capaian keuangan tahun 2020 Pemerintah Kota Subulussalam mampu melakukan efesiensi sebesar 15,75 Persen.

Meskpun capain kinerja Pemerintah Kota Subulussalam masuk dalam kategori baik secara akumulatif namun masih menunjukkan tingkat pencapaian secara keseluruhan terhadap Indikator Kinerja yang masih terkendala pada penerapan sistem akuntabilitas kinerja, belum sinkronnya antara sasaran dan program pendukung serta sumber daya aparatur yang masih sangat rendah

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik, dengan memulai mengoptimalisasi sistem AKIP khususnya di komponen perencanaan di pada RPJM Kota Subulussalam 2019-2024, pengoptimalan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu peningkatan kapasitas aparatur dalam meningkatkan pemahaman aparatur dalam penerapan SAKIP.

BAB III

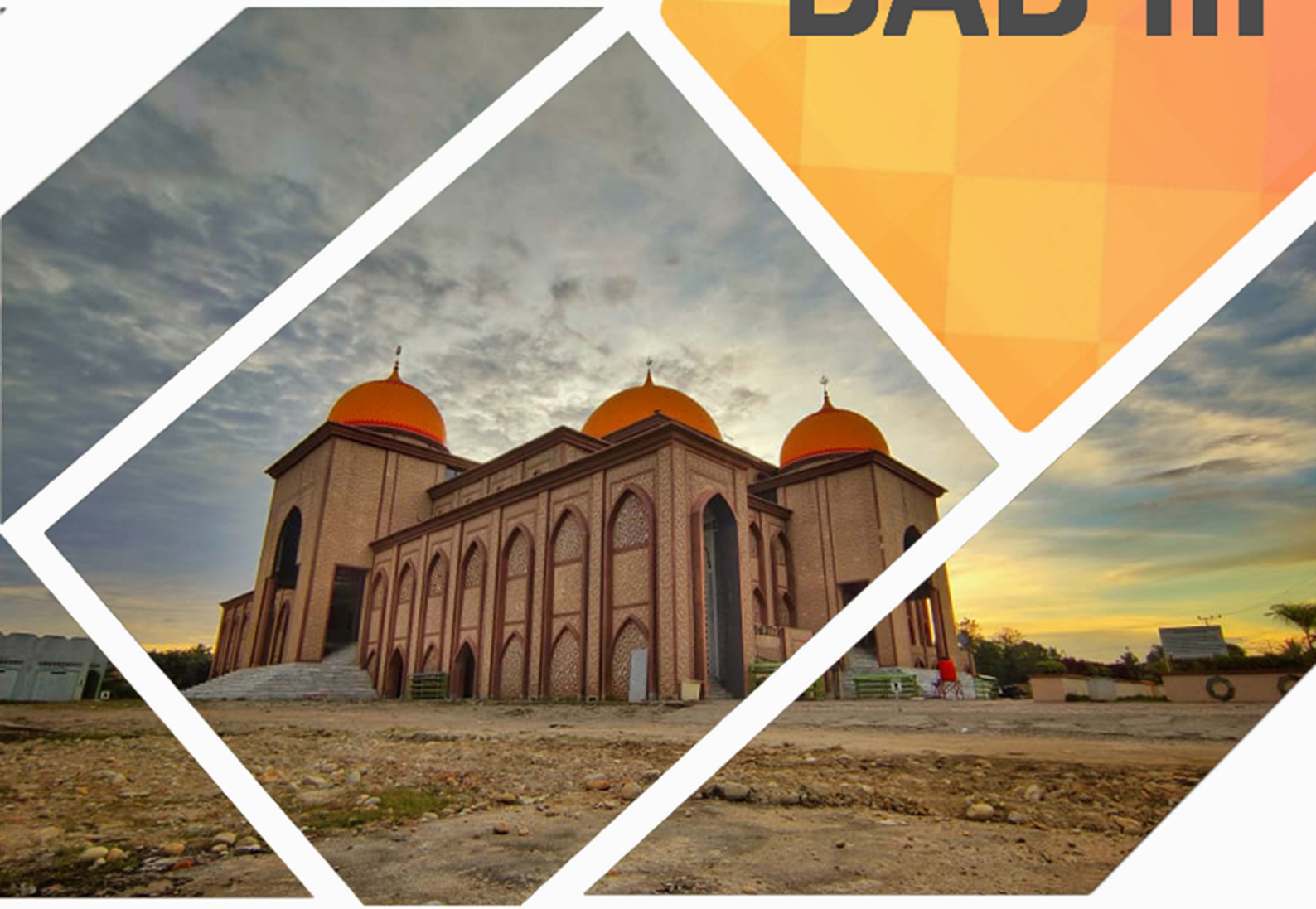

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan Surat Pengesahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 090.02.4.065610/2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah

Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

3. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
   1. Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik
   2. Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat/Gudang

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1. Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik

   Kegiatan ini berupa Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapsitas Logistik
2. Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat/Gudang

   Kegiatan ini berupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat/Gudang

5. Sumber, Jumlah dan Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1. Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik
2. Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat/Gudang

Anggaran untuk program diatas adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.764.360.000,- atau 92,15% dan Realisasi Fisik kegiatan ini 100%.

Anggaran program ini terserap untuk Kontruksi Fisik pasar rakyat Rundeng (1 paket), konsultan pengawas pembangunan Pasar Rakyat Rundeng (1 Paket) dan Administrasi Kegiatan Penunjang.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Perangkat daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan adalah:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

7. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 20 orang sebagai penyelenggara tugas pembantuan.

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan secara umum sudah memenuhi standar pelayanan minimal

9. Permasalahan dan Solusi

Secara umum kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tanpa ada kendala yang berarti.

Tabel 3.1

Laporan Progres Paket Fisik TP APBN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Edisi : Bulan Desember Tahun 2020

No	Nama Paket	Metode Pelaks Pkt	Lokasi (Desa,Kec,Kab)	Nama PPK	Nilai Kontrak (Rp. M)	Waktu		Rekanan	Progres %		Status			
						Mulai	Selesai		Keu	Fis	Blm Kontrak	Sdh Kontrak	Proses Pelaks	Selesai
	Satker disperindakop dan UKM : 2 Pkt				2.679.700.000									
1	- Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Rundeng (1 paket)	Tender	Desa Pasar Rundeng, Kec Rundeng	Skar Fharaby,ST	2.580.700.000	29/09/2020	23/12/2020	PT. CIPUTHA PRATAMA	100,00	100,00			H	
2	- Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Rundeng (1 Paket)	PL	Desa Pasar Rundeng, Kec Rundeng	Skar Fharaby,ST	99.000.000	29/09/2020	23/12/2020	PT. KLAPERON REKA CIPTA	100,00	100,00			H	

Tabel 3.2

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN KOTA SUBULUSSALAM
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE REKENING DIPA	SATUAN KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN		KET
						FISIK		KEUANGAN					
						%	TTB	Rp	%	TTB	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SP DIPA - 090.02.4.065610/2020**												
	090.02.09	**Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.764.360.000**	**100,00**	**100,00**	**235.640.000**	**7,85**	
	5090	**Pengembangan Sarana Distribusi Perdangan dan Kapasitas logistik Perdagangan**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.764.360.000**	**92,15**	**92,15**	**235.640.000**	**7,85**	
	004	**Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat/Gudang**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.764.360.000**	**92,15**	**92,15**	**235.640.000**	**7,85**	
		- Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Rundeng (1 paket)	2.800.000.000	2.800.000.000	93,33	100,00	93,33	2.580.700.000	92,17	86,02	219.300.000	7,83	

		- Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Rundeng (1 Paket)	100.000.000	100.000.000	3,33	100,00	3,33	99.000.000	99,00	3,30	1.000.000	1,00	
		- Administrasi Kegiatan Penunjanjang	100.000.000	100.000.000	3,33	100,00	3,33	84.660.000	84,66	2,82	15.340.000	15,34	
	JUMLAH PAGU KESELURUHAN		**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.764.360.000**	**92,15**	**92,15**	**235.640.000**	**7,85**	

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Laporan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Dasar, tim penyusun tidak menerima laporan Perkembangan Penerapan dan Pencapaian SPM, begitu juga kendala yang dihadapi oleh Tim Percepatan SPM Bidang Pendidikan Dasar.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai berikut:

a. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM bidang kesehatan tahun 2020, dari Menkes mencapai 100% yang artinya seluruh masyarakat wajib dilayanani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan keadaan kondisi kesehatan individu.

Tabel 4.1
Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Subulussalam

No	Jenis layanan dasar	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %
4	Pelayanan kesehatan balita	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100 %

a. Indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional meliputi :
   1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
   2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
   3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
   4. Setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar
   5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
   6. Setiap WNI usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

7. Setiap WNI usia 60 tahun keatas mendaptkan skrining kesehatan sesuai standar
8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11. Setiap orang dengan TB Mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12. Setiap orang beresiko HIV,(Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria,transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

3. Realisasi

Adapun hasil capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Subulussalam sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis layanan dasar	Target	Sasaran	Cakupan	Capaian %
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	2.465	2.4655	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %	1.796	1.796	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	1.766	1.766	100
4	Pelayanan kesehatan balita	100 %	10.605	6.440	60
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %	7.073	3.225	45
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	10.625	6.457	60
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	4.112	3.062	74

8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %	12.553	1.667	13
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100 %	465	381	81
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 %	226	226	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 %	305	180	59
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100 %	3.165	1.380	43

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM dapat di lihat sebagai berikut :

1. **Pelayanan kesehatan ibu hamil : 100%**
2. **Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin : 100%**
3. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : 100%**
4. **Pelayanan Kesehatan Balita : 60%**

Dimasa pandemic covid-19, pemeriksaan kesehatan ibu hamil berjalan seperti biasanya di poskesdes dan di puskesmas. Karena dalam melakukan persalinan sang ibu tidak dapat melakukan sendiri tanpa bantuan tenaga kesehatan. Persalinan yang dilakukan dimasa pandemic ini terlaksana sesuai protocol kesehatan yang ada.

Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan kesehatan balita akan tetap terlaksana seperti biasanya dengan dihadiri oleh petugas kesehatan namun harus mengikuti protocol kesehatan yang berlaku, dengan maksimal didampingi oleh 2 (dua) orang dari keluarga pasien dan 1 (satu) tenaga kesehatan yang akan melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilkinya.

Cakupan kunjungan pelayanan tersebut terjadi sedikit penurunan pada penimbangan balita di posyandu, karena posyandu tidak berjalan dengan baik dan seluruh pelayanan pada balita tersebut diarahkan ke puskesmas terdekat dengan menggunakan protocol kesehatan, tetapi tetap tidak maksimal. Banyak masyarakat yang tidak mau mengunjungi puskesmas hanya untuk

penimbangan balita saja, selain itu terdapat himbauan pada saat pandemic covid-19, yang sehat tidak boleh mengunjungi puskesmas hanya diperuntukkan untuk orang yang sakit saja, dalam kategori parah.

Pemeriksaan Kehamilan sesuai standar (4 kali) sangat mempengaruhi Kesehatan ibu hamil dan janinnya. Pemeriksaan kehamilan pada trimester Ketiga (>28 Minggu) sangat penting karena pada trimester III dilakukan Palpasi Abdomen untuk mendeteksi adanya kehamilan ganda, kelainan letak atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di Rumah sakit.

Berdasarkan Hasil pengamatan dilapangan masih ditemukan ibu-ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilannya ke petugas kesehatan. Pelayanan antenatal dengan teratur selain intrinsik ibu (Pengetahuan, umur, pendidikan) Faktor Ekstrinsik (Varietas, Pendapatan Suami, Keterjangkauan suatu ketersediaan Pelayanan). Juga mempengaruhi seorang ibu untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur ke petugas antenatal. pengetahuan ibu memiliki pengaruh terhadap jumlah kunjugan antenatal care kebanyakan ibu-ibu dengan pendidikan terakhir SD dan SMP. Kemudahan dalam menjangkau tempat pelayanan kesehatan, alasan keterjangkauan dan akses yang sulit ditemukan didesa penuntungan didaerah tersebut terdapat desa Sarkea dan Cok langit yang disatukan ke Desa Penuntungan dengan 1 kepala Desa. Kawasan Desa-desa yang masih banyak terisolir, akses jalan rusak, dan jarak jauh yang menyebabkan ibu hamil sulit memeriksakan kehamilannya ke petugas pelayanan Antenatal.

Masalah ketersediaan pelayanan juga sangat menetukan dimana bidan diwilayah Kecamatan Rundeng tergolong usia muda dan tidak berdomisili di desa, sehingga bidan tidak dapat menyediakan pelayanan antenatal secara berkala serta kurang dapat memantau perkembangan ibu hamil di desa yang jauh dari jangkauan puskesmas.

Varietas adalah keadaan seorang ibu yang melahirkan janin lebih dari 1 orang, masalah Varietas juga menjadi faktor yang mempertimbangkan, dimana ibu hamil yang memiliki Varietas >3 Anak cenderung tidak memeriksakan

kehamilannya, secara teratur kepetugas Kesehatan karena tidak pernah mengalami masalah pada kehamilan sebelumnya, mereka datang kepetugas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan hanya bila ada keluhan selama kehamilannya. Kebanyakan masyarakat melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Di poskesdes dan ada sebagian ibu yang tidak melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan seperti didesa yang sangat terpencil yang susah dijangkau oleh tenaga medis seperti di Desa Sepang, Suak Jampak, Cok Langit, Sarkea, dimana penduduknya masih percaya pada dukun dikarenakan tingkat pendidikan yang sangat rendah, tetapi itu hanya sebagian kecil yang berada di kota subulussalam sama hal nya dengan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang seharusnya dilakukan oleh ibu yang mempunyai bayi :

1. Melakukan kunjungan bayi 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan
2. Kunjungan Bayi pada umur 3 sampai 5 bulan
3. Kunjungan bayi 1 kali pada umur 6 sampai 8 bulan
4. Kunjungan bayi 1 kali pada umur 9 sampai 11 bulan

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar mengetahui sedini mungkin bila ada kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan imunisasi serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi.

Pada saat dilakukan kunjungan bayi dilakukan konseling untuk ASI Ekslusif dan penanganan rujukan kasus bila diperlukan. Pemantauan pertumbuhan perkembangan balita sangat perlu dipantau tumbuh kembangnya dengan asupan gizi dari HPK (Hari Pertama Kehidupan) dari janin sampai anak berusia 2 Tahun.

Pada saat usia 1 tahun keatas tumbuh bayi yang sangat cepat dari posisi motoriknya dan sisi Psikologi dan emosi anak akan semakin tampak pada masa ini. Asupan Nutrisi sangat penting dalam tumbuh kembang balita, gerakan anak

akan semakin beragam, pada usia ini sering mengajak bermain dengan melatih emosinya. Membangun kecerdasan emosional anak sama pentingnya dengan membangun kecerdasan intelektual, peran orang tua sangat penting untuk menunjang perkembangan anak.

Beberapa faktor yang sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan Pemberian kebutuhan dengan Nutrisi yang baik pada anak dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik , pemberian gizi sangat mutlak harus di berikan untuk menunjang tumbuh kembang.

1. Deteksi Dini Penyimpangan Pertumbuhan Balita dengan Pengukuran BB terhadap Tinggi badan (BB/TB),Pengukuran Lingkar Kepala
2. Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan
   a. Screening /pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner Pra screening
   b. Tes Daya dengar
   c. Tes Daya Lihat
3. Deteksi Emosional

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan Dasar : 45 %

Dimasa pandemic covid-19 pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dalam hal ini melakukan pelayanan penjaringan untuk anak eskolah, pemeriksaan berkala dan pelayanan UKGS sekolah tidak berjalan dengan efektif dikarenakan sekolah yang tidak rutin dilaksanankan setiap harinya, jadwal sekolah yang diberikan selang seling dalam proses pemebelajaran dan jam yang ditempuh saat proses pelajaran tidak maksimal, siswa siswi belajar hanya 3 jam dalam sehari.

Selain itu, ada masa tidak sekolah selama 6 bulan untuk sekolah dasar dengan tujuan menghindari kerumunan (penyebaran covid-19) agar tidak bertambahnya jumlah kasus covid-19. Sebelum terjadinya pandemic covid-19

terdapat masa dimana anak-anak sekolah dasar belajar rutin seperti biasanya yang dilakukan pada bulan januari-maret tahun 2020. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tidak mencapai 100% akibat hal diatas.

Pelayanan kesehatan disekolah dasar diutamakan pada peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif), serta penyembuhan dan pemulihan (Kuratif), dan rehabilitasi yang dilaksanakan melalui kegiatan berikut :

Menurut Nasrul Efendi (1998: 117), kegiatan pelayanan kesehatan standar minimal untuk sekolah dasar :

a. Peningkatan kesehatan (Promotif)

1. Memberikan keteladanan disekolah meliputi:
   Warung sekolah yang memenuhi persyaratan dan kebersihan sekolah.
2. Membina kebersihan peserta didik.
3. Membentuk kader kesehatan sekolah (Dokter Cilik ,Dokter Cilik adalah peserta didik yang ikut melaksana sebagian Usaha pelayanan kesehatan serta berperan secara aktif dalam kegiatan sekolah yang diselenggarakan disekolah. Syarat menjadi Dokter Cilik ,Sudah menduduki kelas IV,V, berprestasi disekolah, berwatak pemimpin, bertanggung jawab, bersih, berprilaku sehat serta mendapatkan pelatihan dari petugas puskesmas.
4. Memberikan penyuluhan mengenai kesehatan Gizi dan menjaga kesehatan pribadi.

b. Pencegahan Preventif :

1. Penjaringan peserta didik kelas 1 tujuannya untuk mengetahui secara Dini massalah kesehatan anak sekolah, antara lain, kesehatan gizi anak, kesehatan indra penglihatan dan pendengaran.
2. Pemeriksaan kesehatan pribadi dilakukan oleh petugas kesehatan, guru UKS, Dokter Cilik, kepada seluruh siswa dan guru setiap 6 bulan memantau memelihara serta meningkatkan status kesehatan mereka.

3. Imunisasi ulang kelas I dan IV :

   Setiap imunisasi dilakukan pada bulan November yang dikenal dengan sebagai Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

   Tujuan dilakukan pemberian imunisasi adalah untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit Difteri dan Tetanus dengan Imunisasi DT dan TT semua anak kelas 1 menerima Imunisasi DT siswa kelas IV menerima Imunisasi TT.
4. Pengawasan Keadaan air.
5. Pemberantasan Sarang Nyamuk.
6. Pelayanan kesehatan Gigi dikerjakan oleh Petugas kesehatan yang terdiri 3 macam pelayanan yaitu :
   - UKGS Tahap I : pendidikan dan penyuluhan kesehatan Gigi dan mengadakan kegiatan menggosok gigi massal minimal untk kelas I, II,III di bimbing guru dengan memakai pasta gigi mengandung Fluoride minimal 1 x sebulan.
   - UKGS tahap II : UKGS Tahap I di tambah penjaringan kesehatan Gigi dan Mulut untuk kelas I diikuti pencabutan gigi sulung yang sudah waktunya tanggal/Lepas, pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit oleh guru, pelayanan medik dasar atas permintaan dan rujukan bagi yang memerlukan.
   - UKGS tahap III: ukgs TAHAP 2ditambah pelayanan medik dasar pada kelas terpilih sesuai untuk kelas I,III, V dan VI.

c. Pengobatan (Kuratif)

1. Rujukan medik
2. Pengobatan Ringan

d. Pemulihan Rehabilitatif

Pencegahan komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit.

Untuk pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, yang sudah dilakukan disekolah untuk kelas I yaitu : pemeriksaan berkala, dengan sasaran pertahun 7.073 siswa dengan capaian 3.225 siswa. Banyak kendala dihadapi pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan disekolah, seperti : saat dilakukan pemeriksaan ada siswa yang tidak datang ke sekolah dan ada beberapa sekolah yang tidak mendukung pelaksanaan penjaringan.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif : 60 %
7. Pelayanan kesehatan pada Usia lanjut : 74 %
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi : 13 %
9. Pelayanan Kesehatan Pada penderita DM : 81 %

Pencegahan dan pengendalian Faktor resiko PTM meliputi 4 cara yaitu :

1. Advokasi, Kerjasama, bimbingan dan manajemen PTM.
2. Promosi pencegahan dan pengurangan faktor PTM melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional.
4. Penguatan surveilance pengawasan dan riset PTM.

Penyebab kematian 60 persen yaitu:

- ✓ Kardiovaskular/ Hipertensi
- ✓ Diabetes Mellitus
- ✓ Kanker
- ✓ Penyakit Paru Obstruktif Kronik

Dan pada pengendalian 4 faktor resik bersama yaitu :

- Diet tidak sehat (Diet Gizi tidak seimbang, kurang Konsumsi sayur dan buah serta tinggi konsumsi gula, garam dan lemak).
- Merokok serta mengonsumsi alkohol.

Kasus pencegahan dan dan pengendalian PTM diutamakan untuk :

- Menjaga agar masyarakat tetap sehat dan terhindar dari faktor perilaku beresiko.
- Mampu mengidentifikasi dan memodifikasi perilaku beresikonya agar tidak menjadi omset PTM serta menemukan dalam kasus berpotensi PTM agar dapat diRujuk ke FKTP dan ditangani sesuai standar.

Penemuan dan faktor resiko biologis seperti: obesitas, Tensi Darah tinggi, Gula darah Tinggi, gangguann penglihatan, gangguan pendengaran serta Deteksi Dini Kanker Serviks dan payudara. Dilakukan dengan pembudayaan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau minimal setahun sekali pada Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu PenyakitTidak menular) setiap desa atau kelurahan diharapkan minimal terdapat 1 Posbindu PTM untuk menjangkau seluruh Penduduk Usia 15 Tahun keatas diwilayah tersebut.

Deteksi dini faktor Resio PTM dan pengobatan yang tepat standar bagi hipertensi dan diabetes mellitus juga telah termasuk dalam kebutuhan standar minimal layanan kesehatan bagi semua pemerintah Kabupaten/kota, Hal ini memaksa otoritas kabupaten/kota untuk memastikan bahwa sistem layanan kesehatan akan memenuhi kebutuhan mencapai semua indikator dan menyediakan anggaran yang cukup. Dalam permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang kesehatan bagi pemerintah daerah kabupaten Kota disebutkan bahwa :

- Pelayanan kesehatan pada usia produktif menyebutkan bahwa setiap warga negara usia 15 Tahun s/d 59 Tahun mendapatkan Screening kesehatan sesuai standar.
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut menyebutkan bahwa setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan Screening kesehatan sesuai standar.
- Screening kesehatan sesuai standar dapat dilakukan di puskesmas dan layanan termasuk Posbindu PTM.

Di Kota Subulussalam tingkat kunjungan masyarakat diatas > 15 tahun berkurang, kesadaran untuk merubah Prilaku hidup sehat dengan pencegahan Lebih baik dari pengobatan. Pengobatan itu belum tertanam dalam diri masyarakat. Sementara fasilitas kesehatan sudah memadai dimana setiap desa ada Posbindu yang dibuat, dan disetiap Kecamatan ada fasilitas tingkat pertama (Puskesmas) semua yang datang ke puskesmas dan di poskesdes tanpa ada pungutan biaya, untuk hal tersebut mari sama-sama kita ajak masyrakat untuk datang ke posyandu, poskesdes, dan Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. Atau 2 kali dalam setahun untuk mengetahui penyakit yang diderita, agar segera diobati dan ditindak lanjuti.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa : 100 %

Dimasa pandemic Covid-19 untuk penanganan gangguan jiwa pada asuhan keperawatannya tidak seberapa berjalan dengan baik karena mengikuti protocol kesehatan (tidak boleh berkunjung dan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak), tetapi penanganannya dalam minum obat tetap dilakukan dengan kerjasama orang tua atau pendamping keluarga lainnya untuk mengambil obat ke puskesmas. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa dikategorikan disini adalah pelayanan yang berat (pasien wajib minum obat) jika pasien yang berat tidak minum obat maka maka pasien tersebut akan berakibat fatal bagi dirinya dan bagi orang disekitarnya. Peran serta dokter dan perawat dalam penanganan ODGJ berat sangat dibutuhkan agar penyakit tersebut tidak menjadi lebih berat lagi, pantauan orang sekitar sangat diperlukan untuk penanganan ODGJ berat tersebut.

Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, hal itu dapat juga menganggu produktivitas sehari-hari. Jika ada anggota keluarga mengalami gangguan jiwa maka akan sangat berdampak buruk, dimana dampak sosial nya

sangat serius berupa penolakan, pengucilan, dan diskriminasi, begitu pula dampak ekonomi yang ditimbulkan berupa hilangnya produktivitas untuk mencari nafkah untuk penderita maupun keluarga yang harus merawat. Oleh karena itu memerlukan penanganan sedini mungkin, agar gejala yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi gangguan jiwa yang kronis, penderita gangguan jiwa, skizoprenia maupun psikosis sebenarnya masih dapat ditolong syaratnya pengobatan baik dan tidak terlambat. Kalau syarat ini dipenuhi 25% penderita skizoprenia bisa disembuhkan gejala yang menderita psikosis sangat banyak wujudnya tidak menyangkut kondisi Fisik, bisa berupa perasaan curiga, depresi, cemas, waham, perasaan yang mudah berubah tegang, cepat tersinggung, atau marah tanpa alasan yang jelas.

Penyembuhan sakit jiwa yang paling banyak adalah program rehabilitasi. Hal ini penting dilakukan untuk persiapan penempatan kembali ke keluarga dan masyarakat. Program ini biasanya dilakukan dilembaga (Institusi) Rehabilitasi. Dalam program Rehabilitasi dilakukan berbagai kegiatan antara lain dengan terapi kelompok yang bertujuan membebaskan penderita dari Stress dan dapat membantu agar dapat mengerti sebab kesukaran dan membantu terbentuknya mekanisme pembelaan yang lebih baik dan dapat diterima oleh keluarga/ masyarakat. Selain itu peran kelurga adalah sesuatu yang penting dalam penyembuhan sakit jiwa ini. Kelurga adalah orang-orang yang sangat dekat dan dianggap paling banyak tahu kondisi pasien.

Dikota Subulussalam Jumlah penderita 192 Jiwa semua ditangani dengan pemberian obat secara teratur dan perawatan di rumah penderita gangguan jiwa, bagi penderita ODGJ yang kambuh langsung ditangani dan yang tidak bisa ditangani di rujuk ke Rumah Sakit Umum.

11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB : 50 %

TB menjadi perhatian ahli kesehatan dan epidemiologi karena erat kaitannya dengan infeksi oportunistik dikalangan ODHA, TBC,menjadi

pembunuh terbesar dikalangan ODHA, namun dalam dua kali Penelitia WHO terhadap penderita TBC yang HIV positif namun kasus tahu pertahun pernah terdeteksi dan terinfeksi HIV Sebaiknya tak ada pula data Resus ODHA yang mengidap TBC. Penderita TBC cenderung susah diobati kendalanya, Pengobatan tersedia tapi penderita tidak teratur memakan obatnya akibatnya terjadi resistensi obat dan infeksi TBC kambuh lagi, ketidak taatan memakai obat ini menjadi alasan yang sangat umum setelah dua bulan memakan obat misalnya seorang pasien TBC tidak merasakan ada keluhan lagi merekapun menghentikan pemakaian obat karena mereka merasa tidak berguna lagi meneruskannya padahal pengobatan TB harus dilakukan secara teratur dan Rutin selama 6 bulan. Dalam program pengobatan TB yang sudah Baku yang dikenal sebagai DOTS.

Jumlah suspect TBC 305 dari suspect yang ditemukan diperiksa dengan pemeriksaan pelayanan TBC seperti pemeriksaan dahak (sputum) dan di rontgen agar diketahui apakah dari pemeriksaan tersebut terdapat positif TBC atau tidak, dengan demikian pengobatan dapat diteruskan sesuai dengan diagnosanya. Penderita TBC berlanjut pengobatannya selama 6 (enam) bulan dan jika tidak berhasil maka akan diteruskan kembali enam bulan berikutnya.

Permasalahan lain ditemukan adalah ketika ada anggota keluarga yang mengidap TBC disembunyikan karena hal tersebut menjadi aib bagi keluarga lingkungan Rumah dan kebersihan dan sangat mendukung penularan penyakit kepada anggota keluarga, pendekatan keluarga sehat sudah dilakukan oleh petugas kesehatan dalam pendampingan Minum obat dan penemuan penderita baru TBC, kita hanya bisa menunggu kesadaran masyarakat untuk peduli dengan dirinya dan anggota keluarga supaya Hidup sehat.

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko HIV : 43 %

Pelayanan yang dilakukan pada HIV/AIDS adalah orang-orang yang beresiko akan terinfeksi HIV/AIDS seperti para pekerja supir, salon, tukang

pangkas pria, penderita TBC dan ibu hamil serta pekerja yang berhubungan langsung dengan penanganan HIV. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan agar dapat tertangani langsung dan tidak menyebarkan ke orang lain, untuk pemeriksaan yang dilakukan pada sasaran tersebut adalah 567 %.

Pelayanan HIV/AIDS merupakan hal yang berbeda tetapi sering berhubungan Human Immuniodeficiency Virus) atau biasa disingkat HIV adalah Virus menyebabkan penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga memungkinkan penyakit, bakteri ,virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh anda , HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang seharusnya melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya tubuh menjadi kesulitan melawan infeksi dan kanker terkait HIV tertentu. Tidak seperti virus lainnya, tubuh anda tidak bisa menyingkirkan Hiv sepenuhnya. Jika anda terinfeksi HIV anda akan memikulnya seumur hidup. Sementara itu AIDS adalah kondisi penyakit kronis dari onfeksi Virus HIV Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit lain seperti : kanker dan berbagai infeksi yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh.

Gejala pertama HIV mirip dengan infeksi virus lainnya yaitu Demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, kehilangan Berat Badan, Pembengkakan Kelenjar Getah bening di ketiak atau pangkal paha. Jika dibiarkan kondisi ini bisa mengarah pada AIDS dengan gejala yang lebih parah, berbagai gejala AIDS yang biasanya muncul :

- Sariawan, Luka pada Lidah atau mulut yang disebabkan oleh infeksi jamur
- Infeksi jamur Vagina yang parah atau berulang
- Penyakit radang paggul kronis
- Infeksi parah dan sering mengalami kelelahan ekstrim tanpa sebab, bersamaan dengan sakit kepala atau pusing
- Turunnya berat badan lebih dari 5 kg yang tidak disebabkan karena olahraga atau diet

- Lebih mengalami memar di bagian tubuh
- Diare yang lebih sering
- Sering demam dan berkeringat dimalam hari
- Batuk kering terus menerus
- Perdarahan pada kulit, mulut, hidung, anus atau vagina tanpa penyebab yang pasti.
- Ruam kulit yang sering atau tidak biasa
- Mati rasa parah atau nyeri pada tangan dan kaki
- Hilangnya kendali otot dan refleksi kelumpuhan atau kehilangaan kekuatan otot.
- Kebingungan (linglung) atau perubahan kepribadian.

Penularan HIV/AIDS yaitu :

- Melakukan Hubungan seksual tanpa alat pengaman dengan seseorang yang positif HIV
- Berbagi jarum suntik yang sama dengan orang yang positif HIV
- Membuat tato pada tubuh ditempat yang alatnya tidak sterilkan

Untuk hal tersebut perlu diperhatikan jika ada anggota keluarga yang menderita HIV/AIDS segera berobat ke Rumah sakit umum dan untuk mendapatkan terapi, selain itu perlu juga pada pengawasan penderita untuk menjaga kesehatan dan mengikuti semua anjuran Dokter.

Di Kota Subulussalam jumlah penderita HIV 1 orang dan sudah meninggal dunia. Penderita HIV perlu diperhatikan khusus jangan dikucilkan tetapi ajak lah pasien tersebut untuk selalu mengunjungi Rumah sakit umum. Penderita HIV di Kota Subulussalam kebanyakan dari luar Daerah yang datang ke Subulussalam dan menetap di Subulussalam setelah terkena HIV dari kota lain, prediksi penderita HIV tidak bisa diketahui berupa jumlahnya tetapi orang-orang yang beresiko seperti : Waria, supir, dan penderita TBC.

4. Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang tersedia untuk menunjang keberhasilan Target Pencapaian Setandar Pelayanan Minimal Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

No	SPM	BIAYA (RP)	Ket
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Rp. 1.140.090.000	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Rp. 1.157.520.000	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir		
4	Pelayanan kesehatan Balita	Rp. 369.830.000	
5	Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dasar	Rp. 869.700.000	
6	Pelaksanaan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp. 121.330.000	
7	Pelayanan Kesehatan Hipertensi		
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus		
9	Pelaksanaan pada Usila	Rp. 687.000.000	
10	Pelaksanaan Kesehatan Jiwa		
11	Pelaksanaan kesehatan pada Penderita TB	Rp. 800.842.000	
12	Pelaksanaan Kesehatan pada penderita HIV	Rp. 307.075.000	

5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Subulussalam sangat dibutuhkan keberadaan personil pelaksana kegiatan. Pada tahun 2020, jumlah personil atau pegawai yang melaksanakan kegiatan

pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam yaitu berjumlah 55 orang PNS dan adanya beberapa tenaga pendukung lainnya.

6. Permasalahan dan solusi

Dimasa pandemic COVID-19 kegiatan standar pelayanan minimal tidak seberapa aktif, dikarenakan seluruh masyarakat dituntut untuk menerapkan protocol kesehatan yaitu tidak boleh berkumpul pada kerumunan orang banyak, sehingga menghambat berjalannya standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Banyak cakupan yang tidak mencapai sesuai target, seperti UKS, Pelayanan Usia Produktif, pelayanan penyakit hipertensi dan diabetes (PTM), TBC, HIV/AIDS. Selain itu, yang menjadi penghambat bukan karena adanya pandemic ini, tetapi masyarakat itu sendiri yang tidak ingin adanya perubahan perilaku antar individu maupun sosialnya.

Budaya yang terdapat pada masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat itu sendiri, dikarenakan adanya pemahaman dan perbedaan persepsi terkait kesehatan. Factor Ekonomi sendiri tidak menjadi hambatan untuk perubahan perilaku individual, yang menjadi hambatan justru pada lingkungan sosial.

Untuk kedepannya diharapkan tidak ada hambatan dan kendala didalam melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat, semoga pandemic ini segera berlalu dan aktivitas berjalan seperti sedia kala.

Saran Terhadap Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Subulussalam antara lain:

1. Diharapkan semua petugas dapat melaksanakan SPM di Wilayah Kerja Puskesmas masing-masing.

2. Peran serta lintas sektor untuk penanganan permasalahan yang dihadapi pada saat penerapan SPM dapat terlaksana dalam pelaksanaan lokakarya mini Kecamatan.
3. Tetap melaksanakan protokol kesehatan setiap kali melakukan pelayanan.
4. Membuat pelaporan dengan akurat agar tidak salah dalam perencanaan anggaran.
5. Diharapkan kepada kepala desa untuk menganggarkan stick check kolesterol diabetes di dalam anggaran desa.
6. Diharapkan kepada dinas pendidikan untuk selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan agar kesehatan anak sekola dapat terjaga.
7. Diharapkan kepada pemerintah daerah ikut melaksanakan program standar pelayananan minimal sesuai dengan instruksi presiden.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.4
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator		Nilai		
1	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	97%	2020	Berdasarkan atas target minimal kebutuhan air bersih di tiap kabupaten / kota
			2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem	25%	2020	Dinas yg membidangi Pekerjaan

					irigasi yang sudah ada.			Umum
2	Jalan	Jaringan	Aksesbilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	63%	2029	Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota
			Mobilitas	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	70%	2020	Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota
			Keselamatan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2020	Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2020	Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota
			Kecepatan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2020	Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota
3	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal		2020	
		Sangat buruk				40%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
							2020	
							2020	
		Buruk				50%	2020	
		Sedang				70%	2020	
		Baik				80%	2020	

		Sangat Baik		60 liter/orang/ hari	100%	2020	
4	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Air Limbah Permukiman	9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	50%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	50%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Pengelolaan Sampah	11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	58%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	58%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Drainase	13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	87%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.5
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
		Indikator		Nilai		
1	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	1	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan	50%	2020	Dinas yang membidangi Pekerja

				perkotaan.			an Umum
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan	2	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	3	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100%	2020	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
3	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	4	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2020	Unit yang melakukan Pembinaan Jasa konstruksi
4		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	5	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2020	Unit yang melakukan Pembinaan Jasa konstruksi
5	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	6	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100% 100%	2020 (Kab. /Kota dan Kecamatan 2020 (Kelurahan)	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	7	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	2020	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 Tentang penerapan Standar pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi :

1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator :

a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota

b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan Program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Subulussalam dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Anggaran
1	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100 %	19.290.000
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	-
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	9.814.800.000

3. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh Satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota subulussalam pada tahun 2020 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kota Subulussalam terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan pada tahun 2020 di alokasi /pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Realisasi Pencapaian Urusan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator	Perhitungan		Realisasi
1	Pemeliharaan Ketentrman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah di Kab/Kota	Jml Pelanggaran Perda Yang Ditangani x 100% Jumlah Pelanggaran		1,21
		2. Cakupan Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Kelompok Patroli x 3 Jumlah Kecamatan		3x patroli dalam sehari

		3. Cakupan Rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas di kab/Kota	Jumlah Linmas Jumlah Rt		4,1

4. Alokasi anggaran

Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat Tahun 2020 sebesar .Rp. 616.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Cakupan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam

   Rp 116.500.000

2. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat dan (Linmas) di Kabupaten/Kota Rp 500.000.000,-

5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyrakat pada Tahun 2020 di dukung oleh Personil sebanyak 183 0rang

a. Pegawai Negeri Sipil : 13 Orang

b. Non Pegawai Negeri Sipil : 170 Orang

6.Permasalahan dan Solusi

Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal tidak terlepas dari berbagai kendala atau permasalahan. Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi diantaranya:

a. Pengetahuan Pegawai yang menangani Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih minim dan belum adanya lagi Bimtek tentang SPM. Ini terlihat dari penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal masih memiliki kendala dalam penyusunan;
b. Adanya data pendukung penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang masih sulit diperoleh;
c. Kurangnya Anggaran SKPK dalam melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal
d. Belum ada rincian yang khusus dibuat dalam suatu dokumen rencana aksi daerah untuk mencapai target standar pelayanan minimal.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial Merupakan Penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh kementrian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Subulussalam dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Subulussalam sebagai Implementasi dan kebijakan strategi penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) Pelayanan Dasar Yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti Skala Kab/Kota;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Skala Kab/Kota;
e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam:

a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota
b. Lapiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang teknis pembiayaan pemenuhan pelayanan,Sumber Daya manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Secara Nasional Serta Realisasi

Nilai Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Subulussalam tahun 2020 adalah: 26,60% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel di bawa ini.

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Capain SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Subulussalam Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN KOTA

		INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	2020	100	3,33	3,33
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak terlantar diluar Panti	2020	100	10,00	10,00
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia terlantar diluar Panti	2020	100	0	0

		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis Terlantar Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis terlantar diluar Panti	2020	100	20	20
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Terlantar Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial terlantar diluar Panti	2020	100	100	200
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
NILAI Rata rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Subulussalam (%)						26,6

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapain SPM Bidang Urusan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Subulussalam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Alokasi anggaran yang mendukung pencapain SPM Bidang Urusan Sosial

NO	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	6.271.630.637,00
2	APBN	-
3	BPNT	10.987.200.000,00
3	KEBENCANAAN ALAM	0,00
4	KEBENCANAAN SOSIAL	0,00
5	PKH	13.513.429.000,00
6	ASLUT	0,00
7	ASPDB	0,00
8	SUMBANGAN PIHAK DONATUR BAGI PMKS	0,00
	JUMLAH	**30.772.259.637,00**

4. Dukungan Personnil

Dukungan Personil Menggambarkan Jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapain SPM:

a. PNS = 16 Orang
b. Non-PNS = 27 Orang

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Belum Semua Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat Tertangani;
- Terkait hal-hal teknis Pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana Prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan Optimal.

Solusi:

- Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait,lintas Daerh dengan Masalah-masalah Penanganan PMKS;
- Meningkatkan Kualitas Hidup PMKS melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan PMKS dan Peran Aktif masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Perlu Pelatihan Teknis terhadap PNS untuk Meningkatkan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS.

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG PENERAPAN SPM

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Pada tahun 2020 alokasi APBK untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruhnya berjumlah Rp. 132.973.498.791,06 Yang terdiri dari belanja langsung Rp. 56.138.533.651,- dan belanja tidak langsung Rp. 76.834.965.140,06 Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

I. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini antara lain :

a. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
b. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
c. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
d. Pembangunan gedung sekolah
e. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
f. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
g. Pengadaan mebeleur sekolah
h. Pengembangan pendidikan anak usia dini

i. Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
j. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
k. Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) peserta didik PAUD/TPA/KB/SPS
l. Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
m. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
n. Manajemen Pengelolaan PAUD dan DIKMAS

II. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun antara lain :

a. Pembangunan gedung sekolah
b. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker
c. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
d. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
e. Pengadaan mebeleur sekolah
f. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
g. Penyediaan Dana TIM Manajemen BOS
h. Penyelengaraan Olimpiade Siswa Nasional
i. Penyelengaraan Ujian Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
j. Pembangunan Pagar Sekolah
k. Manajemen pengelolaan Kartu Indonesia Pintar
l. Manajemen DAPODIK SD/SMP
m. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
n. Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah
o. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
p. Pelaksanaan Pendidikan melalui Daring dan Radio

III. Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal antara lain :

a. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
b. Pengembangan pendidikan Keaksaran
c. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
d. Penguatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Non Formal

IV. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan

Kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan antara lain :

a. Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
b. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
c. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik
d. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Disamping itu juga dilaksanakan program dan kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian SPM, yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
l. Penyediaan jasa operasional perkantoran
m. Penyediaan jasa pelelangan dan pengadaan barang

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pengadaan Mebeleur
c. Pemeliharaan Rutin/Berkali Kendaraan Dinas/Operasional
d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
d. Penyusunan Renstra
e. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
f. Penyusunan Analisis Jabatan
g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Pada tahun 2020 alokasi APBK untuk Dinas Kesehatan seluruhnya berjumlah Rp.45.920.302.012,- Yang terdiri dari belanja langsung Rp. 27.845.305.559,- dan belanja tidak langsung Rp. 18.074.996.453,- Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
b. Pelayanan kesehatan calon jemaah haji
c. Pelayanan Kesehatan jaminan kesehatan nasional
d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
e. Operasional Kesehatan Puskesmas
f. Operasional Kesehatan UKM
g. Public Safety Centre (PSC)
h. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
i. Dukungan manajemen kesehatan UKM
j. Penguatan Interpensi STUNTING
k. Peningkatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

II. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kegiatan pada Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak antara lain :

Jaminan persalinan bagi keluarga kurang mampu

III. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pada Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat antara lain :

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
b. Pencanangan Gerakan Hidup Sehat di Masyarakat
c. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

IV. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan antara lain :

a. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
b. Akreditasi Puskesmas

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
b. Penyusunan Renstra
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
d. Pertemuan Peningkatan SKP Kepegawaian
e. Rapat Koordinasi Analisis Beban Kerja seluruh Puskesmas

VI. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan pada Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan antara lain :

a. Pengawasana dan pemantauan perizinan tenaga dan sarana kesehatan

VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Kesehatan

Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Kesehatan antara lain :

a. Peningkatan dan Pencegahan serta Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
b. Pertemuan Berkala Lintas Program dan Lintas Sektor SKPD
c. Penyusunan Dokumen Tata Naskah
d. Penilaian Angka Kredit Point Dinas

VIII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
l. Penyediaan jasa operasional perkantoran
m. Penyediaan jasa pelelangan dan pengadaan barang
n. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :

a. Pengadaan peralatan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

X. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan antara lain :

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perkebalan Kesehatan
c. Penyediaan bahan medis habis pakai puskesmas
d. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
e. Distribusi obat
f. E-logistic
g. Pengawasan Obat dan Makanan

XI. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan pada Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan antara lain :

Pembinaan organisasi perempuan

XII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat antara lain :

a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin dan kekurangan Zat Mikro lainnya.
b. Perbaikan Gizi Masyarakat dalam Peningkatan Status Gizi

XIII. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan pada Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin antara lain :

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

XIV. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan pada Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya antara lain :

a. Pembangunan Puskesmas
b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
c. Pembangunan Poskesdes
d. Pembuatan Dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)

XV. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular antara lain :

a. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
b. Sosialisasi HIV/AIDS
c. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

XVI. Program Pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat

Kegiatan pada Prgram Pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat antara lain :

Evaluasi dan pengembangan standar Pelayanan Kesehatan

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

adalah sebagai berikut :

I. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Kegiatan pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan antara lain :

Penunjangan operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

II. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah antara lain :

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

III. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kegiatan pada Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong antara lain :

pembangunan saluran drainase dan gorong gorong

Disamping itu juga dilaksanakan program dan kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian SPM, yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa operasional perkantoran
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
g. Penyediaan komponen instalisasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan alat tulis kantor

i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan pelelangan dan pengadaan barang
k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
l. Penyediaan makanan dan minuman
m. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur antara lain :

a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

III. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan antara lain :

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Penyusunan Analisis Beban Kerja
d. Penyusunan Renstra
e. Penyusunan Analisis Jabatan

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan capaian SPM menurut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 adalah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan tersebut diatas merupakan urusan wajib untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perumahan Rakyat.

I. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan pada Program Pengembangan Perumahan antara lain :

Pembangunan Rumah Sehat Sederhana

II. Program lingkungan sehat perumahan

Kegiatan pada Program lingkungan sehat perumahan antara lain :

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

I. Program Pengamanan Penegakan Perda.

Kegiatan pada Program Pengamanan Penegakan Perda antara lain:

Penganamanan Penegakan Perda

II. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Kegiatan pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan antara lain :

Pengendalian keamanan lingkungan

III. Pogram Pengawasan Syariat Islam.

Kegiatan pada Pogram Pengawasan Syariat Islam antara lain :

Pengawasan syariat islam

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial antara lain :

a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
b. Peningkatan penanganan penyaluran jaminan sosial bagi orang dengan disabilitas.

II. Program Pembinaan Anak Terlantar

Kegiatan pada Program Pembinaan Anak Terlantar antara lain :

a. Penanganan diversi anak berhadapan dengan hukum
b. Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat dan korban bencana

III. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial

Kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial antara lain :

a. Peningkatan penanganan Program Keluarga Harapan (PKH)
b. Penguatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan

IV. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Lainnya)

Kegiatan pada Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Lainnya) antara lain :

Pemulangan orang terlantar dan PMKS lainnya

V. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :

Pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)

BAB V

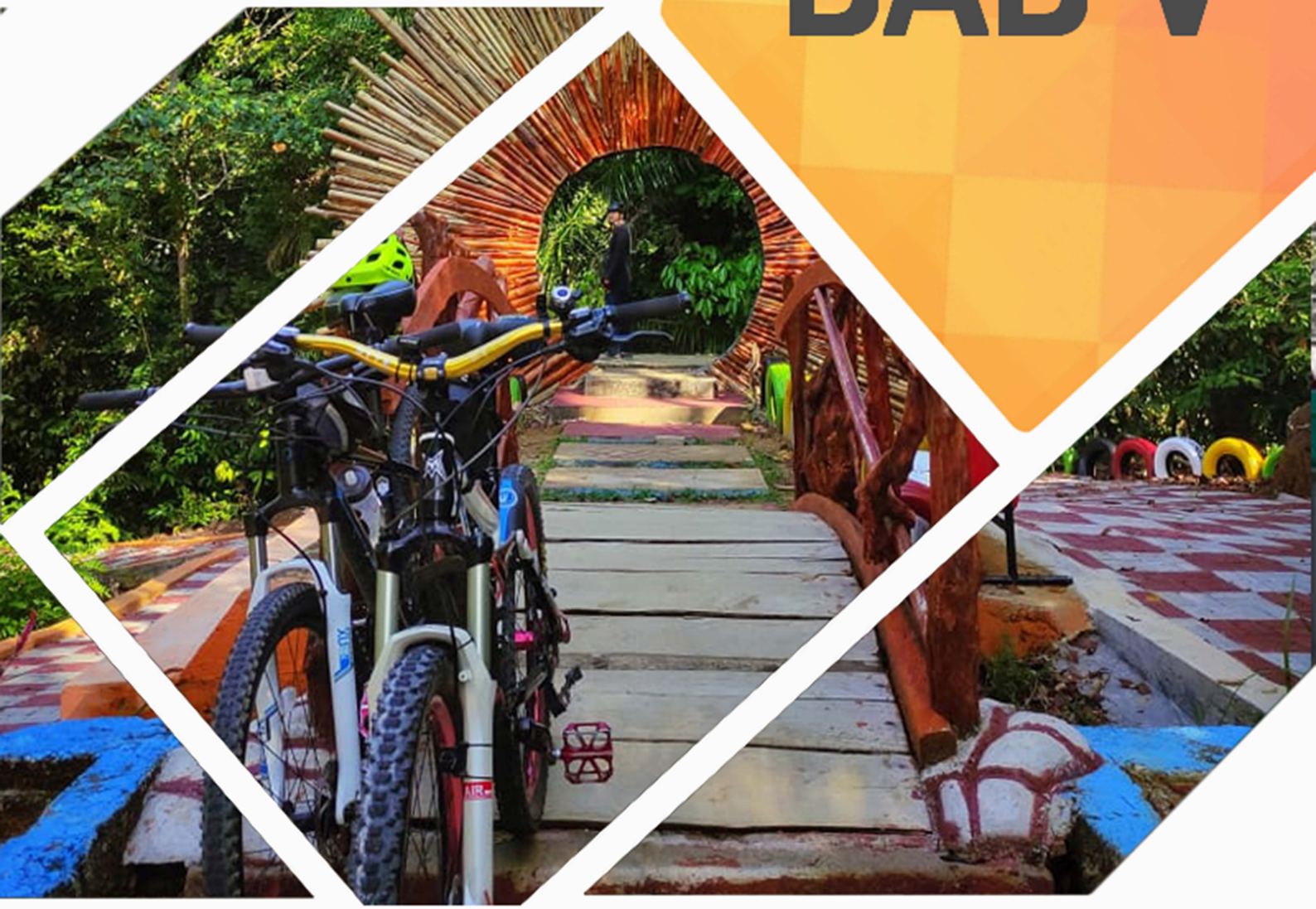

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan *progress report* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun 2020 dan sumber dana lainnya (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta kerjasama dengan pihak lainnya.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, semoga dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada seluruh stakeholder sehingga mampu memberikan umpan balik demi kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat untuk dapat memberikan pejelasan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajiannya, terima kasih.

Subulussalam, Maret 2021

Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Telp.0627-31221 Fax. (0627) 31717 Kode pos. 24782